BADAN POM

LAKIP INTERIM Triwulan I 2026

BBPOM DI BANJARBARU

085245004884 @Bbpom banjarmasin @bpombanjarbaru @bpom.banjarbaru bpombanjarbaru

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kesehatan, Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengelola kinerja secara terstruktur melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang efektif, pengukuran yang objektif, serta evaluasi dan pelaporan yang akuntabel. Dalam kerangka tersebut, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang utuh dan berkelanjutan.

Penyusunan LAKIP BBPOM di Banjarbaru berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyajian dan Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru periode 2025–2029. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan capaian keluaran (output), tetapi juga menitikberatkan pada pencapaian hasil (outcome) dan kontribusi nyata terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Setiap indikator kinerja dianalisis secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis hasil (result-based management), mencakup penilaian terhadap relevansi program, efektivitas pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta dampak yang dihasilkan. Laporan ini juga memuat pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan dengan unit pelaksana teknis lain yang setara, evaluasi program dan kegiatan pendukung, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta rencana tindak lanjut perbaikan kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Balai Besar POM di Banjarbaru kepada Kepala Badan POM, para pemangku

kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat. Laporan ini diharapkan menjadi media penyampaian informasi yang transparan mengenai capaian kinerja serta proses yang ditempuh dalam mencapai target sepanjang triwulan I tahun 2026.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dan dampak kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus menjadi umpan balik bagi organisasi dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru.

Kami menyadari bahwa akuntabilitas kinerja bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, LAKIP ini diharapkan menjadi sarana refleksi organisasi, dasar pengambilan keputusan berbasis data, serta pendorong peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Banjarbaru, 27 April 2026

Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

Ary Yustantiningsih, S,Si, Apt.

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari RPJMN baru Tahun 2025-2029, tahun kedua pasca transisi dari Pemerintahan yang lama kepada Pemerintahan yang baru. Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2026 terdapat 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2026, kinerja masing-masing Indikatornya adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 15 (sebelas) indikator kinerja :
    1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 96,2; realisasi 99,88; capaian 103,82% (**Sangat Baik**).
    2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO; target tidak ada; evaluasi tahunan,
    3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 99,81; realisasi 100; capaian 100,19% (**Sangat Baik**),
    4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT; target 100; realisasi 100; capaian 100% (**Baik**),
    5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 99,02; realisasi 100,00; capaian 100,99% (**Sangat Baik**),
    6) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, target 98,64; realisasi 83,33; capaian 84,48% (**Cukup**),
    7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 100; realisasi 100; capaian 100,00% (**Baik**),
    8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 96,38; realisasi 95,24; capaian 98,82% (**Baik**),
    9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 98,73; realisasi 99,44; capaian 100,72% (**Sangat Baik**),
    10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 97,08; realisasi 100; capaian 103,01% (**Sangat Baik**),

11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 99,91; realisasi 98,67; capaian 98,76% (**Baik**),
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan ; target 92; realisasi 100,00; capaian 108,70% (**Sangat Baik**),
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT; target pada triwulan I tidak ada, evaluasi tahunan,
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 73,5; realisasi 74,30; capaian 101,09% (**Sangat Baik**),
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman; target triwulan I tidak ada, evaluasi tahunan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dengan indikator kinerja : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 14; realisasi 0; capaian 0% (**Kurang**),

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :
   a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 91,03; realisasi 91,39; capaian 100,40% (**Sangat Baik**)
   b) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 7; realisasi 7; capaian 100% % (**Baik**),
   c) Jumlah desa pangan aman; target 14; realisasi 14; capaian 100% % (**Baik**),
   d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target 7; realisasi 7; capaian 100% (**Baik**),

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 15; realisasi 15,15; capaian 101,03% (**Sangat Baik**),

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan

Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 0; realisasi 0; capaian -

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 50; realisasi 50; capaian 100,00% (**Baik**)
7. Layanan Publik UPT yang prima, tidak ada target triwulan I, evaluasi tahunan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan 4 (empat) indikator kinerja targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO, yaitu :
    a) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM; tidak ada target triwulan I, evaluasi tahunan,
    b) Nilai AKIP UPT BPOM Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM; tidak ada target triwulan I, evaluasi tahunan,
    c) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM; tidak ada target triwulan I, evaluasi tahunan,
    d) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM; tidak ada target triwulan I, evaluasi tahunan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi kemudian dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Dari 19 Indikator Kinerja yang bisa dihitung capaian kinerjanya di atas, 9 (sembilan) Indikator Kinerja memperoleh kategori capaian Sangat Baik, 8 (delapan) Indikator Kinerja memperoleh kategori Baik, dan masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja memperoleh kategori Cukup dan Kurang.

Indikator yang capaian kinerjanya masuk kategori Kurang adalah Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, hal ini disebabkan karena adanya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai dampak efisiensi anggaran dan usulan perubahan target volume output.

Tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru meraih Predikat AKIP "A" dengan faktor koreksinya adalah 0, sehingga tidak ada perubahan terhadap capaian kinerja yang diperoleh baik yang mengalami normalisasi maupun tidak.

Berdasarkan perhitungan terhadap Capaian Kinerja dari indikator tersebut di atas, pada triwulan I tahun 2026, Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 94,84 dengan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) "**Baik**".

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2026 berdasarkan DIPA tahun 2026 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2025 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp21.267.371.000,-

Selama periode triwulan I tahun 2026, Balai Besar POM di Banjarbaru mengadakan 5 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang terdiri dari revisi kewenangan KPA, Kanwil DJPB, DJPB dan DJA, yang disebabkan oleh adanya Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 pagu menjadi Rp19.135.148.000,00 dengan Blokir Rp341.005.000,00 sehingga Pagu Efektif sebesar Rp18.794.143.000,00

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru pada triwulan I 2026 adalah Rp3.163.266.233,00 atau 16,83% terhadap DIPA Revisi.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Gerakan Penanaman Sejuta Pohon

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke-25, telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor guna membahas dukungan terhadap Gerakan Penanaman Sejuta Pohon. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Balai Besar POM di Banjarbaru dalam mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan melalui aksi nyata penanaman pohon secara terencana dan berkelanjutan (26 Januari 2026)

Kegiatan Vaksinasi HPV sebagai Upaya Pencegahan Kanker Serviks

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan kegiatan Vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) sebagai upaya pencegahan kanker serviks (29 Januari 2026)

Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota SAKA POM Angkatan I Tahun 2026

Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota SAKA POM Angkatan I Tahun 2026, yang bertujuan untuk memperkenalkan Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) kepada anggota, sekaligus memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, dan ruang lingkup kegiatan SAKA POM dalam mendukung pengawasan obat dan makanan berbasis peran serta masyarakat. (8 Februari 2026)

Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Program Kerja Tahun 2026

SAKA POM Kwartir Cabang Kota Banjarmasin melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan rencana program kerja tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pembinaan anggota, serta menyusun strategi kegiatan edukasi pengawasan obat dan makanan bagi generasi muda (14 Februari 2026)

Intensifikasi Pengawasan Pangan pada Pasar Wadai Ramadan dalam Banjarbaru Ramadan Festival 2026

Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan pada Pasar Wadai Ramadan yang menjadi bagian dari Banjarbaru Ramadan Festival 2026, di Lapangan Dr. Murdjani. Kegiatan ini bertujuan melindungi konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman dan layak konsumsi selama bulan Ramadan (20 Februari 2026)

Pelaksanaan Patroli Siber, BBPOM di Banjarbaru Bersama POLDA KalSel Sita 316 Juta Jamu BKO di Kabupaten Banjar

Balai Besar POM di Banjarbaru berhasil mengungkap peredaran Jamu BKO yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan menyita produk obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat (jamu BKO) senilai Rp 316 juta (Maret 2026)

KIE Stunting dan Keamanan Pangan BBPOM Banjarbaru bersama Komisi IX DPR RI dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting serta penerapan keamanan pangan, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Stunting dan Keamanan Pangan dilaksanakan bersama Komisi IX DPR RI sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat (8 Maret 2026)

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Highlight Kinerja ix

Daftar Isi xiii

Daftar Lampiran xiv

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Isu Strategis 4

Bab II
Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 16
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 29
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... 39
2.5 Metode Pengukuran 39

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 50
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 163
3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja 189
3.4. Realisasi Anggaran 189

Bab IV
Penutup

Penutup 200

Lampiran ..... .202

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026

Lampiran 2. Perjanjian Kinerj(PK) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Simetris

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Banjarbaru berkedudukan di provinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu :

1) Kota Banjarmasin,
2) Kota Banjarbaru,
3) Kabupaten Banjar,
4) Kabupaten Tanah Laut,
5) Kabupaten Barito Kuala,
6) Kabupaten Tapin, dan
7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

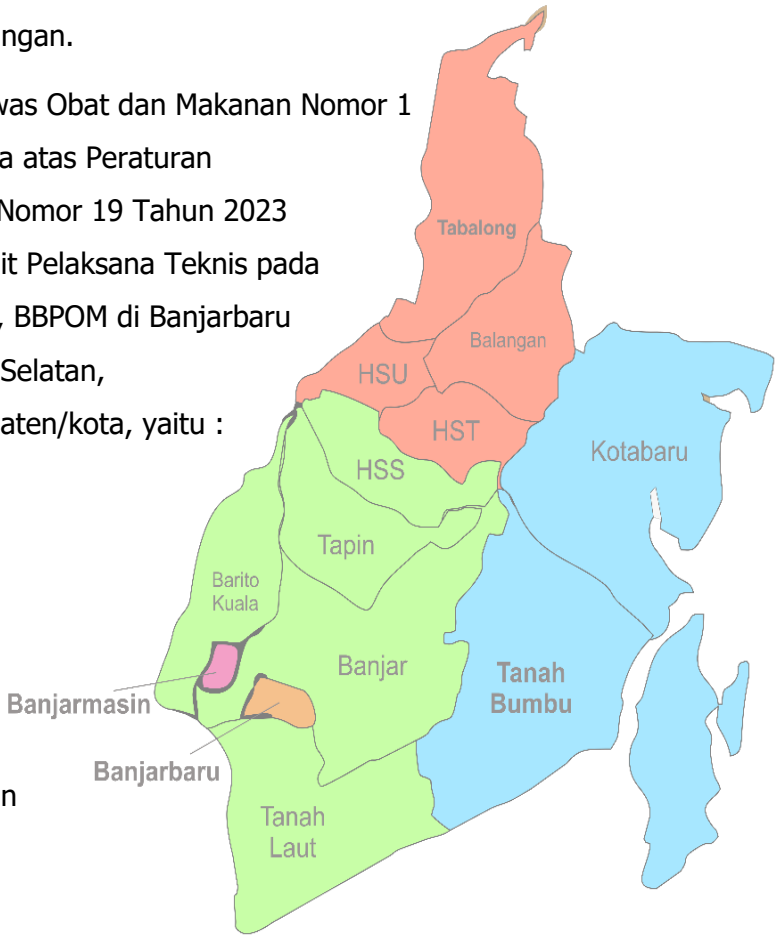

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Banjarbaru sebagai UPT BPOM dengan klasifikasi UPT Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Banjarbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BBPOM di Banjarbaru sebagai UPT Badan POM, juga mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market)* mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi BBPOM tahun 2026 :

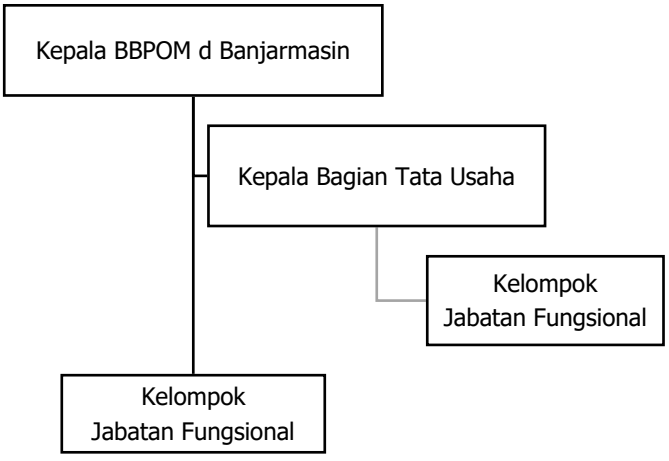

Gambar Struktur Organisasi BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026

Susunan BBPOM terdiri atas :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha;
   - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

- Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
  c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
  e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
  f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
  g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
  h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Produk Obat dan Makanan tidak hanya merupakan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki potensi

risiko terhadap kesehatan dan keselamatan apabila tidak dikelola, digunakan, atau didistribusikan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang optimal sesuai dengan prinsip *Good Regulatory Practices* guna menjamin mutu, keamanan, serta khasiat atau manfaat produk yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, BBPOM di Banjarbaru perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap produk, serta kepentingan strategis lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kapasitas BBPOM di Banjarbaru sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus diperkuat melalui penataan kelembagaan dan penguatan dukungan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Upaya ini diperlukan agar pencapaian kinerja di masa mendatang dapat lebih optimal, serta mampu menjamin pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien dalam memastikan aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk.

Meskipun cakupan wilayah kerja BBPOM di Banjarbaru mulai tahun 2024 mengalami pengurangan, tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang signifikan, baik di Kota Banjarbaru maupun wilayah sekitarnya. Peningkatan pembangunan infrastruktur serta aktivitas ekonomi diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, BBPOM di Banjarbaru perlu melakukan identifikasi serta langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai potensi permasalahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal. Berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi kinerja antara lain sebagai berikut:

1) Ketersediaan data sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bersumber dari sistem OSS belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM sektor ritel, dalam melakukan pengurusan perizinan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kondisi tersebut berimplikasi pada keterbatasan validitas data sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, sehingga

berpotensi menimbulkan celah dalam pengendalian peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2) Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I-2026 sebesar 5,12 persen (naik dibanding tahun 2025 sebesar 4,92 persen). Sedangkan secara spesifik laju pertumbuhan ekonomi industri pengolahan pada klasifikasi makanan dan minuman yaitu sebesar 6,48 persen dan laju pertumbuhan ekonomi industri pengolahan bahan kimia dan barang dari bahan kimia, dan farmasi, produk obat kimia dan Obat Tradisional sebesar 7,82 persen (lebih besar dibanding industri pengolahan karet, kertas, kayu dan barang galian bukan logam). Hal ini tentunya menunjukkan adanya pertumbuhan cepat usaha di bidang pangan olahan, obat, kosmetik maupun obat tradisional pada tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan menambah sasaran pengawasan BBPOM di Banjarbaru.

3) Pada Maret 2026, tercatat jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 172,72 ribu jiwa. Dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan menurun menjadi sebanyak 164,12 ribu jiwa. Upaya pengentasan kemiskinan ini terus dilakukan pada tahun 2026 dengan ekspektasi terdapat penurunan kembali jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan SKPD daerah maupun pemerintah pusat berkedudukan di Provinsi Kalimatan Selatan, termasuk BBPOM di Banjarbaru. Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu dengan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pendampingan mutu dan keamanan produk yang menjadi salah satu nilai penting dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan terhadap UMKM. Bertumbuhnya UMKM Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pesatnya pertumbuhan UMKM, maka banyak masyarakat miskin yang ikut dalam perkembangan UMKM Obat dan Makanan. Namun ternyata, penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2026 berkorelasi negatif dengan jumlah perusahaan klasifikasi industri makanan dan minuman (penurunan dari 30.619 industri menjadi 31.066) (Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2025 dan 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pelaku usaha, melainkan lebih

ditentukan oleh kualitas dan keberlanjutan perkembangan usaha itu sendiri. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga mampu berkembang secara ekonomi, ditandai dengan peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, akses pasar, serta daya saing yang berkelanjutan

4) BBPOM di Banjarbaru belum memiliki sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi untuk mendeteksi secara cepat potensi KLB obat dan makanan, seperti kasus keracunan pangan, peredaran obat ilegal, atau temuan produk berisiko. Respons kedaruratan masih bersifat reaktif, bergantung pada laporan manual dari masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, maupun temuan pengawasan rutin, sehingga penanganan awal terhadap potensi risiko sering memerlukan waktu lebih lama. Dalam konteks farmakovigilans di Kalimantan Selatan, pelaporan e- MESO dari fasilitas kesehatan masih sangat rendah, sehingga sinyal kejadian efek samping obat sulit terdeteksi secara dini. Pada tahun 2026, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi urutan ke-10 dalam jumlah KTD/ESO yang dilaporkan. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan KTD/ESO masih jauh dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Sepanjang tahun 2019 hingga 2026, pelaporan KTD/ESO di Kalimantan Selatan hanya menyumbang 2,85% dari jumlah laporan KTD/ESO di tahun 2026. Rendahnya jumlah laporan ini menyebabkan data farmakovigilans belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar analisis risiko dalam pengawasan post-market

5) Maraknya Misinformasi dan Disinformasi Terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perkembangan media online dan media sosial yang sangat cepat memperkuat arus informasi yang tidak terkendali, termasuk meningkatnya penyebaran hoaks terkait obat, makanan, vaksin, zat berbahaya, serta isu-isu yang langsung menyeret nama BPOM. Konten provokatif seperti klaim palsu efek samping vaksin, informasi menyesatkan tentang bahan tambahan pangan, atau kabar bohong mengenai temuan produk berbahaya sering beredar tanpa proses verifikasi, terutama karena kemudahan akses smartphone dan budaya *share before check* di masyarakat. Fenomena penyebaran hoaks ini menjadi isu strategis bagi BBPOM di Banjarbaru karena berpotensi menurunkan kepercayaan

6) Perkembangan pesat teknologi—khususnya bioteknologi, rekayasa genetik, dan nanoteknologi—memunculkan generasi baru produk obat, pangan, kosmetik, dan

suplemen yang memiliki mekanisme kerja dan komponen yang belum tercakup dalam regulasi maupun metode uji konvensional. Situasi ini menjadi ancaman langsung bagi BPOM, termasuk BBPOM di Banjarbaru, karena produk inovatif sering kali hadir lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan laboratoris untuk menilai keamanan serta mutunya.

Tantangan ini menuntut kapasitas pengawasan yang jauh lebih maju: upgrade metode uji laboratorium, peningkatan peralatan berteknologi tinggi, serta penguatan literasi ilmiah SDM agar tidak tertinggal oleh inovasi industri. Tanpa peningkatan kompetensi dan metode uji yang mengikuti perkembangan ilmiah, terdapat risiko bahwa produk berbasis bioteknologi atau nano akan masuk ke pasar tanpa penilaian risiko yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian keamanan bagi masyarakat.

Selain itu, lambatnya adaptasi pengawasan dapat menurunkan kepercayaan publik, mempersulit penegakan kepatuhan industri, serta memperbesar risiko "regulatory lag"—di mana regulasi dan kemampuan laboratorium tertinggal dibanding inovasi industri. Jika tidak diantisipasi, disrupsi teknologi ini dapat melemahkan efektivitas Balai dalam menjamin keamanan produk dan dalam jangka panjang dapat mengurangi kredibilitas BPOM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan.

7) Krisis kesehatan global maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) — seperti pandemi, wabah pangan, atau peningkatan kasus keracunan — menjadi ancaman serius bagi BBPOM di Banjarbaru karena memicu lonjakan kebutuhan pengujian laboratorium, intensitas pengawasan, serta klarifikasi informasi dalam waktu singkat. Permintaan yang tiba-tiba terhadap pemeriksaan obat, pangan, alat kesehatan, hingga sampel epidemiologis dapat menyebabkan overload kapasitas laboratorium dan memperpanjang waktu respons jika tidak dikelola dengan baik. Di saat yang sama, situasi darurat biasanya meningkatkan risiko peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi mutu, serta ketidakstabilan rantai pasok obat dan pangan. Kondisi ini menuntut Balai untuk melakukan respons cepat, termasuk inspeksi mendadak, penindakan, pemantauan pasar, dan edukasi publik — sementara SDM, sarana laboratorium, serta logistik di daerah tetap terbatas. Dengan tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BNPB, Polri, dan pusat), BBPOM di Banjarbaru menghadapi ancaman nyata berupa beban kerja yang meningkat drastis, potensi penurunan ketepatan pengujian dan pengawasan, serta

meningkatnya risiko turunnya kepercayaan publik jika respons dianggap lambat. Tantangan ini menjadikan penguatan kapasitas respons darurat sebagai keharusan strategis bagi Balai di masa mendatang.

8) Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen di era Society 5.0 mendorong pergeseran signifikan dari transaksi konvensional menuju jual beli digital. Namun, kemudahan ini diikuti oleh meningkatnya risiko peredaran obat, kosmetik, dan pangan ilegal melalui platform e-commerce dan media sosial. Sistem user generated content memungkinkan siapa pun membuat akun dan menawarkan produk tanpa verifikasi memadai, sehingga membuka ruang bagi produk palsu, kedaluwarsa, mengandung bahan berbahaya, atau tidak memiliki izin edar untuk beredar luas dan cepat. Bagi BBPOM di Banjarbaru, fenomena ini menjadi ancaman strategis karena beban pengawasan bergeser dari fisik ke digital, membutuhkan kemampuan baru seperti pemantauan siber, deteksi jejak digital, dan kapasitas cyber forensics untuk mengidentifikasi pelaku dan memetakan rantai distribusi produk ilegal. Pengawasan digital juga menuntut sinergi erat dengan Kominfo, Kepolisian, Bea Cukai, serta platform e-commerce agar konten berbahaya dapat segera diturunkan dan tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Jika kapasitas pengawasan digital tidak diperkuat, risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan produk, meningkatnya paparan masyarakat terhadap produk berbahaya, serta bertambahnya beban klarifikasi isu viral akan semakin tinggi—menjadikannya ancaman nyata bagi efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

9) Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarbaru dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling. Selain itu, kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika

Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternatif termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarbaru dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina. Risiko meningkatnya produk yang tidak memenuhi persyaratan label (NKV, gizi, bahasa Indonesia) sehingga membingungkan konsumen dan melemahkan perlindungan masyarakat. Selain itu, melonjaknya preferensi konsumen terhadap produk murah impor berdampak pada turunnya daya saing UMKM lokal, yang pada akhirnya menambah tantangan bagi BPOM dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha lokal. Jika tidak ditangani, kombinasi tingginya arus masuk produk impor, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan persaingan yang tidak seimbang ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

11) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarbaru dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
12) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarbaru diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarbaru terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
13) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsatran di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya

pengotor/ impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarbaru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 80,0%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak mencukupi jika pengadaan dilakukan sekaligus sehingga pengadaan peralatan laboratorium dilaksanakan secara bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarbaru beserta dua UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan . Pemenuhan peralatan laboratorium terus dilakukan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan jumlah untuk beberapa alat laboratorium utama seperti KCKT, AAS, alat uji disolusi dan TLC system.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Banjarbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan BBPOM di Banjarbaru per Maret 2026 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) Aparatur Sipil Negara yang terdiri PNS/CPNS 64 (enam puluh empat) dan PPPK 23 (dua puluh tiga) dengan proporsi 69 % perempuan dan 31 % laki-laki.

Berikut profil pegawai BBPOM di Banjarbaru tahun 2026 berdasarkan tingkat pendidikan:

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM *
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	Bagian TU	-	**1**	**1**	**10**	**5**	**1**	-	-	18	-
2	Tim Kerja Pengujian	-	**2**	**8**	**21**	**7**	-	-	-	38	**31**
3	Tim Kerja Pemeriksaan	-	**1**	**4**	**5**	**2**	**2**	-	-	14	**11**
4	Tim Kerja Penindakan	-	**1**	**3**	**5**		-	-	-	9	**8**
5	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi	-	**3**	**1**	**2**	**2**	-	-	-	8	-
	Total	**0**	**8**	**17**	**43**	**16**	**3**	**0**	**0**	**87**	**57**

Grafik Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

3) Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarbaru tahun 2026 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432881/2026 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp.21.267.371.000,- dengan komposisi sesuai jenis belanja sebagai berikut :

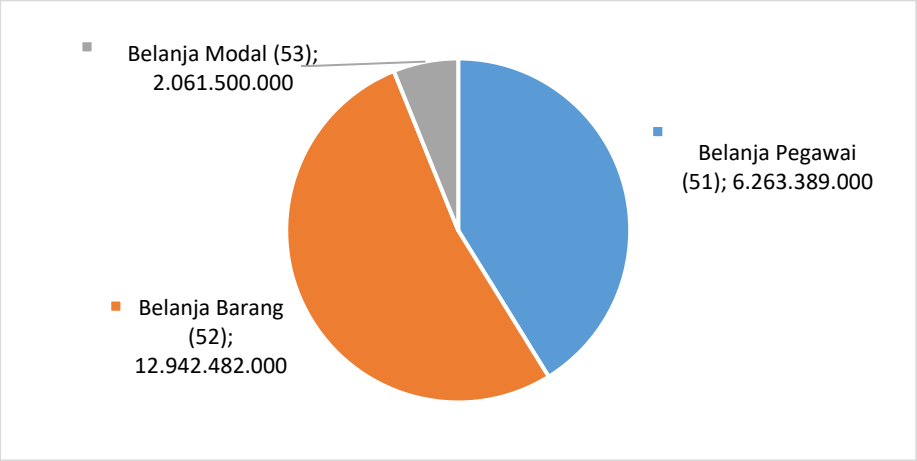

Grafik DIPA **BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026 - Awal**

Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026, anggaran BBPOM di Banjarbaru mengalami beberapa kali revisi, diantaranya disebabkan adanya efisiensi, maka pada akhir tahun 2026, pagu anggaran menjadi Rp. 19.135.148.000,- dengan komposisi sebagai berikut :

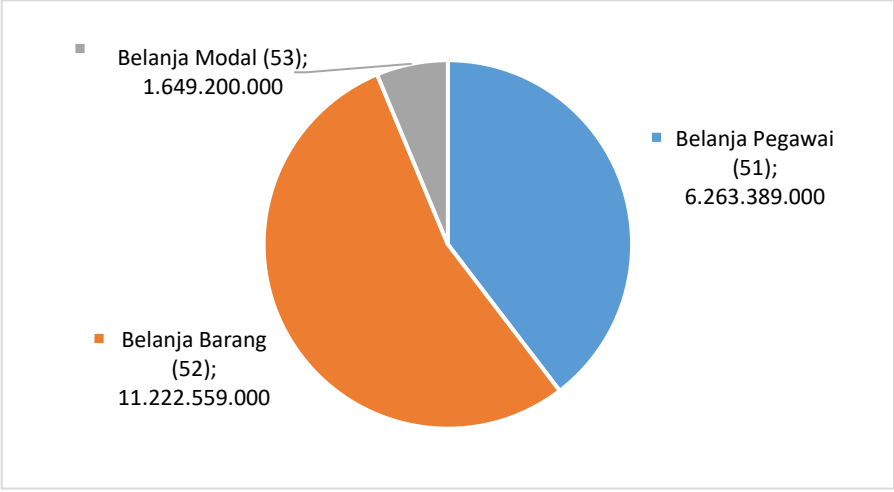

Grafik DIPA BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026 – Triwulan I

1.6. Lingkungan Eksternal

1) Data Umum Wilayah Kerja

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 4 jam, dengan waktu terlama 9 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2025 berjumlah 4.372.100 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
Wilayah Kerja BBPOM di Banjarbaru		*Wilayah Kerja Balai POM di Kab. Tabalong*	
BANJARMASIN	672.670	HULU SUNGAI TENGAH	273.670
BANJARBARU	284.080	HULU SUNGAI UTARA	242.090
BANJAR	618.480	TABALONG	273.600
TANAH LAUT	372.720	BALANGAN	142.030
BARITO KUALA	340.260	*Wilayah Kerja Balai POM di Kab. Tanah Bumbu*	
TAPIN	203.480	TANAH BUMBU	352.070
HULU SUNGAI SELATAN	244.220	KOTABARU	352.740

Tabel Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2) Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarbaru pada tahun 2026 (7 Kabupaten/Kota) berjumlah 9.302 sarana, yang terdiri dari 111 sarana produksi, 2.268 sarana distribusi, 1.421 sarana pelayanan dan 5.522 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	47	1.369	1.416
Pangan MD	96	682	-	778
Kosmetika	13	518	36	567
Obat Bahan Alam	6	512	-	518
Suplemen Kesehatan	-	498	-	498
IRTP	5.522	-	-	5.522
JUMLAH	**5.637**	**2.257**	**1.405**	**9.299**

Tabel Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025–2029, menjadi turunan langsung dari Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja menengah dan tahunan di lingkungan BBPOM di Banjarbaru agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi

BBPOM di Banjarbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang aman, bermutu, dan berdaya saing
dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera
bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:**
   Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:**
   BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:**
   BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4) **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:**
   Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.1.2. Misi

BBPOM di Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM yang disusun dengan memperhatikan 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

Dari Asta Cita Presiden tersebut, BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

   BBPOM di Banjarbaru berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memperkuat penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Misi ini menegaskan pentingnya pengawasan yang komprehensif guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang

beredar di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Banjarbaru mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi industri, komunitas masyarakat, serta sektor swasta melalui program CSR. Pendekatan kolaboratif ini menjadikan pengawasan lebih terpadu, responsif, dan berbasis risiko, sehingga proses pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur. Sinergi seluruh pihak inilah yang menjadi fondasi terciptanya sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, adaptif, dan terpercaya di Kalimantan Selatan.

2) **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BBPOM di Banjarbaru tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dalam memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan berdaya saing. Melalui kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), BBPOM di Banjarbaru aktif mendukung pelaku UMKM dan industri lokal agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan. Pendekatan pembinaan yang komunikatif dan berbasis risiko ini tidak hanya memperkuat kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi antara fungsi pengawasan dan pemberdayaan, BBPOM di Banjarbaru berkontribusi langsung dalam membangun struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, produktif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memegang peran penting dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu, BBPOM di Banjarbaru berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui berbagai program seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pasar Aman, serta edukasi lintas sektor bersama sekolah dan pemerintah daerah, BBPOM di Banjarbaru membangun

kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai mitra pengawasan.

Dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan yang berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis, sehingga pengawasan obat dan makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan.

4) **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai perpanjangan tangan Badan POM di wilayah Kalimantan Selatan, BBPOM di Banjarbaru menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Melalui penerapan sistem kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, BBPOM di Banjarbaru berupaya memastikan setiap layanan publik berjalan efektif dan berintegritas.

Besar POM di Banjarbaru juga terus berinovasi dalam pelayanan publik, baik melalui transformasi digital layanan perizinan dan pengujian, maupun pelayanan tatap muka yang efisien dan berstandar tinggi. Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang konsisten berada pada kategori sangat baik. Dengan birokrasi yang bersih, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, BBPOM di Banjarbaru hadir sebagai lembaga pengawasan yang tegas, sekaligus mitra layanan publik yang cepat, tepat, dan terpercaya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen,

dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3) Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
4) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
5) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
6) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan

kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

BBPOM di Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM, yang secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut.:

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai BBPOM di Banjarbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan BBPOM di Banjarbaru akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.

Sasaran Kegiatan 4 :

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar.

Sasaran Kegiatan 5 :

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.

Sasaran Kegiatan 6 :

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat.

Sasaran Kegiatan 7 :

Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi.

Sasaran Kegiatan 8 :

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional.

2.1.5. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditentukan, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Sasaran Kegiatan, disertai dengan Manual (Definisi Operasional) dan targetnya masing-masing, sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94,25
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	91,5	91,8	92	92,3
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50	96,63	97,50	98,38	99,25
		1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,6	91,8	93,2	94,6	96
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,5	75,5	79,2	80,9	82,4
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71	71	86	86	86
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	88,06	88,94	89,81	90,68
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	17	20	23	27
		3	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,22	34,23	54,05	74,77	97,30
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95,5	96	96,5	97
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
9	Terwujudnya tata kelola	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,64	92,85	93	93,2	93,4

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	3	Nilai AKIP UPT BPOM	82,03	82,18	82,28	82,3	82,33
		5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,95	3	3,05	3,1

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), yang merupakan penjabaran sasaran danprogram yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaranstrategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Renstra/Reviu Renstra/Revisi Renstra dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan pada tahun berjalan.

RKT disusun dan disahkan setelah rancangan Rencana Kerja Pemerintah di tahun n+1 terbit. RKT Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setingkat Eselon I dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja setingkat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV disahkan setelah tanggal pengesahan RKT BPOM. Khusus RKT tahun pertama pelaksanaan Renstra (yang disusun pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra periode sebelumnya) disusun mengacu pada Rancangan Renstra yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Utama terkait Penyusunan RKT tahun n+1.

Rencana Kinerja Tahunan disusun pada tahun n-1 untuk memberikan gambaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan unit kerja dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dan sebagai acuan/basis penyusunan RKA.

Berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarbaru, Nomor : HK.02.02.17A.10.25.232 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2026, Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarbaru tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,5
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63
		1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,8
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	75,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
			UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
3	Meningkatnya efektivitas KIE	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	71
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	88,06
		3	Jumlah desa pangan aman	17
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	7
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	34,23
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95,5
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	91
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	4,75
		3	Nilai AKIP UPT BPOM	92,85
		5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	82,18
		7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	5

Tabel RKT 2026

Dalam RKT tahun 2026, tidak dimasukkan indikator kinerja Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dala Renstra tahun 2025-2029.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk pelaksanaan PK secara terencana perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung.

Penyusunan PK memperhatikan realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n pada Renstra/reviu Renstra/revisi Renstra (realisasi tahun sebelumnya dapat digunakan untuk proyeksi target, namun target indikator tidak diperkenankan di bawah realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n pada Renstra/reviu Renstra/revisi Renstra tanpa adanya justifikasi yang memadai).

Untuk tahun pertama pelaksanaan Renstra, penyusunan PK mengacu pada Rancangan Renstra yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Utama terkait Penyusunan PK tahun n, sedangkan tahun berikutnya hingga akhir periode Renstra, penyusunan PK mengacu pada RKT.

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a) Perubahan ketentuan perundangan-undangan, antara lain perubahan UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perubahan organisasi (reorganisasi)
b) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat (pihak yang bersepakat, baik pihak pertama maupun pihak kedua);
c) Kebijakan atau arahan pimpinan yang berdampak pada:
    1) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
    2) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM, Nomor PR.07.2.02.26.93, tanggal 4 Februari 2026, Hal : Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2026, maka pada tanggal 26 Februari 2026, ditetapkanlah PK BBPOM di Banjarbaru yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.. selaku Pihak Pertama dan Kepala Badan POM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D. selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 memuat target kinerja dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, yang terbagi ke dalam ke dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan.

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak sama dengan target RKT tahun 2026 karena mengalami penyesuaian, dengan ketentuan :

1) Indikator kinerja yang realisasinya di tahun 2025 telah melebihi target PK tahun 2025 atau lebih tinggi dari target RKT 2026, maka target Indikator Kinerja dalam PK tahun 2026, minimal sama atau lebih baik dari realisasi kinerja tahun 2025 tersebut
2) Indikator kinerja yang realisasinya di tahun 2025 tidak mencapai target PK tahun 2025, maka target PK tahun 2026 adalah minimal sama dengan target RKT tahun 2026.

Berikut adalah target indikator kinerja dalam PK tahun 2026, yang ditetapkan berdasarkan kertas kerja perhitungan target berdasarkan *baseline* realisasi tahun 2025 :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.2
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28.89
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.81
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.02
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98.64
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.38
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.73
		1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.08
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.91
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71.43
3	Meningkatnya efektivitas KIE	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.03
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		3	Jumlah desa pangan aman	4
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	34.32
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	93.83
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.78
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.85
		3	Nilai AKIP UPT BPOM	82.18

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
		5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

Apabila disandingkan antara target RKT tahun 2026, Target Renstra tahun 2026 dengan realisasi kinerja tahun 2025 dan target PK tahun 2025 tergambar sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		RKT 2026	REN STRA	REALISASI 2025	PK 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	96,2	96.2
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	27	28,89	28.89
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	99,81	99.81
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	99,02	99.02
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,5	91,5	98,64	98.64
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		RKT 2026	REN STRA	REALISASI 2025	PK 2026
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	96,38	96.38
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63	96,63	98,73	98.73
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	97,08	97.08
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,8	91,8	99,91	99.91
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	92	92	91,7	92
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	106,18	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,5	75,5	72,4	75.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57	28,57	14,29	28.57
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	71,43	71.43

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		RKT 2026	REN STRA	REALISASI 2025	PK 2026
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,06	88,06	91,03	91.03
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17	17	12	12
		3	Jumlah desa pangan aman	7	7	4	4
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	34,23	34,23	16,38	34.32
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,5	95,5	100	100
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	91	93,83	93.83
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	4,75	4,77	4.78
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,85	92,85	90,07	92.85
		3	Nilai AKIP UPT BPOM	82,18	82,18	80,82	82.18
		5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5
		7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4	3,4	2,844	2,95

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Selain menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026, juga disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026, yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja tersebut, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing. RAPK BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini.

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM, nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengukuran Kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dan disahkan. Beberapa prinsip pengukuran kinerja yaitu:

1) Menggunakan indikator kinerja yang terukur: indikator kinerja, baik untuk program maupun kegiatan, harus ditetapkan secara spesifik dan terukur untuk menilai keberhasilan secara objektif.
2) Memperhatikan akuntabilitas kinerja: pengukuran kinerja menjadi bagian dari SAKIP untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3) Dasar untuk perbaikan kinerja: hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk merencanakan dan melakukan perbaikan pada tahuntahun berikutnya.
4) Menjadi alat pengambilan keputusan: data dan informasi dari hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan kebijakan lainnya.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1) Membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;

2) Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran dan tahunan) sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

1) Terdapat Perjanjian Kinerja;
2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja,meliputi:
   a) Nama Indikator Kinerja;
   b) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
   c) Satuan Pengukuran;
   d) Metode cascading;
   e) Penanggung Jawab Data;
   f) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);
   g) Definisi Indikator Kinerja;
   h) Sumber data, termasuk didalamnya proses memperoleh data, misalnya diunduh langsung dari aplikasi atau direkap secara manual, dilakukan cleansing data atau tidak, dll;
   i) Formula/cara perhitungan;
   j) Frekuensi Pengukuran.
5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/Standar Operasional Prosedur.
6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
7) Sumber data yang valid dan mudah telusur.
8) Dukungan sistem informasi.

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

1) Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
2) Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi

internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terjadi kesalahan penggunaan data, cara perhitungan dan hasil capaian kinerja maka penanggung jawab data mengembalikan data kepada pemilik data.

3) Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
4) Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja dari setiap sasaran kegiatan berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing, dengan rumus

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X 100\%}$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategoril	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	

Kategoril	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Kurang	< 60%	

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja.

   Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

   a) periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan).
   b) apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.
3) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e-Performance. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final berdasarkan hasil rapat evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, sehingga telah dipastikan tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
4) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

   a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   b) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
5) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan

kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS menu e-Performance. Verifikasi dilakukan per triwulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaporan kinerja. Jika berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran kinerja dan dokumen pendukung, hasil pengukuran kinerja akan dikembalikan kepada Penanggung Jawab Data pada Satuan Kerja/Unit Kerja melalui aplikasi SIMETRIS untuk dilakukan perbaikan dan dikirimkan kembali sebelum batas waktu verifikasi berakhir.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja Interim, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

KATEGORI	PENJELASAN	NOTIFIKASI WARNA
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70).	

5. Nilai Kinerja Organisasi dan Predikat Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dan dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 3 Capaian Indikator Kinerja, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

a) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
b) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi, dimana untuk UPT Badan POM menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISAI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan

nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata)Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu :

PREDIKAT NKO	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

6. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ x\ 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila TE<0 atau TE>1

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE=IE-SE$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	15% (tidak efisien)

2.6. Penanggung Jawab

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala BBPOM di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.01.26.21 Tahun 2026 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) BBPOM di Banjarbaru Tahun Anggaran 2026, ditetapkanlah penanggung jawab data sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA
-	Penanggung Jawab	Kepala BBPOM di Banjabaru
-	Ketua	Halida Endraswati, SF., Apt
-	Anggota :	
1	PJ Data/PIC Monev	Fitria Sauli Abadi, SE
2	PJ Data IK Persentase Sediaan Farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Ary Yustantiningasih, S.Si.,Apt 2. Anna Y. Simangunsong, S.Farm., Apt 3. Rivai Endra Dwi Yulianto, S.Farm.,Apt.,M.Pharm 4. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt 5. Dewi Rahmawati, S.Si
3	PJ Data IK Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt
4	PJ Data IK Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt 2. Farhanah, S.Far., Apt 3. Dewi Rahmawati, S.Si
5	PJ Data IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1. Farhanah, S.Far.,Apt 2. Dewi Rahmawati, S.Si
6	PJ Data IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt 2. Farhanah, S.Far., Apt
7	PJ Data IK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	1. Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt 2. Anna Y. Simangunsong, S.Farm., Apt 3. Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt

NO	JABATAN	NAMA
8	PJ Data IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Anna Y. Simangunsong, S.Farm., Apt
9	PJ Data IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt
10	PJ Data IK Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Ary Yustantininigsih, S.Si., Apt 2. Anna Y. Simangunsong, S.Farm., Apt
11	PJ Data IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt
12	PJ Data IK Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt 2. Anna Y. Simangunsong, S.Farm., Apt 3. Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt
13	PJ Data IK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt
14	PJ Data IK Persentase Pemenuhan target AMR di wilayah UPT	Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt
15	PJ Data IK Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt
16	PJ Data IK Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
17	PJ Data IK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt

NO	JABATAN	NAMA
18	PJ Data IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
19	PJ Data IK Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
20	PJ Data IK Jumlah desa pangan aman	Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
21	PJ Data IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
22	PJ Data IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Leny Syanjaya, S.Farm., Apt
23	PJ Data IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt
24	PJ Data IK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt
25	PJ Data IK Indeks Pelayanan Publik UPT	1. Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt 2. Leny Syanjaya, S.Farm., Apt
26	PJ Data IK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	1. Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt 2. Halida Endraswati, S.F.,Apt 3. Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt 4. Leny Syanjaya, S.Farm., Apt 5. Muhammad Fikry Ramadhan, SE 6. Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
27	PJ Data IK Nilai AKIP UPT BPOM	Halida Endraswati, S.F., Apt
28	PJ Data IK Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Halida Endraswati, S.F., Apt
29	PJ Data IK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1. Halida Endraswati, S.F., Apt 2. Farhanah, S.Far., Apt

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi instansi, yang diukur berdasarkan realisasi target yang diperjanjikan (PK) dan rencana aksi. Ini menjadi dasar utama dalam menentukan predikat kinerja unit dan penilaian kinerja pegawai ASN.

Capaian Kinerja Organisasi atau disebut juga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dan dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Badan POM nomor PI.04.71.7.01.26.53 tanggal 27 Januari 2026, hal Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, BBPOM di Banjarbaru memperoleh nilai Evaluasi AKIP tahun 2025 sebesar 80,82 dengan kategori A (Memuaskan), maka koreksi capaian Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarbaru adalah 0%, sehingga diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 94,84 dengan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) **Baik**, dengan perincian perhitungan sebagaimana matriks berikut :

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,2	99,88	**103,83**	103,83	0%	103,83
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	**-**	-	0%	-
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,81	100	**100,19**	100,19	0%	100,19

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	**100,00**	100,00	0%	100,00
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,02	100	**100,99**	100,99	0%	100,99
1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,64	83,33	**84,48**	84,48	0%	84,48
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	**100,00**	100,00	0%	100,00
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,38	95,24	**98,82**	98,82	0%	98,82
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,73	99,44	**100,72**	100,72	0%	100,72
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,08	100	**103,01**	103,01	0%	103,01
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,91	98,67	**98,76**	98,76	0%	98,76
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	92	100	**108,70**	108,70	0%	108,70

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	0%	-
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,5	74,3	**101,09**	101,09	0%	101,09
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	0%	-
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	0%	-
3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	0	**0,00**	-	0%	-
3.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	91,03	91,39	**100,40**	100,40	0%	100,40
3.3	Jumlah desa pangan aman	7	7	**100,00**	100,00	0%	100,00
3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	14	14	**100,00**	100,00	0%	100,00
4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7	7	**100,00**	100,00	0%	100,00
5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	15,15	**101,00**	101,00	0%	101,00

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	3	-	-	0%	-
7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	50	50	**100,00**	100,00	0%	100,00
8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	0%	-
8.3	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	0%	-
8.5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	0%	-
8.7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	0%	-
Total Capaian PK							**1.801,97**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							**98,84**
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)							**Baik**

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan dan penjelasan dalam menganalisa capaian kinerja, yaitu :

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan;
b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya;
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berikut analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja BBPOM di Banjarbaru pada triwulan I tahun 2026 :

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKSK 1.1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
99,88	96,2	103,82%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 103,82% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

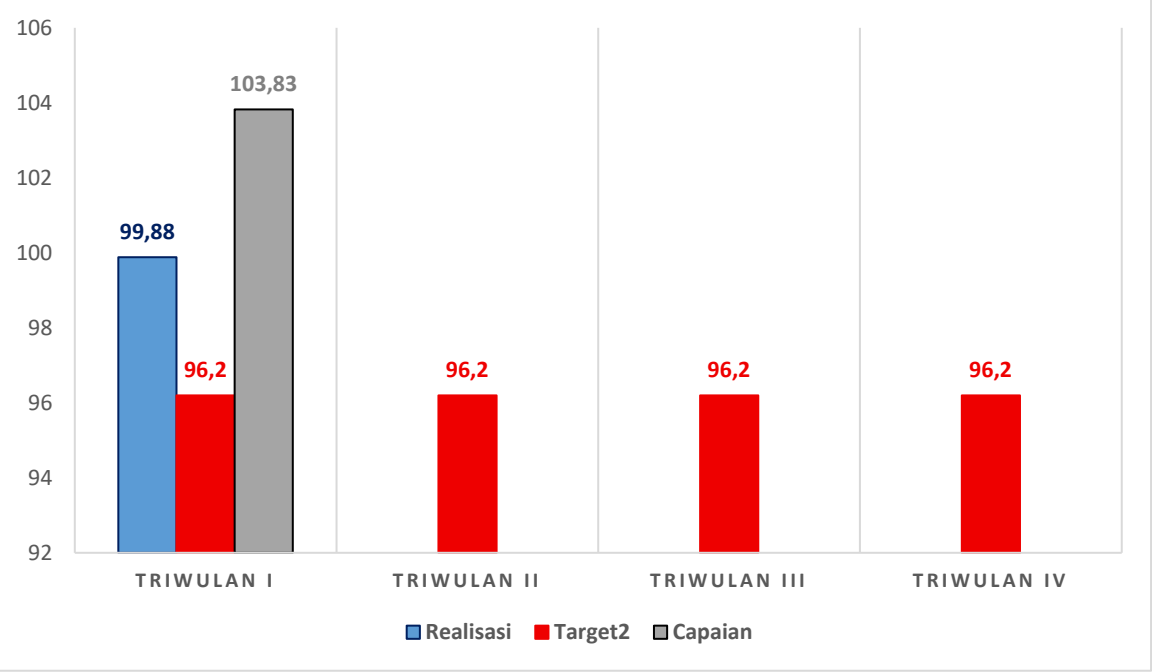

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
99,88	96,2	103,82%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 103,82% di triwulan I, maka masih terdapat kemungkinan tercapainya target tahunan di akhir triwulan IV atau bahkan dapat melampauinya.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026 jumlah target Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 1.076 sampel, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komoditi	Target Tahun 2026	Triwulan I tahun 2026			
			Parsial		Akumulasi	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Obat	311	44	44	44	44
2	Obat Bahan Alam	229	57	57	57	57
3	Suplemen Kesehatan	60	11	11	11	11
4	Kosmetik	476	95	95	95	95
	Jumlah	**1.072**	**207**	**207**	**207**	**207**

Data di atas menunjukkan realisasi sampel Sediaan Farmasi triwulan I tahun 2026 adalah 207 sampel (19,24%) dari jumlah target sampel Sediaan Farmasi tahun 2026 sebesar 1.076 sampel. Pada Triwulan II sampai IV masih diperlukan 869 sampel sediaan farmasi (80,76%) untuk dapat memenuhi target tahun 2026.

Dari hasil capaian triwulan I menunjukkan bahwa realisasi sampel sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dari target 207 sampel Sediaan Farmasi di triwulan I tahun 2026, dapat direalisasikan sebanyak 207 sampel (100%).

Selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026, diperoleh realisasi kinerja sebagai berikut :

1) Obat

No.	Komponen (Bobot)	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
A	Perencanaan Sampling (30%)	Jumlah sampel yang disampling	44	44	100,00	100	30
		Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	44	44	100,00		
		Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	44	44	100,00		
B	Pelaksanaan Sampling (20%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	44	44	100,00	100,00	20
		Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	44	44	100,00		
C	Pelaksanaan Pengujian (20%)	Jumlah sampel yang diuji dgn parameter sesuai ketentuan	42	42	100,00	100,00	20
D	Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	28	28	100,00	100,00	20
		Jumlah sampel yg dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	28	28	100,00		
E	Pelaporan Montoring Penarikan (10%)	Jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan pedoman sampling sampai dgn periode yang dimaksud	1	1	100,00	100,00	10
	Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan						**100**

2) Obat Bahan Alam

No.	Komponen	Subkomponen				Nilai Komp.
		Uraian	Target	Realisasi	%	
A	Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	57	57	100,00	100,00
		Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	40	40	100,00	
B	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	39	40	97,50	97,50
C	Kesesuaian parameter uji	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	40	40	100,00	100,00
D	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah kesimpulan sampel yg diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling	40	40	100,00	100,00
E	Tanggapan atas surat tindak lanjut	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	3	3	100,00	100,00
	Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					**99,50**

3) Suplemen Kesehatan

No.	Komponen	Subkomponen				Nilai Komp.
		Uraian	Target	Realisasi	%	
A	Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	11	11	100,00	100,00
		Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	9	9	100,00	
B	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	9	9	100,00	100,00

No.	Komponen	Subkomponen				Nilai Komp.
		Uraian	Target	Realisasi	%	
C	Kesesuaian parameter uji	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	9	9	100,00	100,00
D	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah kesimpulan sampel yg diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling	9	9	100,00	100,00
E	Tanggapan atas surat tindak lanjut	Jumlah surat yang ditindaklanjuti UPT	3	3	100,00	100,00
	Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					**100,00**

4) Kosmetik

No.	Komponen	Subkomponen				Nilai Komp.
		Uraian	Target	Realisasi	%	
A	Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	95	95	100,00	100,00
		Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	93	93	100,00	
B	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	93	93	100,00	100,00
C	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	93	93	100,00	100,00
D	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah kesimpulan sampel yg diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai ketentuan	93	93	100,00	100,00
E	Tanggapan atas surat tindak lanjut	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	3	3	100,00	100,00
	Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					**100,00**

Kemudian dari realisasi sampel Sediaan Farmasi perkomoditi tersebut, diperoleh Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi
1	Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00
2	Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,50
3	Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00
4	Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**99,88**

Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) di atas, penyebab keberhasilan kinerja adalah tercapainya hampir seluruh target Komponen dan Subkomponen penilaian dari seluruh komoditi. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Banjarbaru dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Timeline pengujian tidak 100% tercapai.	-	-	Desember 2026	Y	S-06	Timeline pengujian tidak tercapai

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase

sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, dengan kegiatan berupa :

1) Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
2) Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 674.181.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 32.703.487,- (4,85%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
99,88%	4,85%	0,05	-0,95	75 % Tidak Efisien

Selain itu pencapaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dan anggaran dari Rincian Output (RO) lain yang tidak ditaggingkan, namun menunjang pencapaian kinerja, seperti :

a) EBA.994. Layanan Perkantoran yaitu Pemeliharaan Alat Laboratorium, pengiriman sampel, pengadaan alat penunjang laboratorium menggunakan akun ektrakomptable;
b) RAB.001. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu Pengadaan Alat Laboratorium
c) PDD.001. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode, Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan, Pengadaan Glassware, Media Mikro, K3, Gas Laboratorium, Kolom, dan Suku Cadang, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Penguji dan Reakreditasi Laboratorium.

IKSK 1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dalam Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans, dengan kegiatan berupa Bimbingan Teknis / KIE Farmakovigilans
- Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 6.620.000,- dimana pada triwulan I tahun 2026 belum ada realisasi sehingga belum dapat dihitung tingkat efisiensinya.

IKSK 1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	99,81	100,20%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100,20% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

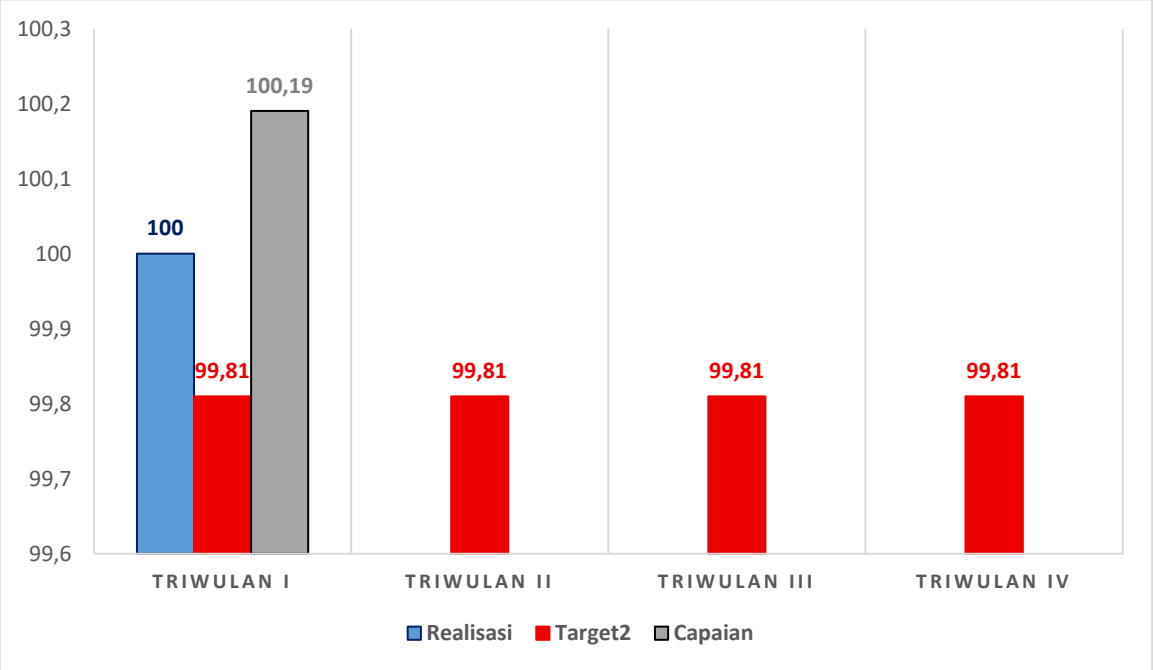

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	99,81	100,20%	Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 100,20 % di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut optimis dapat tercapai dengan upaya mempertahankan kinerja, baik dari segi sampling (renlak atau penyesuaian renlak jika terjadi perubahan target output karena adanya efisiensi) maupun dari segi pengujian (kecermatan penentuan parameter uji, ketersediaan reagen dan peralatan laboratorium, hingga pelaksanaan pengujian sesuai pedoman)

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026, target sampel pangan olahan berisiko ditetapkan sebanyak 466 sampel. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), target triwulan I sebesar 87 sampel atau 18,67% dari target tahunan, telah direalisasikan seluruhnya (100%). Sisa target sebesar 81,33% direncanakan terdistribusi pada periode April hingga November, dengan porsi minimal pada bulan Desember.

Seluruh sampel yang menjadi target triwulan I telah dilaksanakan sesuai ketentuan, baik dari aspek kesesuaian sampling, parameter uji, penarikan kesimpulan, ketepatan waktu, hingga tindak lanjut. Berdasarkan penilaian per komponen, seluruh aspek memperoleh capaian 100%

Dari target 466 sampel Pangan Olahan di triwulan I tahun 2025, dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perkomponen penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
A	Kesesuaian Target Sampel (20%)	Jumlah sampel yg diperiksa sesuai dg Pedoman Sampling	87	87	100	100	20
		Jumlah sampel yg diuji sesuai dgn Pedoman Sampling	93	93	100		
B	Kesesuaian Parameter Uji (20%)	Jumlah sampel yg diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	87	87	100	100	20

No.	Komponen	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
C	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (20%)	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	87	87	100	100	20
D	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (10%)	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	87	87	100	100	10
E	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (10%)	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	87	87	100	100	10
F	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (20%)	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	8	8	100	100	20
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan						**100**

Berdasarkan perhitungan nilai perkomponen tersebut diperoleh Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah 100.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	- Kalibrasi peralatan BBPOM di Banjarbaru oleh BPMSB dan Vendor (Kalibrasi Eksternal).	Maret - Desember 2026	Y	S-05	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier.

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan reagen dengan baik, melakukan monitoring stok baku pembanding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	- Meminta pengisian form di tautan https://bit.ly/Form_Kerusakan_AlatLab untuk mendokumen-tasikan setiap kerusakakan alat di Bidang Pengujian BBPOM di Banjarbaru (Pj Yaumil Hafidza Wardini)	Maret - Desember 2026	Y	S-06	Timeline pengujian tidak tercapai
3	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh terlambatnya pengisian data dari poksi lain/ balai regional di SIPT	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	- Pengisian Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	Maret - Desember 2026	Ya	S-07	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan berupa :

a) Pengadaan sampel makanan
b) Pengujian laboratorium sampel makanan

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 80% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 407.192.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 50.379.272,- (12,37%) sehingga menghasilkan

tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100,20%	12,37%	0.12	-0.88	75 % Tidak Efisien

Selain itu pencapaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dan anggaran dari Rincian Output (RO) lain yang tidak ditaggingkan, namun menunjang pencapaian kinerja, seperti :

- EBA.994. Layanan Perkantoran yaitu Pemeliharaan Alat Laboratorium, pengiriman sampel, pengadaan alat penunjang laboratorium menggunakan akun ekstrakomptable;
- RAB.001. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu Pengadaan Alat Laboratorium
- PDD.001. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode, Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan, Pengadaan Glassware, Media Mikro, K3, Gas Laboratorium, Kolom, dan Suku Cadang, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Penguji dan Reakreditasi Laboratorium.

IKSK 1.4. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	100	100%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

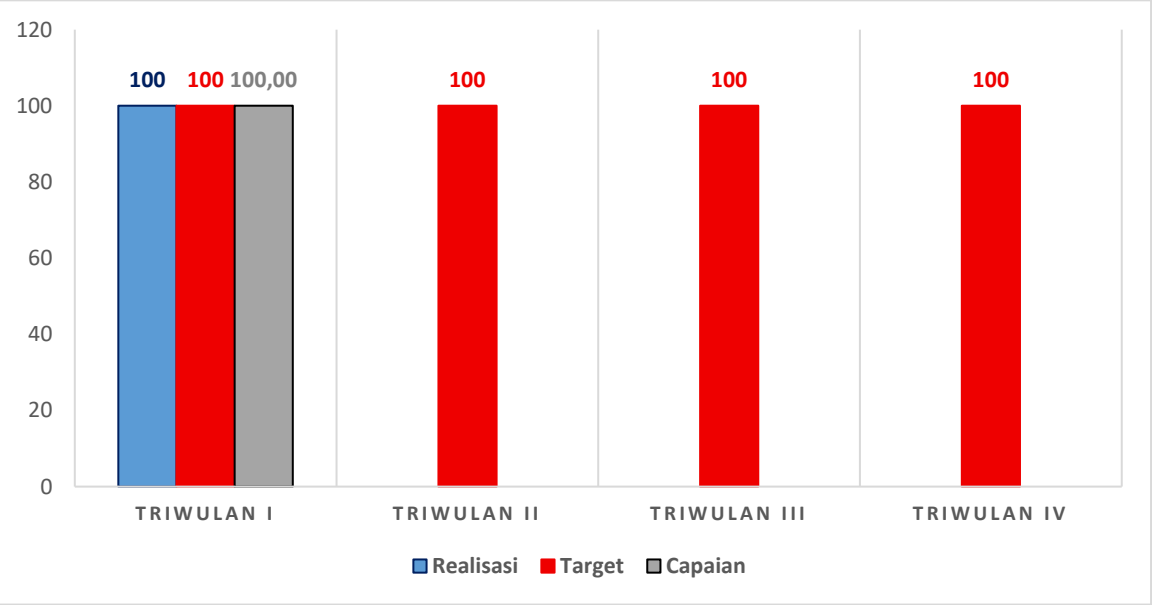

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	100	100%	Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 100 % di triwulan I, maka target tahunan tersebut optimis dapat tercapai dengan upaya mempertahankan kinerja. Strategi yang perlu di arahkan kedepannya berupa peningkatan kualitas tindak lanjut (ketepatan waktu dan dampak kepatuhan), Penguatan sistem monitoring berbasis risiko, dan penyempurnaan perencanaan target agar tetap progresif.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada triwulan I tahun 2026, tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di wilayah kerja BBPOM di Banjarbaru. Namun BBPOM Banjarbaru menerima 10 sampel KLB Keracunan Pangan dari Balai POM di Tabalong pada bulan Februari 2026. Seluruh sampel KLB Keracunan Pangan tersebut telah selesai dilakukan pengujian kimia dan mikrobiologi pada bulan Februari 2026. Berikut adalah table perkomponen penilaian :

No.	Komponen	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
1	Pengujian	A. Kesesuaian parameter uji pangan dgn Laporan KLB Keracunan Pangan (30%)	67	67	100	100	30
		B. Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dgn Pedoman Sampling Pengujian Pangan Olahan BPOM (35%)	1	1	100	100	35
		C. Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP (35%)	6	6	100	100	35
	Nilai Total dari komponen Pengujian						100
2	Sampling	A. Kesesuaian sampel dengan memperhatikan informasi penelusuran/ laporan sementara/ surat pengantar permintaan pengujian (30%)	-	-	-	-	-
		B. Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dgn pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM (35%)	-	-	-	-	-

No.	Komponen	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
		C. Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP (35%)	-	-	-	-	-
	Nilai Total dari komponen Sampling						-
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar							**100**

Untuk sampel KLB KP triwulan I tahun 2026, BBPOM Banjarbaru hanya dinilai dari komponen pengujian, karena kegiatan sampling dilakukan oleh BPOM Tabalong, sehingga bobot sampling tidak masuk dalam perhitungan (dikecualikan).

Realisasi indikator kinerja ini berhasil mencapai target pada triwulan I tahun 2026 yaitu 100 % dengan target 100 %. Capaian ini dipengaruhi faktor-faktor antara lain :

i. Kesiapan dan Kompetensi SDM, sarana dan prasarana

Tim laboratorium memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan, termasuk pemahaman terhadap metode uji yang terstandar dan prosedur penanganan sampel KLB. Koordinasi internal tim berjalan efektif sehingga setiap tahapan pengujian dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan dalam waktu yang ditetapkan. Sarana laboratorium, peralatan, dan bahan uji tersedia dalam kondisi siap pakai. Pengujian dilaksanakan sesuai standar metode yang berlaku dan terdokumentasi dalam sistem manajemen mutu laboratorium sehingga seluruh sampel dapat diuji sesuai standar yang dipersyaratkan.

ii. Respons Cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB)

Mekanisme penanganan sampel KLB telah berjalan efektif, termasuk sistem prioritas pengujian dan koordinasi dengan bidang terkait. Hal ini memastikan seluruh sampel KLB yang diterima dapat segera diproses dan diuji sesuai standar yang berlaku.

iii. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Dilakukan pemantauan rutin terhadap progres pengujian serta evaluasi kinerja tim, sehingga potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti tanpa mempengaruhi pemenuhan standar pengujian.

Secara keseluruhan, capaian 100% ini menunjukkan komitmen BBPOM di Banjarbaru dalam menjaga mutu dan ketepatan pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan indikator ini terdapat risiko strategis teridentifikasi, yakni Keterlambatan penyelesaian pengujian sampel KLB. Namun melalui mitigasi berupa tersedianya SOP penanganan untuk sampel KLB, penyusunan daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB dan tersedianya Tim KLB, risiko tersebut dapat dikendalikan dan tidak berdampak signifikan terhadap capaian indikator.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Lonjakan jumlah sampel KLB secara tiba-tiba	- Adanya SOP penanganan untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Terbentuknya Tim KLB	- Menyusun SOP penanganan untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Membentuk Tim KLB	Setiap bulan februari tahun berjalan (2026)	Y	S-18	Keterlambatan penyelesaian pengujian sampel KLB
2	Keterbatasan media atau reagen untuk parameter KLB	- Adanya SOP penanganan untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Terbentuknya Tim KLB	- Menyusun SOP penanganan untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Membentuk Tim KLB	Setiap bulan februari tahun berjalan (2026)	Y	S-18	Keterlambatan penyelesaian pengujian sampel KLB

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci :

i. Penguatan Koordinasi Lintas Fungsi Pengawasan, Pengujian dan Surveilance.
Kegiatan respons cepat terhadap laporan KLB keracunan pangan berjalan efektif melalui koordinasi lintas fungsi, sehingga sampel dapat segera diterima dan diprioritaskan untuk diuji sesuai standar metode yang berlaku.
Dampak: Sampel dapat disampling, di uji dan dilaporkan tepat waktu

ii. Penguatan Koordinasi Lintas Unit dan Unit Pengampu Pusat
Komunikasi aktif dengan Pemerintah Daerah, Unit Pengampu Pusat (Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) serta UPT lain mempercepat penyampaian dan penyelesaian tindak lanjut terhadap Kejadian Luar Biasa.
Dampak: Mengurangi risiko keterlambatan tindak lanjut akibat hambatan koordinasi lintas wilayah.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan berupa :

a) Pengadaan sampel makanan
b) Pengujian laboratorium sampel makanan

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 5% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 25.449.500,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 3.148.705,- (12,37%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	12,37%	0,12	-0,88	75 % Tidak Efisien

Selain itu pencapaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dan anggaran dari Rincian Output (RO) lain yang tidak ditaggingkan, namun menunjang pencapaian kinerja, seperti :

d) EBA.994. Layanan Perkantoran yaitu Pemeliharaan Alat Laboratorium, pengiriman sampel, pengadaan alat penunjang laboratorium menggunakan akun ekstrakomptable;
e) RAB.001. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu Pengadaan Alat Laboratorium
f) PDD.001. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode, Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan, Pengadaan Glassware, Media Mikro, K3, Gas Laboratorium, Kolom, dan Suku Cadang, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Penguji dan Reakreditasi Laboratorium.

IKSK 1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	99,02	100,99%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100,99% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik** sehingga optimis dapat tercapai dengan upaya mempertahankan kinerja, baik dari segi sampling (renlak atau penyesuaian renlak jika terjadi perubahan target output karena adanya efisiensi) maupun dari segi pengujian (kecermatan penentuan parameter uji, ketersediaan reagen dan peralatan laboratorium, hingga pelaksanaan pengujian sesuai pedoman).

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

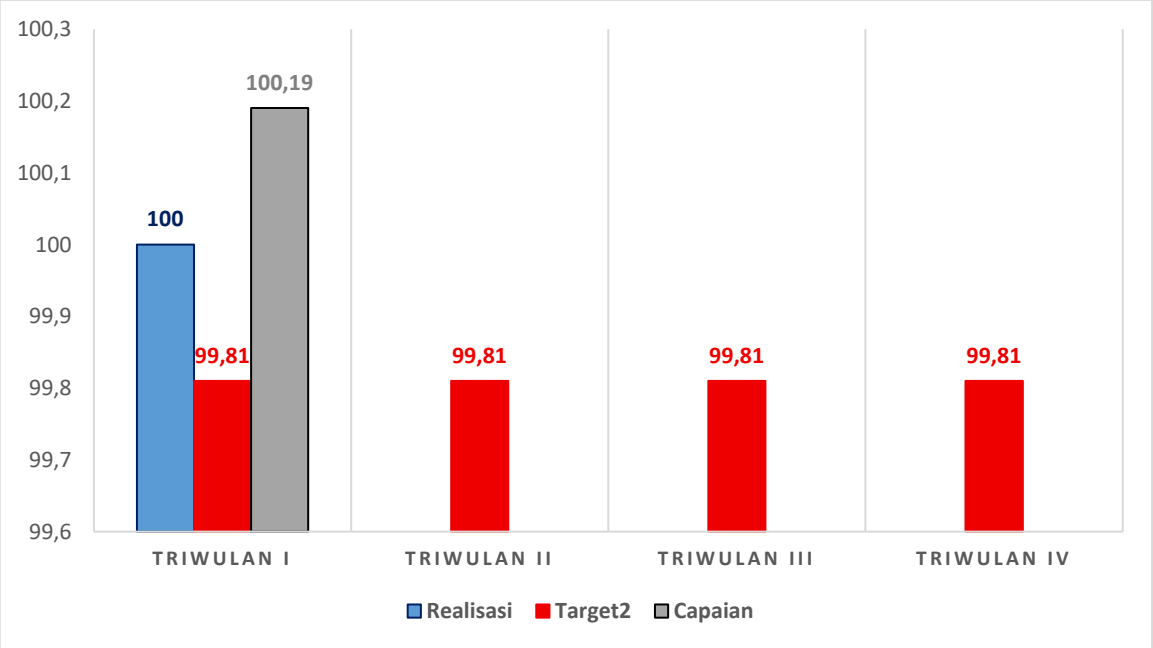

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	99,81	100,20%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 100,20 % di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut optimis dapat tercapai dengan upaya mempertahankan kinerja, baik dari segi sampling (renlak atau penyesuaian renlak jika terjadi perubahan target output karena adanya efisiensi) maupun dari segi pengujian (kecermatan penentuan parameter uji, ketersediaan reagen dan peralatan laboratorium, hingga pelaksanaan pengujian sesuai pedoman)

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2026, disebutkan target sampel PIRT berisiko adalah 42 sampel, berdasarkan Rekalpitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) pada triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

No.	Komoditi	Target Tahun 2025	Triwulan III tahun 2025	
			Target	Realisasi
1	Pangan IRT	42	28	28

Pada triwulan I tahun 2026, target sampel PIRT berisiko ditetapkan sebanyak **42 sampel**, dengan target penyelesaian sampling, pengujian, dan pelaporan direncanakan selesai pada triwulan II. Berdasarkan RHPK, sampai dengan triwulan I telah direalisasikan **28 sampel (66,67%)**, yang seluruhnya telah diperiksa, diuji, disimpulkan , dilaporkan ,dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Namun demikian, masih terdapat **14 sampel (33,33%)** yang belum direalisasikan dan akan diselesaikan pada triwulan II.

Sampel PIRT yang dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perkomponen penilaian sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen	Subkomponen				Komponen	
		Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	Nilai
A	Kesesuaian Target Sampel (20%)	Jumlah sampel yg diperiksa sesuai dg Pedoman Sampling	28	28	100	100,00	20
		Jumlah sampel yg diuji sesuai dgn Pedoman Sampling	29	29	100		
B	Kesesuaian Parameter Uji (20%)	Jumlah sampel yg diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	28	28	100	100	20
C	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (20%)	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	28	28	100	100	20
D	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (10%)	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	28	28	100	100	20
E	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (10%)	Jumlah sampel yan diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	28	28	100	100	20
F	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (20%)	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	7	7	100	100	20
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan						**100**

Berdasarkan penilaian per komponen, seluruh aspek memperoleh nilai **100%**, sehingga capaian indikator pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar **100%**.

Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2026 yang melampaui target pada dasarnya ditopang oleh penguatan tata kelola pelaksanaan yang semakin terintegrasi dan adaptif. Konsistensi monitoring serta pengendalian internal memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kendala, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum berdampak signifikan pada kinerja. Di sisi lain, sinergi yang semakin solid antara fungsi pemeriksaan dan pengujian mempercepat alur proses, mulai dari sampling hingga penetapan tindak lanjut, sehingga tidak terjadi bottleneck yang berarti sehingga proses

tindak lanjut terhadap temuan menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap dinamika sumber daya, baik anggaran (adanya efisiensi anggaran) maupun SDM sehingga mengubah target output, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menunjukkan adanya fleksibilitas operasional yang terjaga. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menghasilkan proses kerja yang lebih responsif, terkoordinasi, dan efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Kesesuaian parameter uji tidak terpenuhi karena hanya dilakukan pengujian parameter wajib dan tidak menambahkan parameter pilihan sehingga sesuai Pedoman Prioritas Sampling.	Koordinasi dengan tim pemeriksaan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan karena Sampai sekarang PS masih belum di sahkan	Dilakukan kaji ulang permintaan uji oleh Ketua Tim; Telaah berting kat dari penguji, penyelia dan ketua tim agar untuk sampel yang hanya memiliki parameter wajib kurang dari 3 agar dapat menambah parameter pilihan agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pedoman Prioritas Sampling	Januari – Juni 2026	Ya	S-07	Ketidaksesuaian parameter uji sesuai dengan PS

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi indikator ini pada tahun 2026 dengan capaian 100,99% didukung oleh konsistensi monitoring dan pengendalian internal, sinergi yang baik antara fungsi

pemeriksaan dan pengujian, serta pendekatan persuasif yang mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sumber daya dengan tetap mengacu pada pedoman yang berlaku, serta ketepatan dalam menindaklanjuti produk yang Tidak Memenuhi Syarat melalui koordinasi aktif dengan unit pengampu dan UPT terkait turut memperkuat capaian tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi, antara lain potensi keterlambatan pengujian akibat beban kerja laboratorium, Ketidaksesuaian parameter uji pada sebagian kecil sampel akibat pemahaman pedoman yang belum merata, beban kerja tinggi, serta keterbatasan reagen/media, resistensi pelaku usaha terhadap hasil uji, ketergantungan pada koordinasi lintas UPT, serta keterlambatan pelaporan dalam sistem SIPT yang dipengaruhi oleh belum optimalnya ketepatan waktu penginputan data.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan berupa :

3) Pengadaan sampel makanan
4) Pengujian laboratorium sampel makanan

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 10% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 50.899.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 6.297.409,- (12,37%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100,99%	12,37%	0.12	-0.88	75 % Tidak Efisien

Selain itu pencapaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dan anggaran dari Rincian Output (RO) lain yang tidak ditaggingkan, namun menunjang pencapaian kinerja, seperti :

- EBA.994. Layanan Perkantoran yaitu Pemeliharaan Alat Laboratorium, pengiriman sampel, pengadaan alat penunjang laboratorium menggunakan akun ekstrakomptable;

- RAB.001. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu Pengadaan Alat Laboratorium
- PDD.001. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode, Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan, Pengadaan Glassware, Media Mikro, K3, Gas Laboratorium, Kolom, dan Suku Cadang, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Penguji dan Reakreditasi Laboratorium.

IKSK 1.6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
83,33	98,64	84,49%	Cukup

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 84,49% sehingga termasuk dalam kategori **Cukup**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

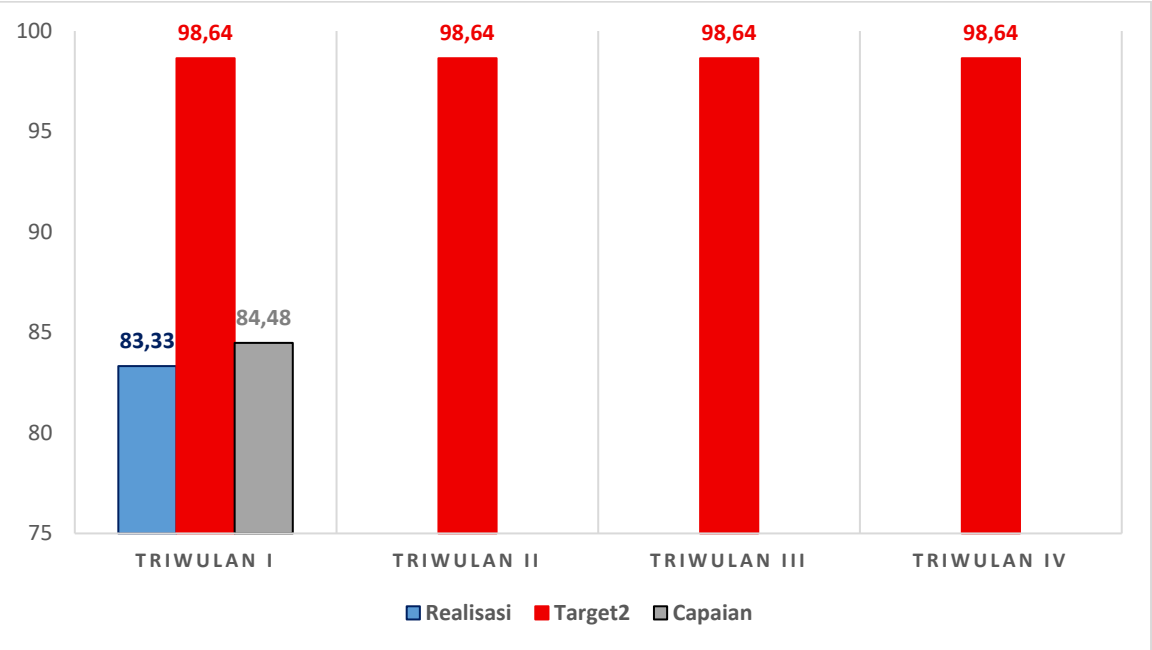

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
83,33	98,64	84,49%	Akan Tercapai

Target tahun 2026 diharapkan akan tercapai, tentunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan melakukan upaya peningkatan.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) pada triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

Jenis Stake holder	Komoditi	Triwulan I tahun 2026		
		Rekom Yg DiTL	Rekom Yg Diberikan	%
Pelaku Usaha	Obat	3	7	42,86
	Obat Bahan Alam	2	2	100,00
	Suplemen Kesehatan	1	1	100,00
	Kosmetik	4	4	100,00
	Pangan	9	11	81,82
	Jumlah	**20**	**24**	**83,33**
Lintas Sektor	Obat	-	-	-
	Obat Bahan Alam	-	-	-
	Suplemen Kesehatan	-	-	-
	Kosmetik	-	-	-
	Pangan	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**-**
Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder				**83,33**

Sehingga diperoleh Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I tahun 2026 adalah 83,33.

Jika dilihat masing - masing komoditi, penyumbang nilai rendah untuk keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti

oleh stakeholder adalah jumlah feedback yang diterima oleh pelaku usaha komoditi Obat, diikuti oleh komoditi Pangan.

Kondisi Februari-Maret 2026 merupakan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dimana terdapat banyak hari libur sehingga respons atau *feedback* dari pelaku usaha tidak sesuai dengan *timeline* CAPA yang telah ditetapkan, dan belum dapat melaksanakan Desk CAPA. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Desk CAPA merupakan salah satu pendorong terbesar tercapainya realisasi feedback dari pelaku usaha. Dengan belum dapat dilaksanakannya kegiatan Desk CAPA, sangat berpengaruh terhadap realisasi feedback yang diberikan pelaku usaha pada triwulan I tahun 2026 ini.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Monitoring feedback dari pelaku usaha melalui pesan elektronik kepada pelaku usaha belum cukup efektif untuk menaikkan realisasi indikator ini	Membuat kegiatan desk CAPA secara rutin, bentuk kegiatan secara daring / luring menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Membuat kegiatan desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum memberikan feedback CAPA secara periodic.	Desember 2026	Y	S-24	Rendahnya keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak ditin-daklanjuti oleh pelaku usaha

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :

- QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT,
- QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT,
- QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT,

Kegiatan yang dilaksanakan dalam ketiga Rincian Output (RO) di atas berupa :

- Monitoring terhadap terbitnya keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tepat waktu dan pengawalan penyampaian surat tersebut kepada pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat balasan/ *feedback* CAPA diberikan oleh pelaku usaha.
- Monitoring dan evaluasi petugas terhadap timeline dari pemenuhan CAPA yang disampaikan kepada pelaku usaha dan komunikasi petugas kepada pelaku usaha berupa mengingatkan kembali kewajiban terhadap *feedback* CAPA mampu meningkatkan jumlah CAPA yang diterima.
- Koordinasi yang kuat kepada lintas sektor dapat mendukung pencapaian feedback terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banjarbaru.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah masing-masing 10% dari pagu yang tersedia pada ketiga Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 39.862.200,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 2.879.310,- (7,22%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
88,49%	7,22%	0,09	-0,91	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	100	100%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

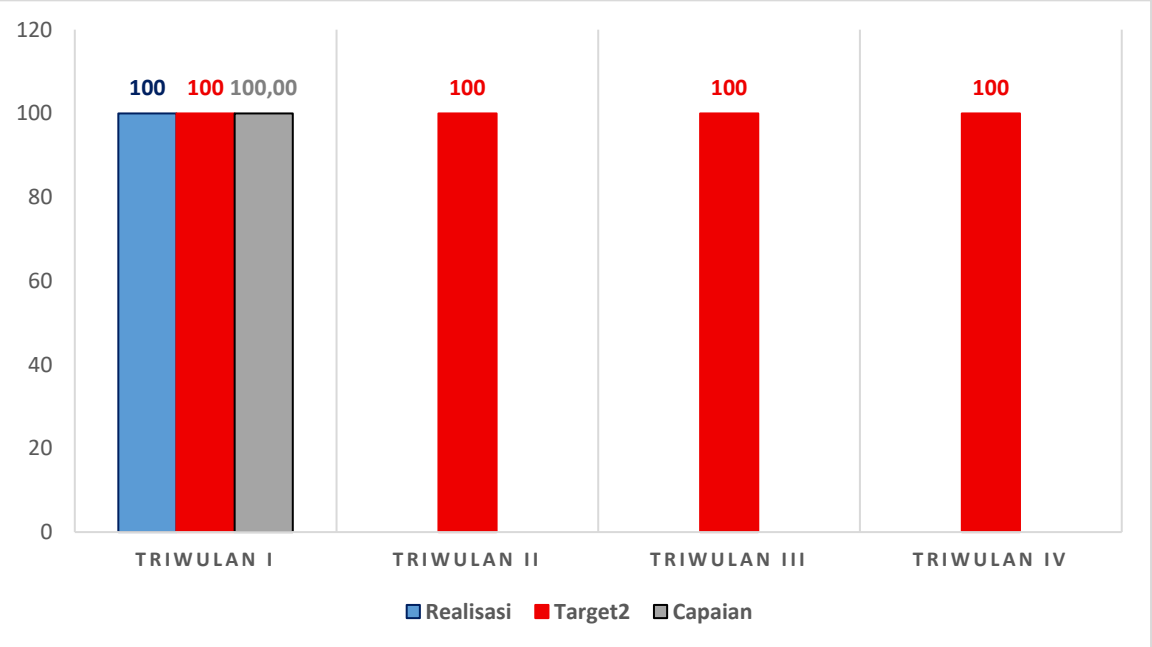

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	100	100%	▲ Tercapai/Melampaui

Target tahun 2026 diharapkan akan tercapai, tentunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan melakukan upaya peningkatan.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Di wilayah kerja BBPOM di Banjarbaru hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Pada tahun 2026, target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berjumlah 6 sarana, dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) pada triwulan I tahun 2026, diperoleh data sebagai berikut :

No.	Komoditi	sasaran dan cakupan target renlak Tahun 2026	s/d Triwulan I tahun 2025	
			Target Renlak	Realisasi Pengawasan
1	Obat	-	-	-
2	Obat Bahan Alam	2	-	-
3	Suplemen Kesehatan	-	-	-
4	Kosmetik	4	1	1
	Jumlah	**6**	**1**	**1**

Data di atas menunjukkan target pengawasan target sarana produksi Sediaan Farmasi pada triwulan I tahun 2026 adalah 1 sarana atau mencapai 16,67% dari jumlah sasaran dan cakupan target tahun 2026, dan dapat direalisasikan seluruhnya (100%), dengan data dan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN		SARANA PRODUKSI							
			OBAT		OBA		SK		KOSM	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
A	% Pelaksanaan inspeksi	Realisasi pengawasan sarana	-	-	-	-	-	-	1	100
		Target renlak	-		-		-		1	
B.	% Kualitas pelaporan dan	Sarana yg diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	-	-	-		-	-	1	

NO	URAIAN		SARANA PRODUKSI							
			OBAT		OBA		SK		KOSM	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
	ketepatan waktu	Seluruh sarana yang diperiksa	-		-	-	-		1	100
C.	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Kesimpulan pengawasan sarana yg benar	-	-	-	-	-	-	1	100
		Sarana yg sele sai diperiksa/ inspeksi	-		-		-		1	
D.	% Kese suaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawas an sarana	Tindaklanjut hasil pengawasan sarana yg sesuai dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	1	100
		Seluruh TL	-		-		-		1	
	REALISASI				-				100	
			100							

Sehingga diperoleh Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah 100.

Target kinerja dapat tercapai didukung oleh :

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun dan
- Kedisiplinan pegawai dalam memenuhi timeline pembuatan surat tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya.
- Kompetensi petugas pengawas dalam menentukan tindak lanjut hasil pengawasan dan ketepatan pengambilan kesimpulan.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Ada efisiensi anggaran terhadap RO terkait IKU ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target bulanan jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang menjadi dasar perhitung an indikator ini.	Penyesuaian target menjadi per twriwulan mengingat kecilnya target pengawasan					

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, berupa Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi, Peningkatan kompetensi petugas. Koordinasi lintas sektor

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 70% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 20.286.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 5.879.370,- (28,98%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	28,98%	0,29	-0,71	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
95,24	96,38	98,82%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 98,82% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

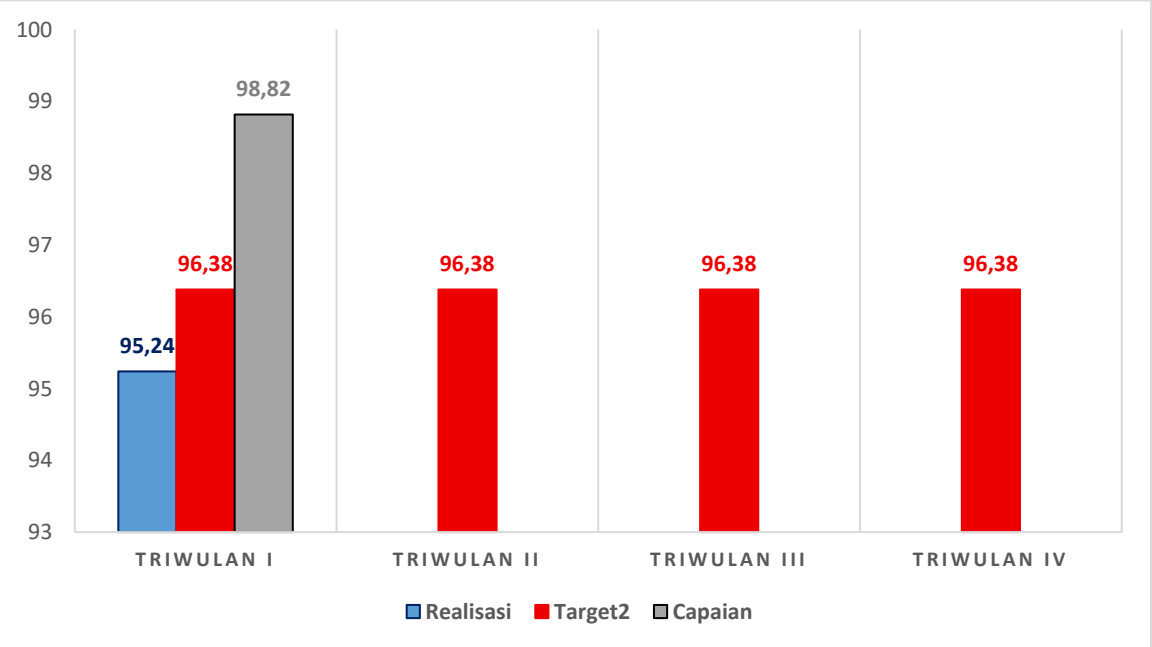

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
95,24	96,38	98,82%	Akan Tercapai

Dengan tercapainya kategori capaian Akan Tercapai sebesar 98,82% maka target tahunan 2026 masih optimis tercapai pada akhir triwulan IV tahun 2026.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026, target pengawasan sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berjumlah 45 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) pada triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

No.	Komoditi	Sasaran dan cakupan target renlak Tahun 2026	Triwulan I tahun 2026	
			Target Renlak	Realisasi Pengawasan
1	MD	33	5	5
2	P-IRT	12	2	2
	Jumlah	**45**	**7**	**7**

Data di atas menunjukkan target pengawasan target sarana produksi Pangan Olahan triwulan I tahun 2026 adalah 7 sarana atau 15,56 % dari jumlah sasaran dan cakupan target rencana pelaksanaan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan tahun 2026. Dari target 7 sarana produksi Pangan Olahan di triwulan I tahun 2026, dapat direalisasikan seluruhnya (100%), dengan data dan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah	%
A	% Ketepatan waktu	Sarana yang diperiksa tepat waktu	6	85,71
		Sarana yang diperiksa	7	
B	% Ketepatan tindak lanjut	Sarana yg ditindaklanjuti dg tepat	7	100
		Sarana yang diperiksa	7	
C	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	7	100
		Sarana yang diperiksa	7	
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**95,24**

Sehingga diperoleh Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah 95,24.

Target kinerja tidak dapat tercapai 100% dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan target output sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan efisiensi dengan penurunan target output tidak segera dapat ditetapkan sehingga terdapat penyesuaian perencanaan pemeriksaan pada TW I menyesuaikan calon target baru. Hal ini berpengaruh terhadap perhitungan, dimana penyebut dari perhitungan semakin kecil sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan pemeriksaan/aspek lain yang berpengaruh terhadap realisasi pembilang akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap nilai Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Adapun faktor pendukung capaian kinerja pada IKU ini yaitu :

1) Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, termasuk PIRT telah mengacu pada pedoman/petunjuk pelaksanaan pemeriksaan masing-masing jenis sarana produksi pangan.
2) Adanya pendampingan UMKM pangan olahan yang dilaksanakan oleh tim pendampingan UMKM memberikan dampak positif pada penerapan CPPOB di sarana UMK Pangan Olahan
3) Peningkatan koordinasi target pemeriksaan IRTP dengan dinas kesehatan kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) POM menu pengawasan post market sarana IRTP

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Pelaporan SIPT tidak tepat waktu	Penguatan monitoring pemenuhan timeline pelaporan SIPT setiap akhir bulan	Melakukan monitoring melalui rekap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	Maret 2026	Y	S-12	Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu Rincian Output (RO) QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, berupa

- Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi,
- Peningkatan kompetensi petugas,
- Koordinasi lintas sektor

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 20% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 5.796.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1.679.820,- (28,98%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
98,82%	28,98%	0,29	-0,71	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
99,44	98,73	100,73%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100,73% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

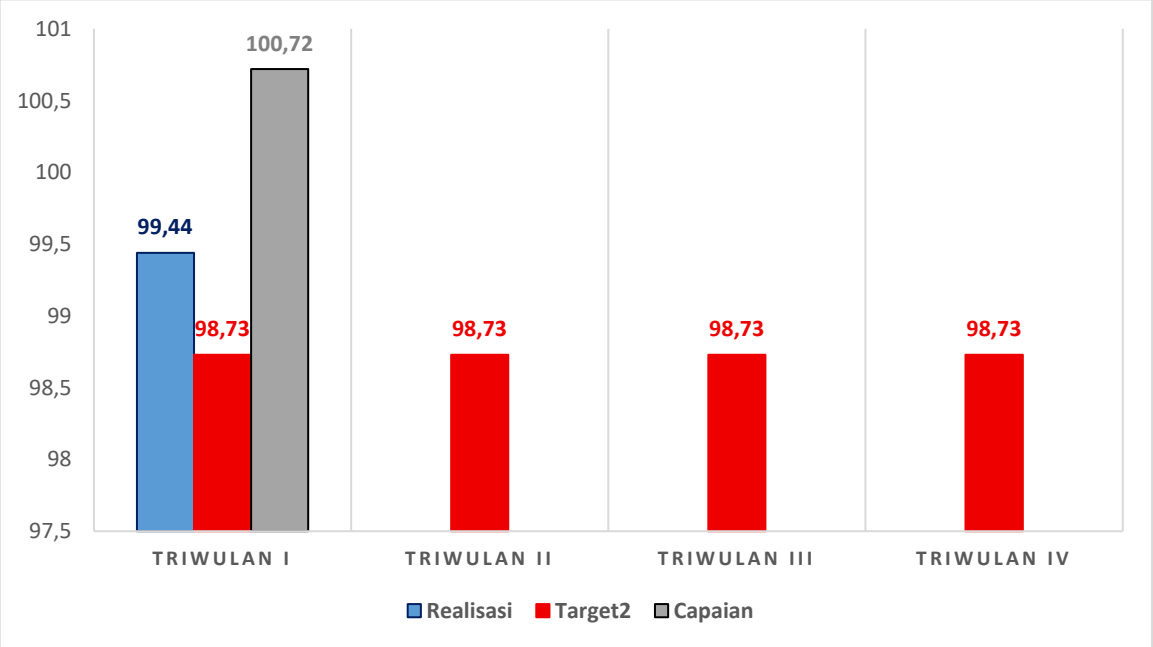

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
99,44	98,73	100,73%	▲ Tercapai/Melampaui

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026, target pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berjumlah 165 sarana, dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) pada triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

No.	Fasilitas Distribusi	Target Pemeriksaan Tahun 2026		s/d Triwulan I tahun 2026	
		Awal	Usulan Revisi Efisiensi	Target Renlak	Realisasi Pengawasan
A	**Obat / Saryanfar**				
1	Pedagang Besar Farmasi	10	7	2	2
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	8	4	1	1
3	Puskesmas	23	12	2	3
4	Rumah Sakit	14	8	2	2
5	Klinik	15	11	2	2
6	Apotek	45	22	5	5
7	Toko Obat/ Fasilitas Lain	10	6	2	2
	Jumlah	**125**	**70**	**16**	**17**
B	**OBA-SK-Kosmetik**				
1	Obat Bahan Alam	57	31	6	6
2	Suplemen Kesehatan	46	25	5	5
3	Kosmetik Penotifikasi	11	6	0	0
4	Kosmetik Non Penotifikasi	60	33	7	7
	Jumlah	**174**	**95**	**18**	**18**
	Jumlah Fasilitas Distribusi	**299**	**165**	**34**	**35**

Data di atas menunjukkan bahwa target pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi triwulan I tahun 2026 adalah 34 sarana atau hanya 11,37% dari jumlah sasaran dan cakupan target rencana pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi

Sediaan Farmasi Tahun 2026 (299 sarana), hal ini disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian target triwulanan berdasarkan target tahunan yang baru yaitu 165 sarana yang sedang berproses usulan revisinya, sebagai dampak efisiensi anggaran pada Rincian Output (RO) terkait.

Dari target triwulan I tahun 2026 tersebut dapat direalisasikan 35 sarana (102,94%), dengan data dan perhitungan sebagai berikut :

1) Obat

No.	Uraian		Realisasi	
			Jumlah	Nilai
A	% Pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa	15	100
		Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa	15	
B	% Kesesuaian Tindak Lanjut	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan sesuai standar timeline	14	96,67
		Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat dari tim inspeksi, yang sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dan telah direview oleh independent supervisor	15	
		Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa	15	
	Persentase fasilitas distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**98,33**

2) Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan

No.	Uraian		Realisasi	
			Jumlah	Nilai
A	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah realisasi pengawasan sarana	11	100
		Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	11	
B	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	11	100
		Jumlah sarana yang diperiksa	11	
C	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	11	100
		Jumlah sarana yang selesai diperiksa	11	
D	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	3	100
		Jumlah seluruh tindaklanjut	3	
	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**100**

3) Kosmetika

No	Uraian		Realisasi	
			Jumlah	Nilai
A	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah realisasi pengawasan sarana	7	100
		Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	7	
B	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	7	100
		Jumlah sarana yang diperiksa	7	
C	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	7	100
		Jumlah sarana yang selesai diperiksa	7	

No	Uraian		Realisasi	
			Jumlah	Nilai
D	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	4	100
		Jumlah seluruh tindaklanjut	4	
	Persentase fasilitas distribusi Kosmetika yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**100**

Dari perhitungan perkomoditi tersebut di atas diperoleh realisasi kinerja :

No.	Uraian	Realisasi
1	Persentase fasilitas distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,33
2	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
4	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**99,44**

Sehingga Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 99,44.

Dari data diatas terdapat komoditi obat yang tidak mencapai realisasi 100% sehingga realisasi untuk ketiga komoditi sebesar 99,44 %, hal ini disebabkan karena pelaporan pemeriksaan sarana melalui SIPT melebihi timeline yang telah ditentukan.

Dan penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

a. Kompetensi petugas pengawas dalam membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana
b. Kedisiplinan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana dan menyampaikan pelaporan tepat waktu sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Batas waktu (timeline) dalam penyampaian pelaporan melalui SIPT antara komoditi obat, OBA, SK, Kosmetika dan Pangan berbeda - beda, petugas pengawas perlu memperhatikan pemenuhan timeline sesuai komoditinya	Melakukan monitoring pemenuhan timeline pelaporan SIPT	Monitoring dan evaluasi yang melekat oleh ketua tim kepada anggota tim terhadap pelaporan yang disampaikan melalui SIPT ataupun rekap pemeriksaan sarana yang terdapat pada link drive internal disetiap bulannya	Desember 2026	Y	S-26	Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, berupa :

a) Penyusunan perencanaan target pemeriksaan sarana pengawasan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi OBA, sarana distribusi SK serta sarana distribusi kosmetik berdasarkan kajian risiko pengawasan yang akan diperiksa tahun 2025.
b) Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

c) Melakukan pengawasan sarana sesuai ketentuan dan melakukan pelaporan tepat waktu.
d) Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan/ pemenuhan target pemeriksaan, kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat serta akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi secara konsisten.
e) Melakukan monitoring sarana secara berkala penggunaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan serta target kinerja telah tercapai.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 60% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 219.820.800,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 12.236.400,- (5,57%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100,73%	5,57%	0,06	-0,94	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	97,08	103,01%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan Itahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 103,01% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

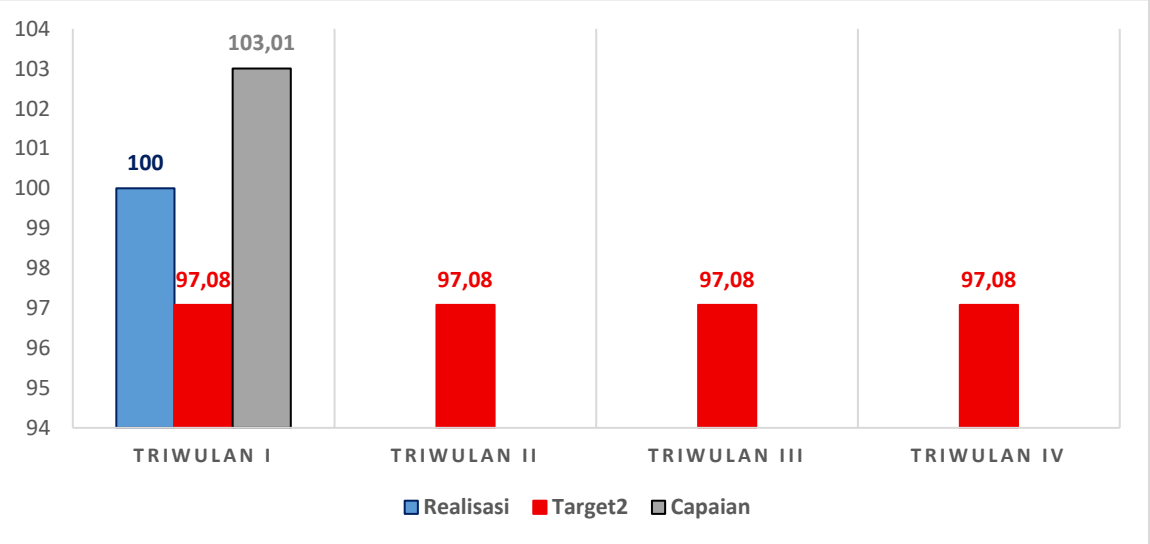

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	97,08	103,01%	Tercapai/Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 103,01% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026 jumlah target pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 51 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2026, diperoleh data:

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2026	
		Target	Realisasi
Pangan Olahan	51	11	11

Terlihat bahwa target sarana distribusi Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah 11 sarana atau 21,57% dari jumlah target sarana distribusi Pangan Olahan tahun 2026, dengan realisasi pemeriksaan sarana 103,01% tdan juga sudah mencapai lebih dari 100% terhadap target tahunan.

Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk setiap komponen penilaiannya, dan memperoleh nilai sebagai berikut :

No.	Komponen Nilai (Bobot)	Perhitungan	Jumlah	Capaian
A	Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (20%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa	11	20
		Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	11	
B	Ketepatan Tindak Lanjut (70%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	11	70
		Jumlah Sarana yang Diperiksa	11	
C	Pemenuhan Target Sarana yg Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu (20%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	11	20
		Jumlah Sarana yang Diperiksa	11	
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**100**

Sehingga diperoleh Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah 100%

Penyebab keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 yaitu :

1) Penentuan target pemeriksaan sarana distribusi pangan telah mengacu pada analisa berbasis risiko, termasuk tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat
2) Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah mengacu pada pedoman/petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
3) Adanya penyesuaian target tahunan menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya
4) Dilakukan penyampaian hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Banjarbaru secara berkala, sehingga catatan dari hasil evaluasi tersebut diterapkan pada pemeriksaan bulan-bulan selanjutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, berupa

- Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan,
- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan.
- Koordinasi lintas sektor

Selain itu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Peningkatan kompetensi seluruh petugas pemeriksaan melalui Pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar sehingga memperkuat kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi/distribusi pangan.
2. Peningkatan komitmen dan komunikasi tim kerja sehingga monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan secara efektif dan berkala. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kesesuaian pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan *timeline.*

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 20% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 73.273.600,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 4.078.800,- (5,57%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100,31%	5,57%	0,05	-0,95	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
98,67	99,91	98,76%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 98,76% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

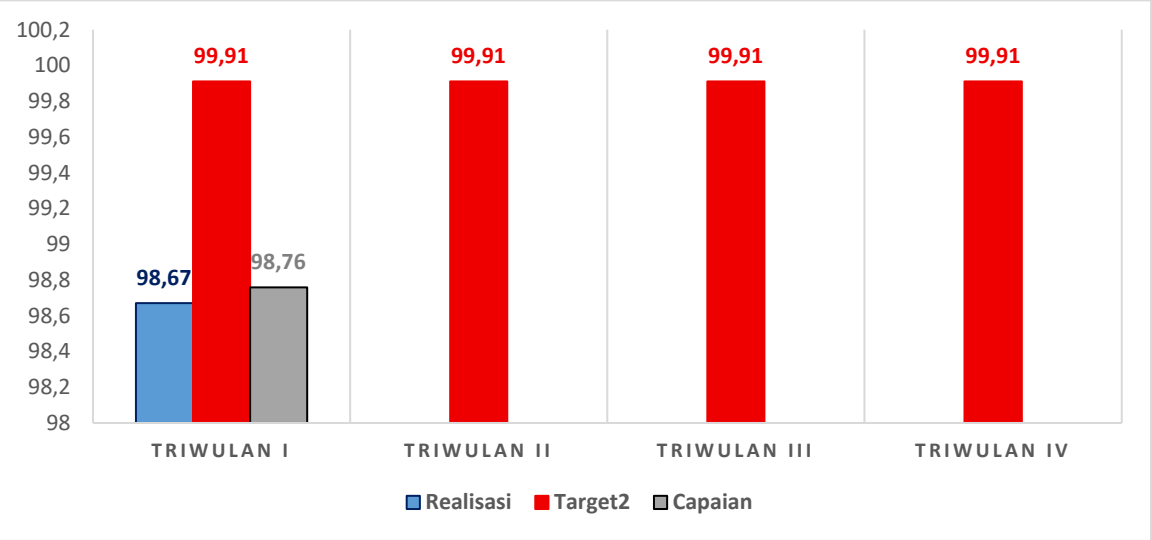

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
98,67	99,91	98,76%	Akan Tercapai

Dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 98,76% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026 jumlah target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 957 iklan, dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

No.	Komoditi	Target Tahun 2026	Triwulan I tahun 2026	
			Target Renlak	Realisasi Pengawasan
1	Obat	245	58	58
2	Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi	104	32	32
3	Suplemen Kesehatan	51	15	12
4	Kosmetik	305	78	78
5	Pangan Olahan	252	63	63
	Jumlah	**957**	**232**	**229**

Terlihat bahwa target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah 214 iklan atau 23,92% dari jumlah target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2026 (957).

Dari target 957 di tahun 2026 tersebut, dapat direalisasikan sebanyak 232 (23,92%) dan memperoleh nilai sebagai berikut :

1) Obat

No.	Komponen	Perhitungan	Jumlah	Capaian
A	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	58	100,00
		Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	58	
B	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	58	100,00
		Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	58	
	Persentase iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan			**100,00**

2) Kosmetik

No.	Komponen	Subkomponen			Jumlah	Capaian	Realisasi
A	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	A1	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media cetak	1	100,00	100,00
				Jumlah target media cetak	1		
		A2	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media luar ruang	5	100,00	
				Jumlah target media luar ruang	5		
		A3	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media online	58	100,00	
				Jumlah target media online	58		
		A4	% Capaian media elektronik	Capaian jumlah iklan media elektronik	14	100,00	
				Jumlah target media elektronik	14		
B	% Ketepatan Waktu Pelaporan	B1	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dievaluasi dan diverifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	78	100,00	100,00
				Jumlah iklan yg dievaluasi	78		
		B2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	Jumlah iklan yg dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	78	100,00	
				Jumlah iklan yg dievaluasi	78		
	Persentase iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan						**100,00**

3) Obat Bahan Alam

No.	Komponen (Bobot)	Perhitungan	Jumlah	Capaian
A	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	32	100
		Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	32	
B	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	32	100
		Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	32	

No.	Komponen (Bobot)	Perhitungan	Jumlah	Capaian
C	% Akurasi pengambilan keputusan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	32	100
		jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	32	
	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan			**100**

4) Suplemen Kesehatan

No.	Komponen (Bobot)	Perhitungan	Jumlah	Capaian
A	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	12	80
		Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	15	
B	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	12	100
		Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	12	
C	% Akurasi pengambilan keputusan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	12	100
		jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	12	
	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan			**93,33**

5) Pangan Olahan

No.	Komponen	Subkomponen (Bobot)			Jumlah	Realisasi	Nilai
A	Nilai Pemenuhan Target Iklan (40%)	Target			63	1	40
		Jumlah Iklan yang diawasi			63		
B	Kesesuaian Proporsi Media Iklan (20%)	B1	Media cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	6	1	20
				Proporsi Realisasi Media Cetak	6		
		B2	Media online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	33	1	
				Proporsi Realisasi Media online	33		
		B3		Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	9	1	

No.	Komponen	Subkomponen (Bobot)			Jumlah	Realisasi	Nilai
			Media penyiaran	Proporsi Realisasi Media penyiaran	9		
		B4	Media luar ruang	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	15	1	
				Proporsi Realisasi Media luar ruang	15		
C	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan (40%)	Jumlah Iklan Tepat Waktu			63	100	40
		Jumlah Iklan yang diawasi			63		
	Persentase iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan						**100**

Dari data perkomoditi tersebut di atas, digabungkan menjadi :

No.	Komoditi	Realisasi
1	Persentase iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan	100
2	Persentase iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan	100
3	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan	93,33
5	Persentase iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**98,67**

Sehingga diperoleh Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2026 adalah 98,67.

Capaian IKU tersebut didukung oleh kedisiplinan dan kerjasama yang baik dari operator pengawas iklan dan verifikator dalam memenuhi timeline pembuatan pelaporan hasil pengawasan Iklan melalui SIPT. Timeline 25 HK (operator) dan timeline 5 HK (verifikator kirim ke Pusat).

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti :

- Perkuatan pengawasan iklan dan penandaan Obat sesudah beredar
- Peningkatan kompetensi petugas UPT Badan POM dalam kesesuaian evaluasi hasil pengawasan iklan dan penandaan
- Koordinasi/konsultasi terkait pengawasan iklan.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan IKU salah satunya adalah monitoring pelaksanaan pengawasan secara rutin dan terjadwal sehingga timeline di masing-masing kegiatan dapat terpantau

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 5% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 18.318.400,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1.019.700,- (5,57%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
98,76%	5,57%	0,06	-0,94	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	92	108,70%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 108,70% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

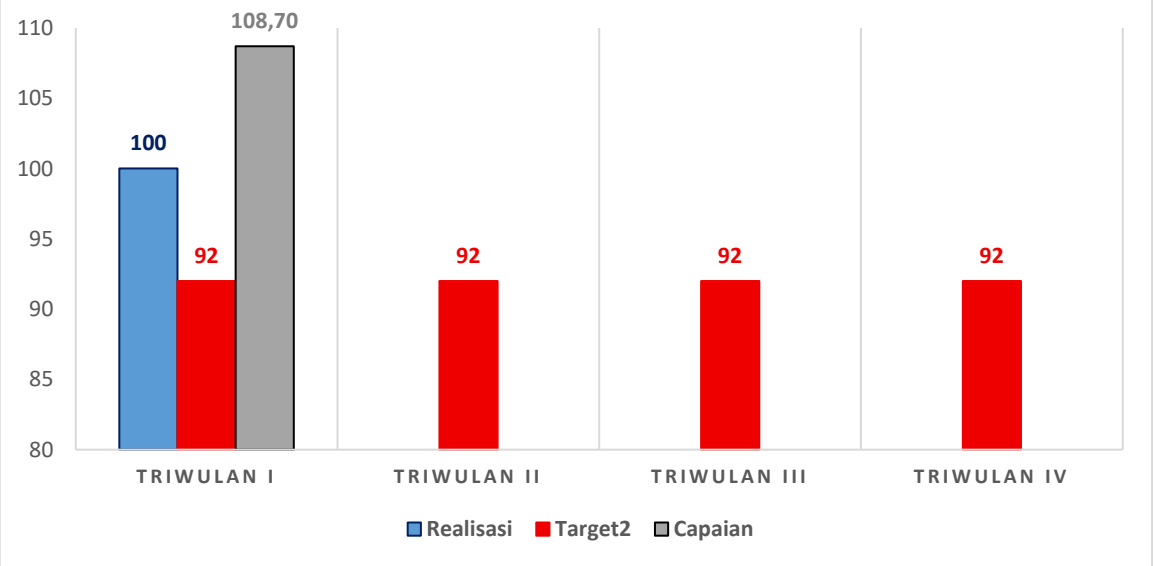

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	92	108,70%	▲ Tercapai/Melampaui

Dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 108,70% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026 jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah 204 produk, dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2026, target target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebesar 52 dan dapat direalisasikan seluruhnya (100%) dan memperoleh nilai sebagai berikut :

No.	Komponen	Perhitungan	Jumlah	Capaian
A	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi s.d bulan N	52	100,00
		Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	52	
B	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu s.d bulan N	52	100,00
		Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	52	
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan			**100,00**

Berdasarkan data di atas penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja persentase label produk tembakau dan/rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah kedisipinan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan, ketepatan dalam penginputan hasil pengawasan label melalui SIPT, baik oleh petugas pengawas, supervisor maupun yang dikirimkan oleh Kepala BBPOM di Banjarbaru.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Ketidaktepatan waktu supervisor dalam melaku kan verifikasi laporan penanda an / label melalui SIPT yang sudah dikirimkan oleh petugas penga was (melebihi tgl 5 di bulan berikutnya)	Monitoring yang lebih melekat dan pengecekan berulang terhadap jumlah pelaporan penandaan label rokok melalui SIPT	Reminder petu gas pengawas (operator) kepa da supervisor untuk menverifi kasi hasil penga wasan di SIPT pada akhir bulan periode pengawasan	Desember 2026		O-21	Pelaporan pengawasan label produk tembakau tidak memenuhi timeline yang ditetapkan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yangdiperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM, seperti Pengadaan sampel Produk Tembakau, Pemeriksaan label Produk Tembakau dan/ atau Rokok Elektronik, Koordinasi/konsultasi/pengembangan kompetensi

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 15.463.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 563.000,- (3,64%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
108,70%	3,64%	0,03	-0,97	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan antara lain Bimbingan Teknis / KIE Pengendalian AMR.

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 5% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 18.318.400,- engan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1.019.700,- (5,57%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	5,57%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

IKSK 1.14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
74,3	73,5	101,09%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 101,09% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

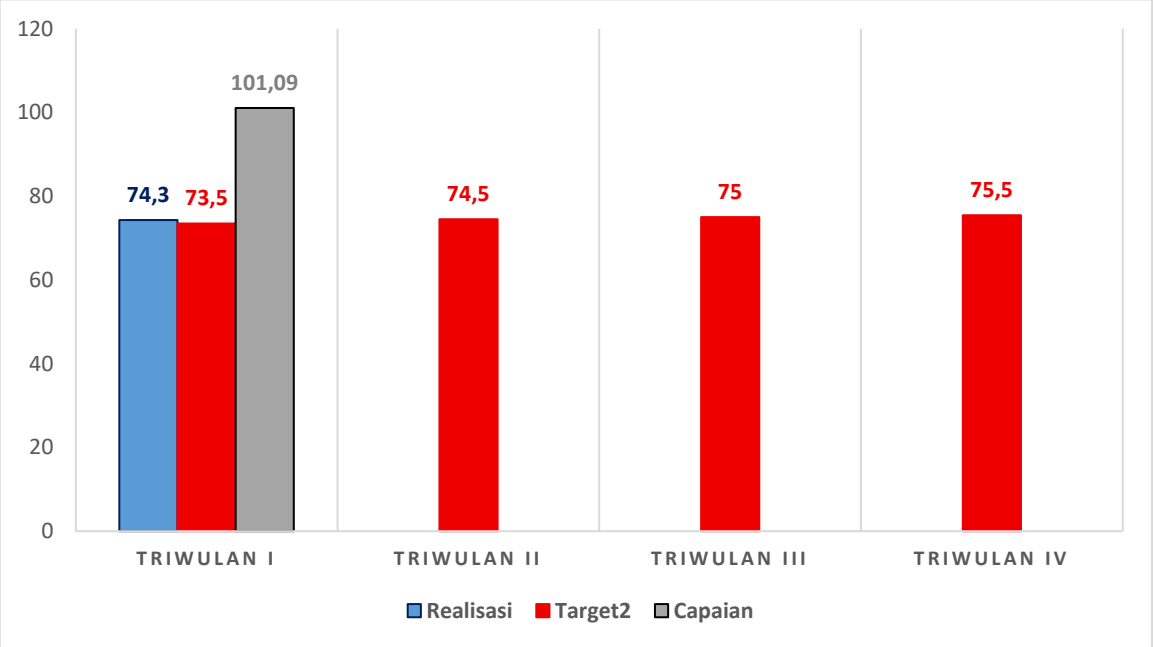

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
74,3	75,5	98,42%	Akan Tercapai

Dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 98,42% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2026, BBPOM di Banjarbaru memperoleh

1) Nilai Standar Ruang Lingkup diperoleh dari rata-rata Persentase Pemenuhan SRL Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, yaitu :

No.	Laboratorium Kimia			Laboratorium Mikrobiologi
	Komoditi	Nilai (%)	Rata-rata	
1.	Obat	81,4	75,2	84,5
2.	Kosmetik	85,8		
3.	OBA, OK, SK	82,5		
4.	Pangan	51,1		
Persentase Pemenuhan SRL (%)			**79,9**	

2) Nilai Standar Peralatan merupakan rata-rata Persentase Pemenuhan Peralatan Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, sebagai berikut :

No.	Laboratorium	Nilai (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)
1	Kimia	84,13	80,0
2	Mikrobiologi	75,84	

3) Nilai Standar Metode Terverifikasi, diperoleh dari rata-rata Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi seluruh Laboratorium :

No.	Laboratorium	Nilai (%)	Persentase Pemenuhan MA Terverifiksi (%)
1.	Obat	25,9	23,4
2.	Kosmetik	17,1	
3.	OBA, OK, SK	9,2	

No.	Laboratorium	Nilai (%)	Persentase Pemenuhan MA Terverifiksi (%)
4.	Pangan	22,8	
5.	Mikrobiologi	41,8	

4) Nilai Standar Kompetensi Laboratorium, diperoleh dari :

Laboratorium									
Obat		OBA, OK, SK		Kosmetik		Pangan		Mikrobiologi	
Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2
0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
80									

Dari pemenuhan 4 aspek tersebut di atas, diperoleh Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Banjarbaru sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 74,3 dengan rincian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	79,9	74,3
2.	Standar Peralatan	80,0	
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	80,0	
4.	Standar Metode Terverifikasi	23,4	

Beberapa faktor yang mendukung realisasi kinerja BBPOM di Banjarbaru dalam hal pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I adalah :

- ✓ Peningkatan kompetensi empat laboratorium, yaitu laboratorium pangan, laboratorium obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, laboratorium kosmetik serta laboratorium mikrobiologi.
- ✓ Terpenuhinya standar ruang lingkup di laboratorium pangan dan laboratorium mikrobiologi.
- ✓ Bertambahnya jumlah metoda analisa terverifikasi di laboratorium pangan, obat dan mikrobiologi.
- ✓ Perencanaan pengadaan reagen dan peralatan laboratorium telah mempertimbangkan kajian efektivitas dan peran BBPOM di Banjarbaru dalam

regionalisasi laboratorium, seperti pengadaan alat gelas, media mikrobiologi, test kit, gas laboratorium, suku cadang, kolom serta pemeliharaan alat laboratorium.

- ✓ Penguji telah memahami penyusunan catatan pengujian dan pelaporan secara lengkap dan sesuai ketentuan.
- ✓ Penyesuaian data peralatan antara SKL dan dikolaborasi telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian realisasi telah melebihi target triwulan I, namun keempat aspek pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium masih terus berproses dalam pencapaian target tahuan hingga triwulan IV.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah alat laboratorium belum terpenuhi dalam rangka pencapaian SKL, hal ini dikarenakan pengadaan alat laboratorium belum semuanya terealisasi yang terdampak dengan adanya efisiensi anggaran	membuat rekapitulasi data peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi, baik jumlah maupun kondisi peralatan	pengadaan peralatan laboratorium dilaksanakan berdasarkan skala prioritas	Desember 2026	T		
2	Standar kompetensi laboratorium obat belum terpenuhi karena adanya sampel obat yang tidak pernah lagi	berkoordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk melakukan sampling sampel obat yang tidak pernah diuji	melakukan sampling dan pengujian sampel obat	Desember 2026	T		

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	masuk laboratorium sehingga tidak bisa diuji						
3	Ruang lingkup kompetensi personil aboratorium belum dapat terpenuhi disebabkan oleh tema pelatihan/ bimtek dari PPPOMN yang belum mengakomodir kebutuhan pemenuhan ruang lingkup kompetensi personel	Menyusun perencanaan pelatihan internal dalam rangka pemenuhan ruang lingkup kompetensi personel Pengajuan usulan rencana pelatihan internal di Balai Besar POM di Banjarbaru kepada PPPOMN		Januari - Desember 2026	Y	S-O8	Pemenuhan ruang lingkup Kompetensi Personel Lab. terhambat

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :

1) PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti : Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode, Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan, Pengadaan Glassware, Media Mikro, K3, Gas Laboratorium, Kolom, dan Suku Cadang, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Penguji dan Reakreditasi Laboratorium.

2) RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu Pengadaan Alat Laboratorium.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah masing-masing 100% dari pagu yang tersedia pada kedua Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 3.494.948.000,-, namun karena adanya efisiensi berupa blokir pada anggaran yang bersumber dari PNBP pada RO PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar Rp. 144.150.000,- sehingga pagu efektif menjadi Rp. 3.350.798.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 233.531.236,- atau 6,97% sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
101.09%	6,97%	0,07	-0,93	75 % Tidak Efisien

Selain itu pencapaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dan anggaran dari Rincian Output (RO) lain yang tidak ditaggingkan, namun menunjang pencapaian kinerja, seperti yaitu EBA.994. Layanan Perkantoran, berupa Pemeliharaan Alat Laboratorium, pengiriman sampel, pengadaan alat penunjang laboratorium menggunakan akun ektrakomptable;

IKSK 1.15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan antara lain Advokasi ke Pemerintah Daerah, Pendampingan pengisian Tools Penilaian Mandiri , Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 5% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 25.449.500,- engan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 3.148.705,- (12,37%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	12,37%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

SK 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

IKSK 2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
0	14	0%	Kurang

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 0% sehingga termasuk dalam kategori **Kurang.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

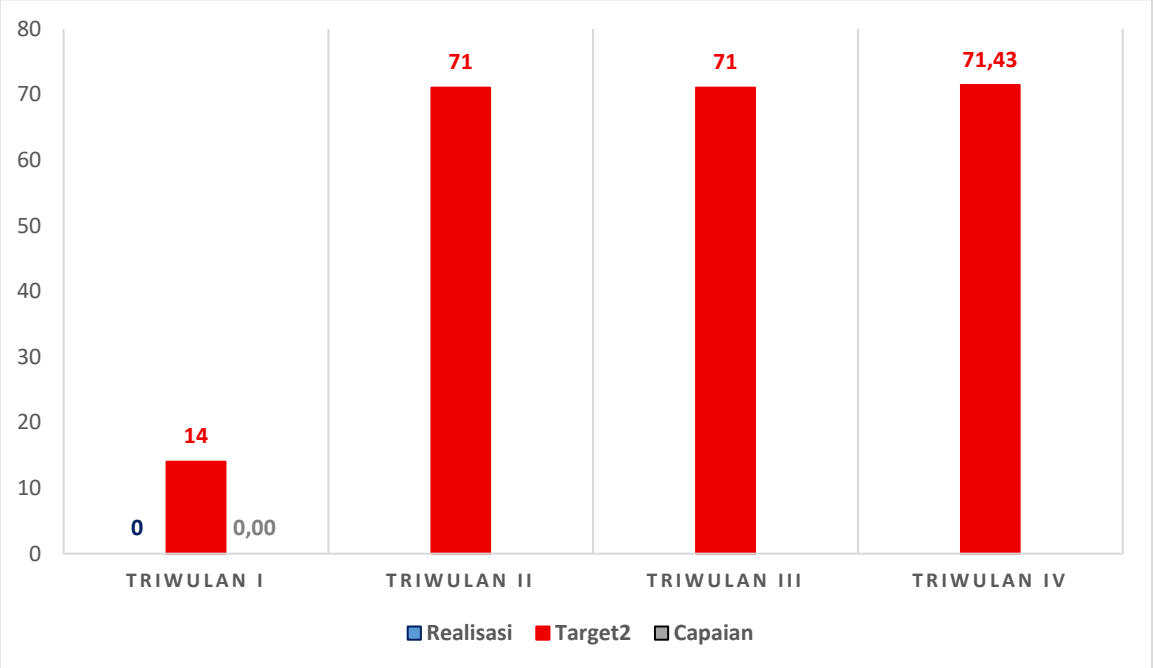

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Sesuai dengan Manual Indikatornya, target dan realisasi indikator kinerja ini bersifat akumulatif, sehingga akan meningkat pada bulan berikutnya hingga akhir tahun. Apabila realisasi indikator kinerja ini di triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun 2026, diperoleh data sebagai berikut

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
0	71,43	0%	Perlu Upaya Keras

Dengan belum adanya realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2026 maka capaian kinerja target tahunan juga 0% sehingga perlu upaya keras untuk mengejar ketertinggalan ini.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026 jumlah sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Banjarbaru adalah 7 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2026, diperoleh data :

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Cakupan Sarprod Fortif
7	0	0

Pada triwulan I tahun 2026 jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 0 sarana sehingga Persentase cakupannya adalah 0. Hal ini dikarenakan tidak terlaksananya target jumlah pemeriksaan pada triwulan I tahun 2026 yaitu sebanyak 1 sarana.

Penyebab kegagalan/tidak tercapainya pemeriksaan sarana sejumlah 1 sarana produksi pangan fortifikasi pada TW I Tahun 2026 ini disebabkan oleh adanya rencana pengurangan target output dampak dari pemotongan anggaran pada Rincian Output (RO) QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT, hal ini menyebabkan perubahan rencana pelaksanaan sampling produk pangan fortifikasi maupun pemeriksaan sarananya yang pada dimulai pada triwulan II tahun 2026 yaitu pada bulan April, sehingga terjadi gap antara target yang ditetapkan di awal tahun dengan pelaksanaan yang menyesuaikan perubahan rencana pelaksanaan.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Jadwal pemeriksaan berpotensi tidak bersamaan dengan jadwal sampling pangan fortifikasi	Penyusunan renlak dengan menyamakan jadwal pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan sampling pangan	Penyusunan renlak dengan menyamakan jadwal pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan sampling pangan	Juni 2026	Y	S-15	Tidak tercapainya jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT, dengan kegiatan berupa Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi kesehatan.

Monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang dilakukan secara berkala dapat meningkatakn kesesuaian pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan timeline

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 90% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 2.946.600,- dan belum ada realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
0%	0%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

Mengingat sangat minimnya anggaran pada Rincian Output (RO) QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT, untuk mencapai target indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga ditunjang oleh Rincian Output (RO) QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT meskipun tidak ditaggingkan, yaitu kegiatan Bimtek Pengawas Pangan Fortifikasi.

SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE

IKSK 3.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
91,39	91,03	100,4%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100,4% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

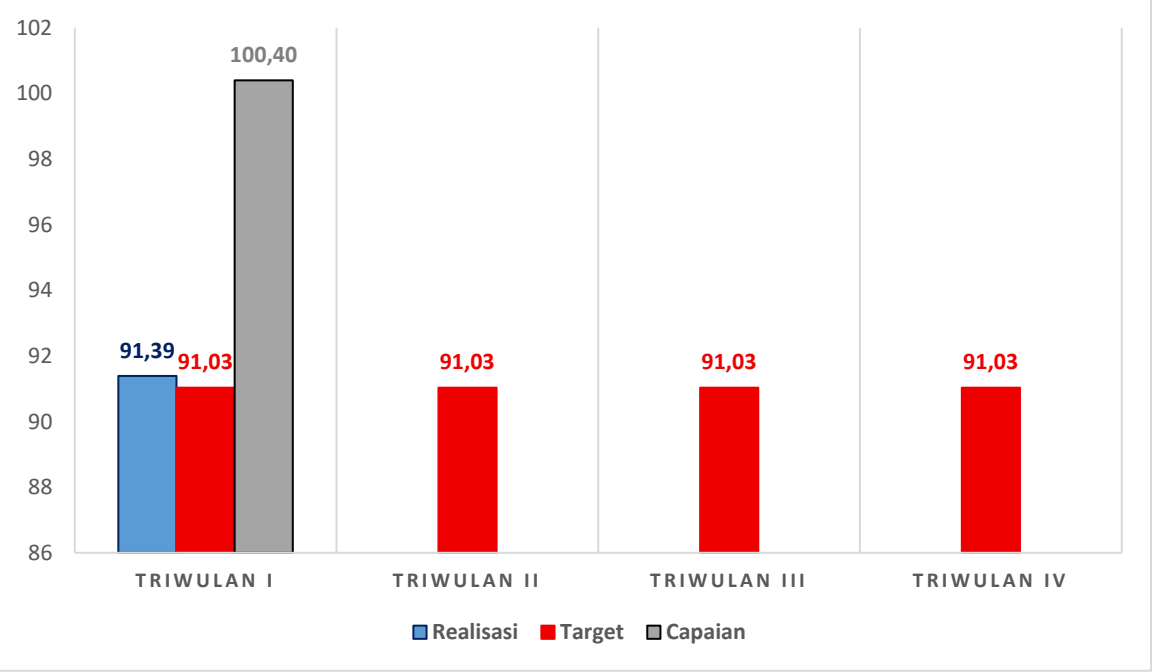

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B03 hingga B12.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
91,39	91,03	100,4%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 100,4% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2026, BBPOM di Banjarbaru memperoleh nilai sebesar 91,39, Kategori Indeks Efektif, yang diperoleh dari:

No.	Indeks KIE Tatap Muka			Indeks Media
	Indeks	Nilai (%)	Evaluasi	
1.	Narasumber dan Petugas	94,1964	91,81	90,97
2.	Konten atau Informasi	94,3182		
3.	Pemahaman Audien	87.987		
4.	Manfaat KIE	90.7468		
Indeks KIE			**91,39**	
Kategori Indeks			**Efektif**	

Tercapainya target indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan hasil dari upaya BBPOM di Banjarbaru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, serta dirasakan manfaatnya.

Beberapa faktor utama penyebab keberhasilan tersebut antara lain:

1. Perencanaan KIE yang lebih tepat sasaran

   Perencanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara sistematis dan berbasis data dengan mengacu pada hasil pengawasan serta capaian kinerja sebelumnya, sehingga fokus pada permasalahan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Penetapan sasaran dilakukan secara tersegmentasi sesuai karakteristik kelompok risiko, disertai penyusunan materi dan pemilihan media yang adaptif agar pesan dapat diterima secara efektif. Pelaksanaan KIE juga melibatkan pemangku kepentingan untuk memperluas

jangkauan dan meningkatkan kredibilitas, serta didukung indikator kinerja yang terukur dan evaluasi berkala. Dengan pendekatan tersebut, KIE diharapkan lebih tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta perubahan perilaku masyarakat terhadap keamanan obat dan pangan.

2. Peningkatan Kualitas Materi dan Metode KIE

   Peningkatan kualitas materi dan metode KIE dilakukan melalui penyusunan konten yang lebih informatif, akurat, dan berbasis kebutuhan sasaran, serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan karakteristik audiens. Materi KIE dikembangkan secara kontekstual dengan memanfaatkan data hasil pengawasan dan isu aktual, serta dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Metode penyampaian juga dioptimalkan melalui kombinasi pendekatan tatap muka dan Media, termasuk pemanfaatan media sosial dan inovasi komunikasi interaktif untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala terhadap materi dan metode yang digunakan guna memastikan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan

   Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan dalam pelaksanaan KIE dilakukan melalui penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX, guna memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas. BBPOM di Banjarbaru juga bekerjasama dengan anggota Saka POM Krida Informasi Obat dan Makanan, yang telah dilatih dan dibekali terkait informasi sediaan farmasi dan pangan olahan. Peran aktif Saka POM mendorong dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga pesan KIE lebih mudah diterima dan dipercaya. Upaya ini didukung dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kontribusi kemitraan dalam meningkatkan capaian kinerja serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.

4. Kompetensi petugas KIE yang meningkat

   Peningkatan kompetensi petugas KIE dilakukan melalui penguatan kapasitas secara berkelanjutan, meliputi pelatihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran mandiri tentang pelayanan publik yang ada di IDEAS serta pelatihan bahasa isyarat untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan Inklusif terkait substansi keamanan

obat dan pangan serta teknik komunikasi yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun materi yang berkualitas, menyampaikan pesan secara persuasif, serta menyesuaikan metode dengan karakteristik sasaran. Dengan kompetensi yang semakin baik, petugas KIE diharapkan mampu mendukung efektivitas program serta mendorong peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat.

5. Pemanfaatan kanal Digital

   Pemanfaatan kanal digital dalam pelaksanaan KIE dilakukan secara optimal melalui penggunaan berbagai platform media sosial dan Subsite BBPOM Banjarbaru untuk memperluas jangkauan informasi secara cepat dan efisien. Konten KIE disajikan dalam format yang menarik dan interaktif, seperti infografis, video edukasi, dan kampanye digital, sehingga lebih mudah dipahami dan diminati oleh berbagai segmen masyarakat. Selain itu, pemanfaatan kanal digital juga memungkinkan penyampaian pesan secara real time serta meningkatkan keterlibatan sasaran audien KIE.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Survei telah sesuai kegitan KIE yg dilakukan untuk target jumlah respon den keseluruhan memang belum tercapai karena target responden tersebut adalah target responden total tahunan, dan survei masih berproses	Peningkatkan penyelelarasan survei efektifitas KIE dengan jumlah responden yang di survei	penyelelarasan survei efektifitas KIE dengan jumlah responden yang di survei	Desember 2026	Y	S-02	kurangnya sosialisasi dan publikasi Obat dan Makanan di masyarakat luas

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :

b) BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE , dengan kegiatan berupa : KIE bersama Tokoh Masyarakat, KIE pada kegiatan KerLing (Kelotok Laboratorium Keliling), Koordinasi Lintas Sektor

c) BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT, dengan kegiatan berupa Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan di Media Cetak/ Media Online/ Media Elektronik/ Media Sosial

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada kedua Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 629.695.000,- , namun karena adanya efisiensi berupa blokir pada anggaran yang bersumber dari PNBP pada Rincian Output (RO) BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE sebesar Rp. 196.855.000,- sehingga pagu efektif yang tersedia menjadi Rp. 432.840.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 200.566.000,- (46,34 %) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100,40%	46,34%	0,46	-0,54	75 % Tidak Efisien

IKSK 3.2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
7	7	100%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

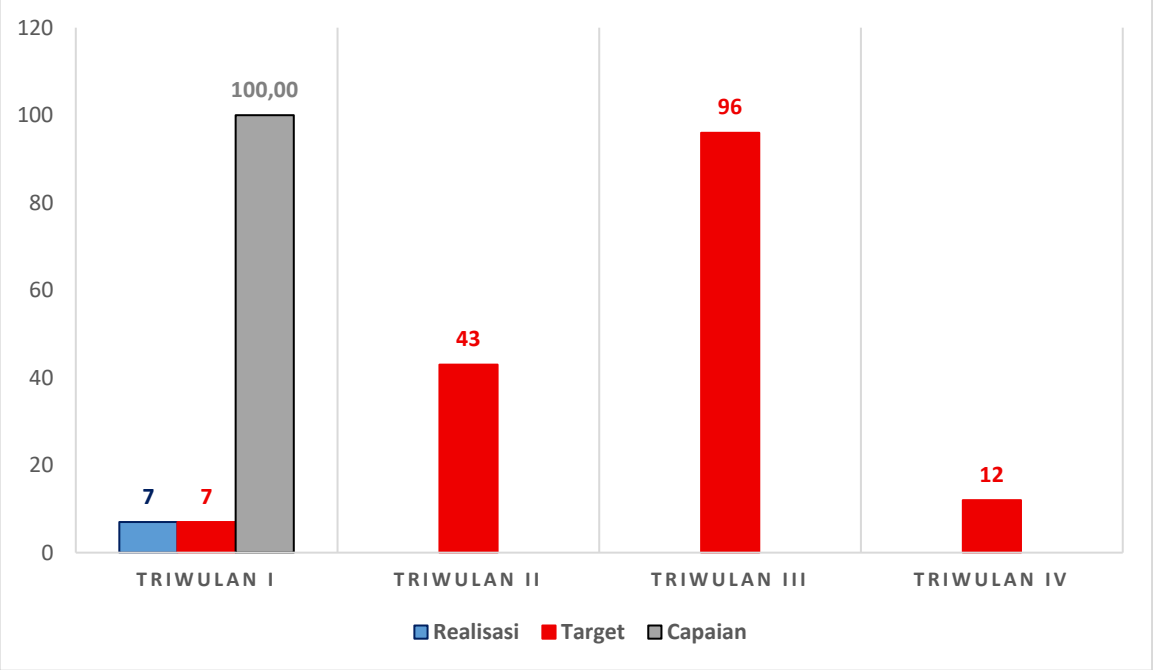

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Sesuai dengan Manual Indikatornya, target dan realisasi indikator kinerja ini pada bulan Januari hingga November adalah merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut, sedangkan pada akhir tahun atau bulan Desember target dan realisasinya dihitung berdasarkan perhitungan indikator, sehingga

untuk membandingkan realisasi Indikator Kinerja ini baik bulanan maupun triwulanan dengan target tahun 2026, maka target tahun 2026 sejumlah 12 sekolah harus diasumsikan sebagai 100%, dimana dengan tercapainya rata-rata dari progres kegiatan sebesar 100% maka tercapai juga target 12 sekolah tersebut.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
7%	100%	7%	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target tahunan 100 capaiannya baru 7%, menunjukkan bahwa kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan kategori Perlu upaya keras, kondisi ini mengindikasikan bahwa progres pelaksanaan kegiatan masih rendah pada awal tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan tahapan kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	rogres s/d TW I (%)
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25	7
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20	0
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25	0
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0
5	Pengawalan	5	0
	Total		**7**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, dengan realisasi sebesar 7% dari target 7% (capaian 100%), dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1) Perencanaan kinerja yang realistis dan terukur, sehingga target Triwulan I dapat dicapai sesuai dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan pada awal tahun.
2) Kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun, baik dari sisi dokumen

perencanaan, penjadwalan kegiatan, maupun dukungan anggaran, memungkinkan kegiatan dapat segera diimplementasikan tanpa kendala berarti.

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga berperan dalam memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target, serta memungkinkan penanganan cepat terhadap potensi hambatan.
4) Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus pelaksanaan program

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I tidak hanya disebabkan oleh kesesuaian antara target dan realisasi, tetapi juga didukung oleh pengelolaan program yang efektif, kesiapan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Ke depan, faktor-faktor tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja pada triwulan berikutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Pada TW 1 Kegiatan masih dalam proses awal yaitu Perencanaan dan Audiensi sebesar 7 %	Melakukan percepatan kegiatan	Percepatan kegiatan advo kasi yang akan disampaikan pada koordinasi/ audiensi dengan pemintah daerah Kab. Tapin sebagai lokus Germas SAPA	April 2026	Y	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Hasil audiensi dgn pemerintah Kab. Tapin pelaksanaan Advokasi lintas sektor pada bulan April (setelah Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri) sehingga tidak bisa dilaku kan percepatan di bulan maret	Pelaksanaan Advokasi	Sesuai Hasil Audiensi bahwa pelaksanaan Advokasi tetap pada bulan April	April 2026	Y	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan
	Kader Sekolah/ pimpinan seko lah yang tidak melakukan Kaderisasi kepada kader pengganti di sekolah yang ditinggalkan sehingga kegiat an intervensi keamanan PJAS terhenti	Meningkatkan peran komite sekolah (orang tua) untuk ikut serta dalam tahapan PJAS sebagai kader keamanan pangan sekolah	Melakukan Koordinasi dengan Pihak sekolah dengan bisa mengaktifkan komite sekolah sebagai kader keamanan pangan	30 Des 2026	Ya	O-12	Pelaksanaan tahapan prog ram tepadu Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah (PJAS) tidak Sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 sebesar 7% dari target triwulan I sebesar 7%, dengan capaian 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada periode Triwulan I masih berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang telah tersusun dengan baik sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai tepat waktu. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan jelas serta kesiapan sumber daya (SDM, anggaran,

dan sarana prasarana) turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya target. Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) BDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman, dengan kegiatan berupa :

- Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor,
- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas Sekolah,
- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan Sekolah,
- Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Level I dan II),
- Monitoring Pemberdayaan Kader Kemanan PJAS, dan
- Pengawalan Sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 84.688.000,- , dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 3.699.695,- (4,37 %) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	4,37%	0,04	-0,96	75 % Tidak Efisien

IKSK 3.3. Jumlah desa pangan aman

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
14	14	100%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

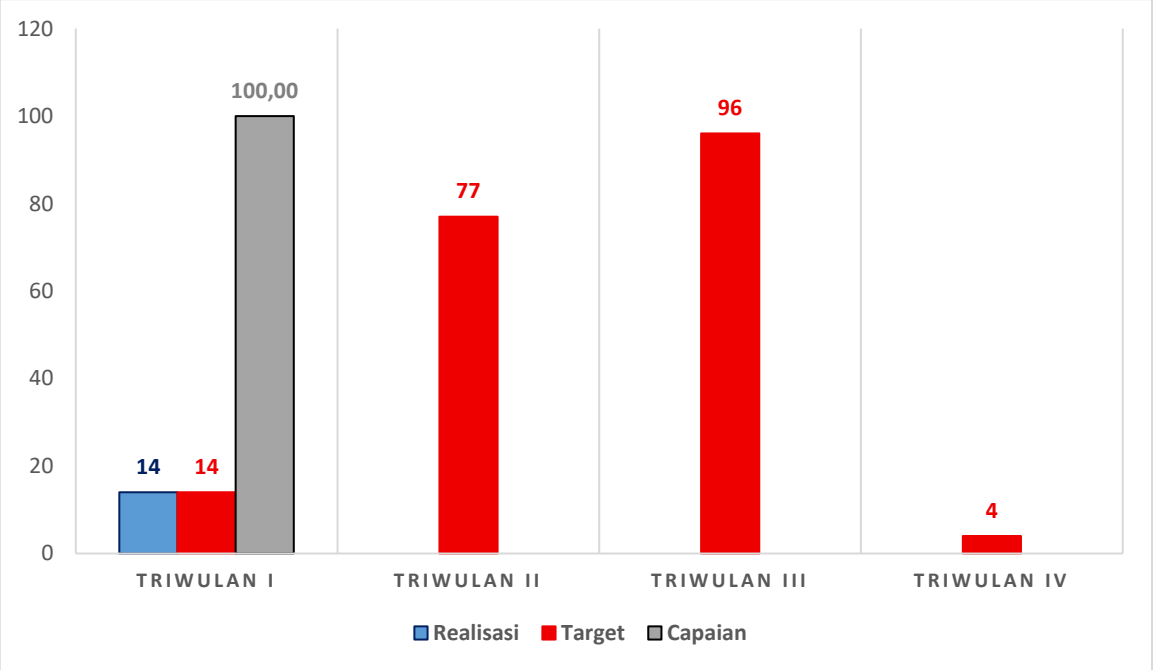

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Sesuai dengan Manual Indikatornya, target dan realisasi indikator kinerja ini pada bulan Januari hingga November adalah merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut, sedangkan pada akhir tahun atau bulan Desember target dan realisasinya dihitung berdasarkan perhitungan indikator, sehingga untuk membandingkan realisasi Indikator Kinerja ini baik bulanan maupun triwulanan

dengan target tahun 2026, maka target tahun 2026 sejumlah 4 Desa harus diasumsikan sebagai 100%, dimana dengan tercapainya rata-rata dari progress kegiatan sebesar 100% maka tercapai juga target 4 Desa tersebut.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
14%	100%	14%	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target tahunan 100 capaiannya baru 14%, menunjukkan bahwa kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan kategori Perlu upaya keras, kondisi ini mengindikasikan bahwa progres pelaksanaan kegiatan masih rendah pada awal tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan tahapan kegiatan Desa Pangan Aman sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres s/d TW I (%)
1	dvokasi Lintas Sektor Program Desa Pangan Aman	25	7
2	elatihan Kader Keamanan Pangan Desa	25	5
3	mbingan Teknis Komunitas Desa	20	0
4	onitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman	20	0
5	engawalan	10	2
	Total		**14**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, dengan realisasi sebesar 14% dari target 14% (capaian 100%), dipengaruhi oleh beberapa factor:

1) Perencanaan kinerja yang realistis dan terukur, sehingga target triwulan I dapat dicapai sesuai dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan pada awal tahun.
2) Kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun, baik dari sisi dokumen perencanaan, penjadwalan kegiatan, maupun dukungan anggaran, memungkinkan kegiatan dapat segera diimplementasikan tanpa kendala berarti.
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga berperan dalam memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target, serta memungkinkan penanganan cepat terhadap potensi hambatan.

4) Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus pelaksanaan program

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I tidak hanya disebabkan oleh kesesuaian antara target dan realisasi, tetapi juga didukung oleh pengelolaan program yang efektif, kesiapan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Ke depan, faktor-faktor tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja pada triwulan berikutnya

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Jumlah desa pangan aman

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Pada TW 1 Kegiatan masih dalam proses awal yaitu Perencanaan dan Audiensi sebesar 7 %	Melakukan percepatan kegiatan	Melakukan per cepatan kegiat an advokasi yg akan disampai kan pada saat koordinasi/ audi ensi dg pemkab Tapin sebagai lokus Germas SAPA	April 2026	Y	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan
2	Hasil audiensi dg Pemkab Tapin pelaksanaan Advokasi lintas sektor pada bulan April (setelah Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri) sehingga tidak bisa dilaku kan percepatan bulan maret	Pelaksanaan Advokasi	Sesuai Hasil Audiensi bahwa pelaksanaan Advokasi tetap pada bulan April	April 2026	Y	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan
3	Kurangnya aktivi tas kader dalam mengimplemen tasikan ilmu yg didapat pada pelatihan KKPD	Meningkatkan keterlibatan kader dalam kegiatan baik program Desa Pangan aman	Pelaksanaan KIE stunting Desa melibatkan kader keamanan	30 Desember 2026	Ya	O-13	Pelaksanaan tahapan prog ram Tepadu Desa Pangan Aman tidak sesuai rencana

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		maupun program yang lain	pangan desa				pelaksanaan yang telah ditetapkan.
	Kurang efektif nya Kader Remaja yang masih berstatus pelajar karena kemungkinan besar akan berpindah untuk bekerja ataupun melanjukkan Pendidikan	Meningkatkan keterlibatan Kader remaja dalam kader dalam kegiatan baik program Desa Pangan aman maupun program yang lain	Pelaksanaan KIE stunting dg mengundang Kader remaja sebagai peserta di luar jam sekolah	30 Desember 2026	Ya	O-13	Pelaksanaan tahapan prog ram Tepadu Desa Pangan Aman tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 sebesar 14% dari target triwulan I sebesar 14%, dengan capaian 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada periode Triwulan I masih berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang telah tersusun dengan baik sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai tepat waktu. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan jelas serta kesiapan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya target. Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Jumlah desa pangan aman dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) BDB.002 Desa Pangan Aman, dengan kegiatan berupa :

- Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor,
- Perkuatan Kapasitas Desa melalui Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa,
- Pelatihan Koordinator Lapangan dan Kader Keamanan Pangan Desa,

- Bimbingan Teknis Komunitas Desa,
- Pengambilan Data Survei Pre dan Post Intervensi,
- Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Desa,
- Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka Pre dan Post Intervensi,
- Sosialisasi Penurunan Angka Stunting bagi Komunitas Desa,
- Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman, dan
- Pengawalan Desa yang diintervensi tahun sebelumnya.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 160.662.000,- , dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1.246.000,- (0,78%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	0,78%	0,01	-0,99	75 % Tidak Efisien

IKSK 3.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
7	7	100%	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

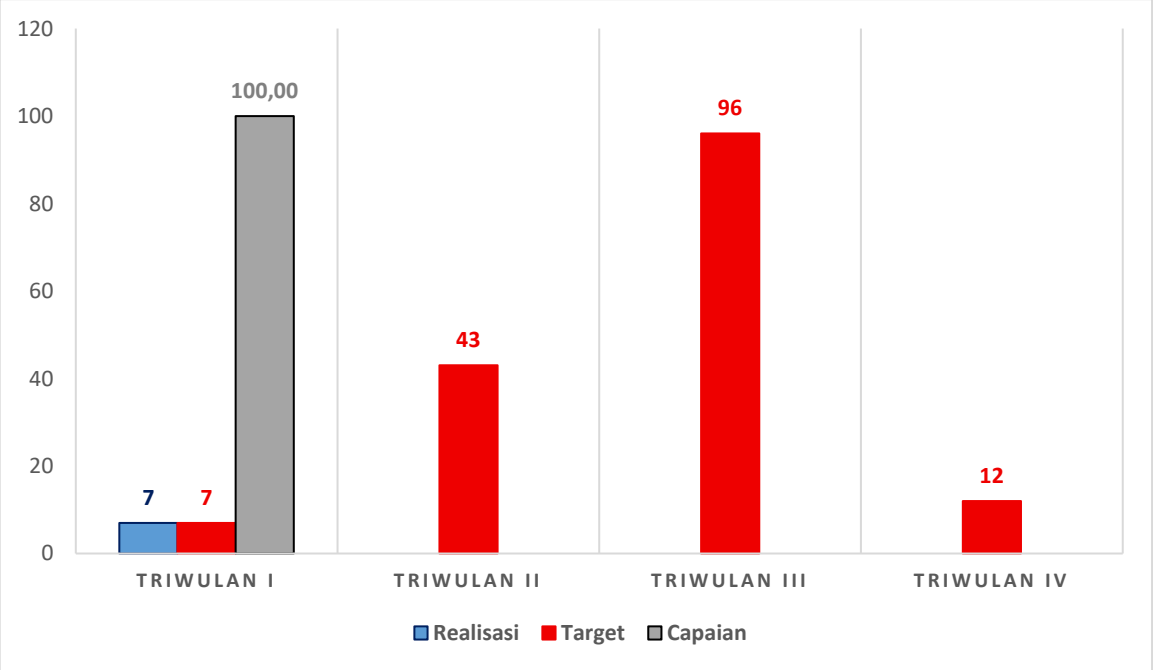

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Sesuai dengan Manual Indikatornya, target dan realisasi indikator kinerja ini pada bulan Januari hingga November adalah merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut, sedangkan pada akhir tahun atau bulan Desember target dan realisasinya dihitung berdasarkan perhitungan indikator, sehingga untuk membandingkan realisasi Indikator Kinerja ini baik bulanan maupun triwulanan

dengan target tahun 2026, maka target tahun 2026 sejumlah 1 pasar harus diasumsikan sebagai 100%, dimana dengan tercapainya rata-rata dari progres kegiatan sebesar 100% maka tercapai juga target 1 pasar tersebut.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
7%	100%	7%	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target tahunan 100 capaiannya baru 7%, menunjukkan bahwa kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan kategori Perlu upaya keras, kondisi ini mengindikasikan bahwa progres pelaksanaan kegiatan masih rendah pada awal tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan tahapan kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	rogres s/d TW I (%)
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25	7
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25	0
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20	0
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20	0
5	Pengawalan	10	0
	Total		**7**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, dengan realisasi sebesar 7% dari target 7% (capaian 100%), dipengaruhi oleh beberapa factor:

1) Perencanaan kinerja yang realistis dan terukur, sehingga target Triwulan I dapat dicapai sesuai dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan pada awal tahun.
2) Kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun, baik dari sisi dokumen perencanaan, penjadwalan kegiatan, maupun dukungan anggaran, memungkinkan kegiatan dapat segera diimplementasikan tanpa kendala berarti.
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga berperan dalam

memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target, serta memungkinkan penanganan cepat terhadap potensi hambatan.

4) Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus pelaksanaan program

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I tidak hanya disebabkan oleh kesesuaian antara target dan realisasi, tetapi juga didukung oleh pengelolaan program yang efektif, kesiapan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Ke depan, faktor-faktor tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja pada triwulan berikutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Sesuai kesepa katan hasil audiensi dengan PemKab. Tapin bahwa pelaksana an Advokasi lintas sektor setelah Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri yaitu pada bulan April sehingga bulan maret tidak dilaksanakan	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	April 2026	Ya	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan
2	Tingkat pendidik an dan kemam puan fasilitator dari petugas pasar dan pagu yuban pasar yg bervariasi sehing ga proses trans fer ilmu kepada komunitas seba	Meningkatkan koordinasi dan monitoring terhadap petugas fasilitator pasar terhadap pelaksanaan	Dilakukan pengawalan/ pendampingan terhadap pelaksanaan program Pasar aman berbasis komunitas oleh fasilitator pasar	30 Des 2026	Ya	O-14	Pelaksanaan tahapan prog ram Tepadu Pasar Aman Berbasis Komu nitas tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	gian tidak sesuai dengan yang diharapkan.	program Pasar aman berbasis komunitas					
3	Rendahnya kesa daran produsen dan pedagang terhadap penggu naan bahan berbahaya dalam pangan terutama daging dan ikan asin yang mudah busuk (formalin cumi asin, teri medan).	Meningkatkan sosialisasi kepada para produsen dan pedagang terhadap penggunaan Bahan berbahaya pada pangan	Membagi leaflet yang masih ada ke pedagang pasar dan membagi poster bahan berbahaya yang masih ada ke pasar intervensi	30 Des 2026	Ya	O-14	Pelaksanaan tahapan prog ram Tepadu Pasar Aman Berbasis Komu nitas tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 sebesar 7% dari target triwulan I sebesar 7%, dengan capaian 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada periode Triwulan I masih berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang telah tersusun dengan baik sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai tepat waktu. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan jelas serta kesiapan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya target. Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dengan kegiatan berupa :

- Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor,
- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas Pasar,
- Bimbingan Teknis Pengelola Pasar,
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas,
- Pengawalan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 29.951.000,- , dan sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum ada realisasi (0%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	0%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKSK 4.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
15,15	15	101,03%	Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 101,03% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

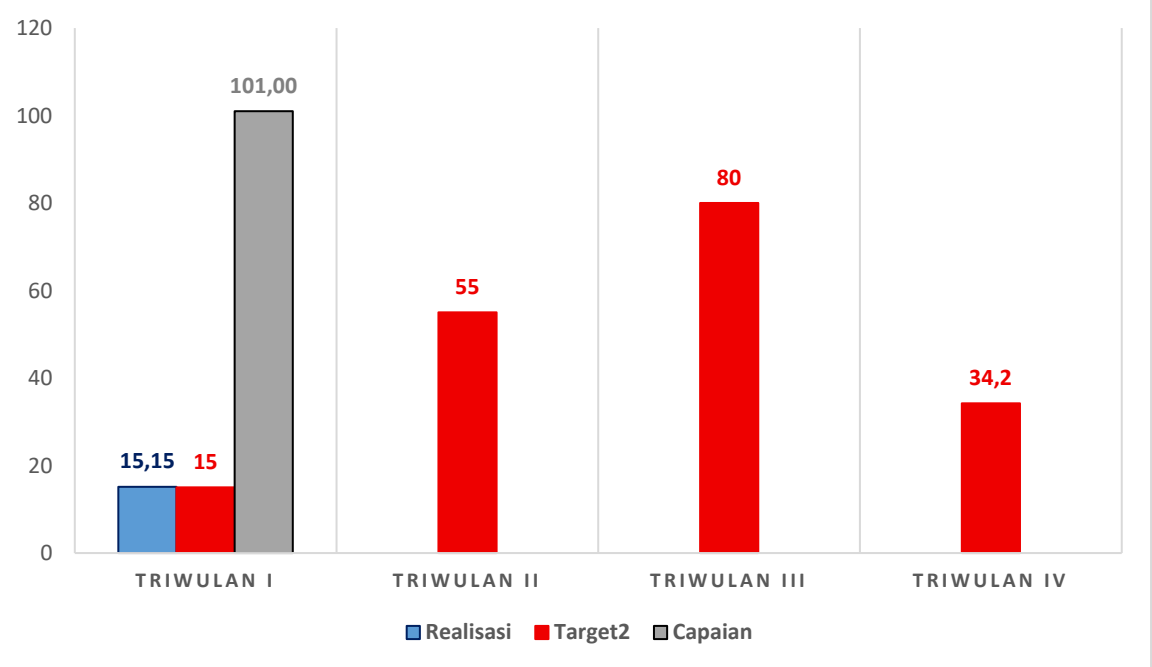

Sebagai realisasi triwulan pertama pada tahun 2026, maka tidak ada data perbandingan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Sesuai dengan Manual Indikatornya, target dan realisasi indikator kinerja ini pada bulan Januari hingga November adalah merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut, sedangkan pada akhir tahun atau bulan Desember target dan realisasinya dihitung berdasarkan perhitungan indikator, sehingga untuk membandingkan realisasi Indikator Kinerja ini baik bulanan maupun triwulanan dengan target tahun 2026, maka target tahun 2026 harus diasumsikan sebagai 100%, dimana dengan tercapainya rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas sebesar 100% maka tercapai juga target tahunannya.

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
15,15	100	15,16%	▼ Perlu Upaya Keras

Meskipun realisasi kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2026 hanya 15,16% dari target tahun 2026 sehingga masuk kategori yang memerlukan upaya keras untuk pencapaian target tahunannya, namun realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 ini sudah sesuai perencanaan dan optimis target tahun 2026 dapat dicapai, tentunya dengan tetap melaksanakan kegiatan terkait sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pada tahun 2026, jumlah target pendampingan UMKM oleh BBPOM di Banjarbaru sebanyak 26 UMKM, yang terdiri dari 22 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam, dan 3 UMKM Kosmetik.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dan monev pendampingan UMKM, sampai dengan triwulan I tahun 2025, t diperoleh progress pendampingan UMKM sampai dengan triwulan 1 tahun 2026, sebagai berikut :

1) Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Jumlah Target	Tahapan Pendampingan		Realisasi	Bobot	Persentase (Jumlah UMK x Bobot)
22 UMK Pangan Olahan	1.	Pengumpulan Data (Jan-Maret)	Dilakukan pengumpulan data UMK Pangan Olahan sebagai calon target pendampingan	5%	110%

Jumlah Target	Tahapan Pendampingan		Realisasi	Bobot	Persentase (Jumlah UMK x Bobot)
	2.	Penetapan Target (Jan-Maret)	Ditetapkan SK Penetapan Target Pendampingan UMK Pangan Olahan sebanyak 22 UMK	10%	220%
	3.	Bimtek CPPOB (Feb-Juni)	-	30%	-
	4.a	Pendampingan Sarana (Feb-Des)	-	15%	-
	4.b	Pendampingan dokumen (Feb-Des)	-	15%	-
	4.c	Coaching e-Sertifikasi (April-Nov)	-	15%	-
	4.d	Terbit IP CPPOB (April-Des)	-	5%	
	5.	Pelaporan (Feb-Des)	Dilakukan pelaporan bulan Januari – Maret	5%	24%
TOTAL				**100%**	**354%**

2) Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

Jumlah Target	Tahapan Pendampingan		Realisasi	Bobot	Persentase (Jumlah UMK x Bobot)
1 UMKM OBA	1.	Penetapan Target (Jan-Feb)	Ditetapkan SK Penetapan Target Pendampingan UMKM OBA sebanyak 1 UMKM	10%	10%
	2.	Bimtek (Maret-April)	-	20%	-
	3.	Pendampingan UMKM (April-Okt)	-	40%	-
	4.	Sertifikasi (Sep-Des)	-	20%	-
	5	Monev dan Pelaporan (Sep-Des)	-	10%	-
TOTAL				**100%**	**10%**

3) Pendampingan UMKM Kosmetik

Jumlah Target	Tahapan Pendampingan		Realisasi	Bobot	Persentase (Jumlah UMK x Bobot)
3 UMKM Kosmetik	1.	Penetapan Target (Jan-Feb)	Ditetapkan SK Penetapan Target Pendampingan UMKM Kosmetik sebanyak 3 UMKM	10%	30%
	2.	Bimtek (Maret-April)	-	20%	-

Jumlah Target	Tahapan Pendampingan		Realisasi	Bobot	Persentase (Jumlah UMK x Bobot)
	3.	Pendampingan UMKM (April-Okt)	-	40%	-
	4.	Sertifikasi (Sep-Des)	-	20%	-
	5	Monev dan Pelaporan (Sep-Des)	-	10%	-
TOTAL				**100%**	**30%**

Dari progress pendampingan UMKM masing-masing komoditi di atas, diperoleh realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan olahan sebagai berikut:

Komoditi	Jumlah UMKM yang Didampingi	Total Progress Pendampingan
Pangan Olahan	22	354%
Obat Bahan Alam	1	10%
Kosmetik	3	30%
Total	**22**	**394**
Realisasi triwulan I tahun 2026		**15,15%**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sampai dengan TW I tahun 2026 sebesar 15,15% atau mencapai 101,03% dari target TW 3 yaitu sebesar 15%. Hal ini didukung oleh komitmen fasilitator pendampingan UMKM untuk melakukan pendampingan UMKM sesuai tahapan yang menjadi target setiap bulannya dan monev secara berkala terhadap tahapan progress pendampingan UMKM sesuai dengan pedoman.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan / CAPA pada proses pemberian rekomendasi/ sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak tepat waktu/ melewati timeline sehingga berpotensi permohonan ditolak	Menyelenggarakan desk CAPA untuk UMKM yang belum melaporkan CAPA hasil pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional	1. Melakukan pemantauan pelaporan CAPA UMKM dalam dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional Melakukan desk CAPA pada UMKM yang telah mendekati timeline CAPA	Desember 2026	Y	S-13	Pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan / CAPA pada proses pemberian rekomendasi/ sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak tepat waktu/melewati timeline

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

a. Adanya inovasi Ganii UMKM sangat bermanfaat pada tahap pengumpulan data UMKM yang kemudian akan diseleksi sebagai target pendampingan tahun 2026
b. Monev progress pendampingan tahapan pendampingan UMKM tahun 2026 secara berkala, sehingga setiap tahapan dapat terpantau realisasinya dan dapat dilakukan intervensi jika terdapat kendala.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dalam Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QDg.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, dengan kegiatan berupa :

1) Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan
2) Fasilitasi/Pendampingan dalam rangka Penerapan CPPO/ CPOT dan CPKB

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 17.965.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 930.000,- (5,18%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
101,03%	5,18%	0,05	-0,95	75 % Tidak Efisien

SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 5.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
3	0	-	-

Meskipun ada realisasi kinerja di triwulan I tahun 2026, sementara tidak ada target di triwulan I tahun 2026, sehingga tidak menghasilkan capaian**.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

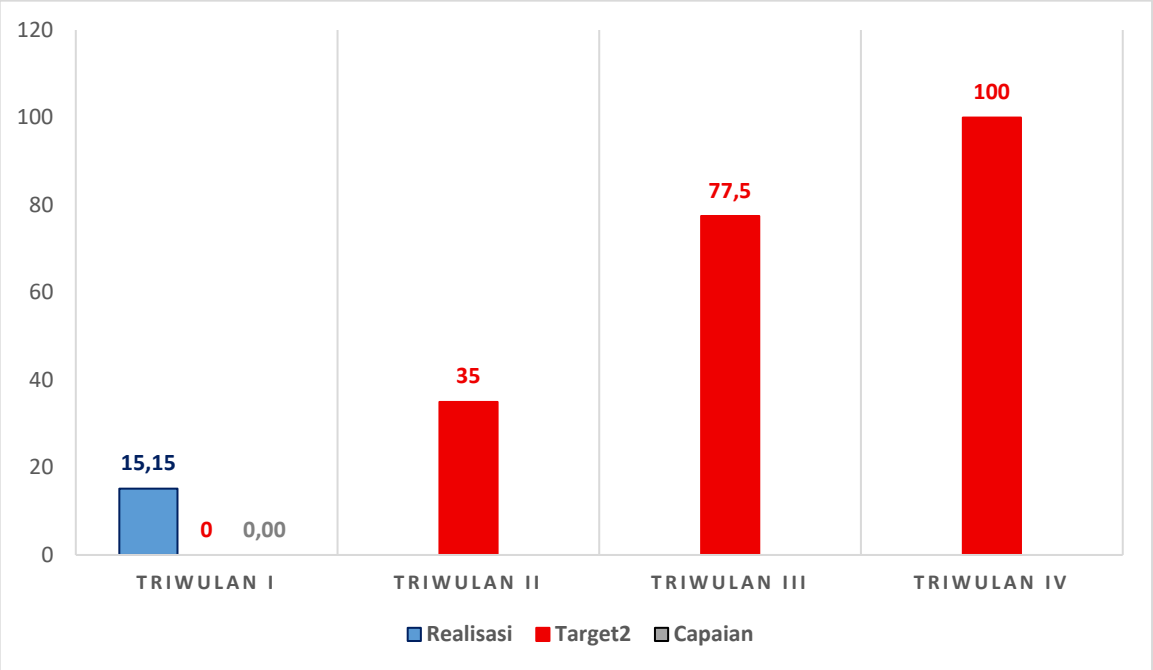

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh data sebagai berikut :

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
3	100	3%	Perlu Upaya Keras

Meskipun realisasi kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2026 hanya 3% dari target tahun 2026 sehingga masuk kategori yang memerlukan upaya keras untuk pencapaian target tahunannya, namun realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 ini sudah melebihi perencanaan dan optimis target tahun 2026 dapat dicapai, tentunya dengan tetap melaksanakan kegiatan terkait sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, BBPOM di Banjarbaru telah merealisasikan 1 (satu) perkara dari target 5 (lima) perkara tahun berjalan, sedangkan target perkara carry over tidak ada, sehingga capaian realisasi perkara tahun 2026 adalah 120%

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total	Capaian Perkara
Target Perkara	5	0	0	20%
Realisasi Perkara	1	0	1	

Kemudian berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dan diperoleh nilai sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi			Bobot	Nilai Realisasi	% Keberhasilan Perkara
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Jumlah			
SPDP	0	0	1	15%	0,15	**Nilai Realisasi / Jumlah Realisasi Perkara x100%**
Tahap I	1	0	0	55%	0	
P21	0	0	0	85%	0	
Tahap II	0	0	0	100%	0	
Jumlah	**1**	**0**	**1**		**0,15**	**3%**

Dengan demikian, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BBPOM di Banjarbaru pada triwulan I tahun 2026 adalah 3%.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Terbitnya UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP sehingga mengubah tata cara penyidikan dari yang sebe lumnya sehingga implementasi pelaksanaannya perlu duduk bersama lintas sektor terkait	Melakukan penyamaan persepsi bersama Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel dalam implementasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP	Melakukan koordinasi lintas sektor secara intens dengan Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel terkait implementasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP	Jan- Des 2026	T	-	-
2	Terhambatnya proses penang anan perkara (perkara tidak selesai/ carry over) yang disebabkan oleh tidak optimalnya koordinasi lintas sektor Criminal Justice System dgn Kejaksaan dan/ atau Kepolisian	Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel sejak saat awal penanganan perkara (SPDP) sampai selesai (Tahap 2) dan membuat Lapor an Kemajuan Perkara sebagai bentuk Monev penyelesaian penanganan perkara	Dilakukannya koordinasi dan konsultasi dengan JPU dari sejak terbitnya SPDP sebanyak 3x dan dilakukan penyelesaian berkas perkara sehingga siap dikirim ke JPU (Tahap 1)	Jan- Des 2026	Y	S-14	Terhambatnya proses pemberkasan dan penanganan perkara (perkara tidak selesai/ carry over)
3	Kegiatan atau upaya paksa yang dilakukan oleh petugas tidak sah di mata hukum dan di anggap melaku	Mensosialisasik an kepada staf penyidik tentang Dokumen SOP, Laporan Koordinasi dan/atau	Menunjuk Penasehat Hukum untuk Tersangka selama dilakukannya proses	Jan- Des 2026	Y	H-01	1. Administrasi kegiatan tidak lengkap 2. Kesalahan prosedur/ pengambilan keputusan

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	kan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Administrasi kegiatan yang tidak lengkap dan kesalahan prosedur / peng ambilan keputus an dalam kegiat an operasi penin dakan/penyidik an sehingga me ngakibatkan pe tugas mengalami penuntutan pra peradilan dan/ atau penuntutan perbuatan melawan hukum	permohonan bantuan personel Korwas PPNS Polda Kalsel, Dokumen Gelar Kasus atau Gelar Perkara sehingga saat penugasan bisa lengkap secara administrasi dan tidak ada kesalahan prosedur	penyidikan terutama saat dilakukan pemeriksaan Tersangka dan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU (Tahap 2)				dalam kegiatan operasi penindakan/ penyidikan
4	Desepsi/ penge labuan dan cover/ penyamar an yang dilaku kan oleh petugas terbongkar atau diketahui oleh target/ lingkung an target yang disebabkan oleh petugas yang belum memiliki kompetensi dalam penerap an teknik dan taktik intelijen yang benar	Menjalankan tugas sesuai dengan SOP, Mentoring dan pemberian penugasan kepada petugas yang belum mengikuti Diklat Intelijen Dasar Sosialisasi SOP tentang Intelijen	Pelaksanaan kegiatan intelijen dipimpin dan dikoordinasikan oleh petugas yang sudah lulus Diklat Intelijen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Intelijen secara profesional dan sesuai prosedur	Jan- Des 2026	Y	K3-04	Petugas belum memiliki kompetensi dalam penerapan teknik dan taktik intelijen yang benar.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) QCD.U34 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarbaru, dengan kegiatan berupa :

- Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen di bidang Obat dan Makanan
- Gelar Kasus dan Pelaporan
- Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Operasi Penindakan
- Penangkapan dan Penahanan
- Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara
- Gelar Perkara
- Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum
- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 338.319.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 47.082.700,- (13,92%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	13,92%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

SK 6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

A. Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2026 diperoleh realisasi kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2026			Notifikasi & Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
50	50	100	Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 menghasilkan capaian 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

B. Perbandingan dengan Kinerja Triwulan sebelumnya.

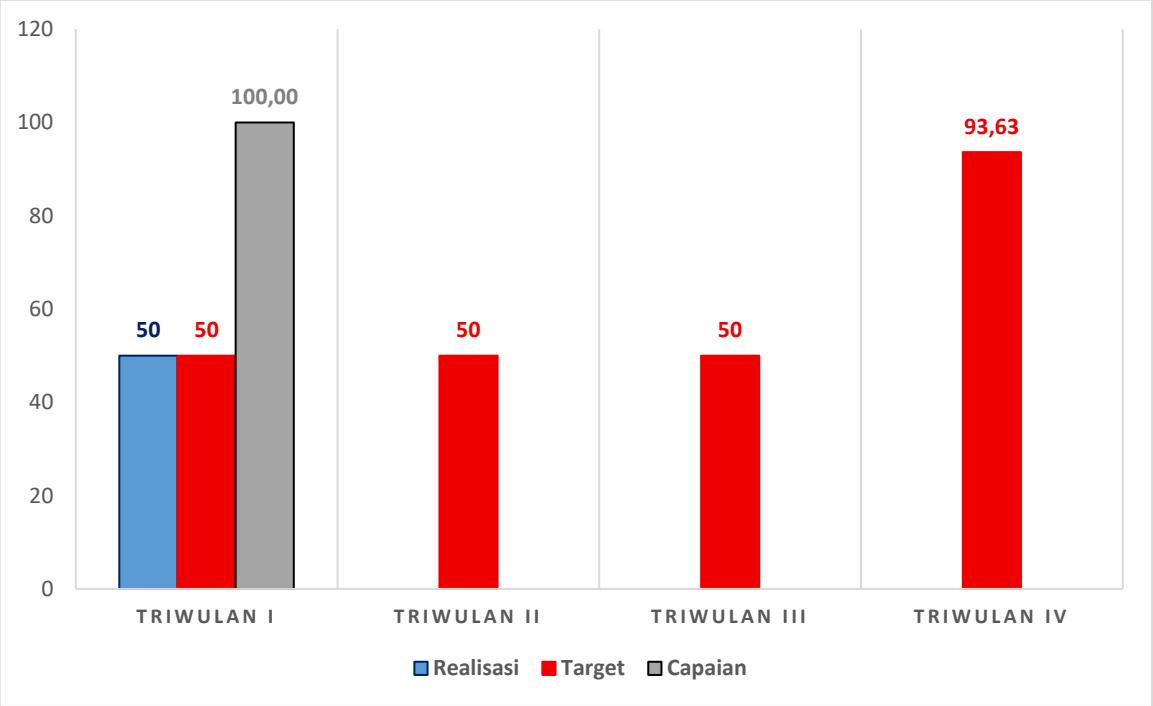

C. Perbandingan dengan Target Tahun 2026

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2026, maka diperoleh data sebagai berikut :

Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahun 2026	Capaian	Notifikasi & Kategori
50	93,63	53,29%	Perlu Upaya Keras

Meskipun realisasi kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2026 hanya 53,29% dari target tahun 2026 sehingga masuk kategori yang memerlukan upaya keras untuk pencapaian target tahunannya, namun realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 ini sudah sesuai perencanaan dan optimis target tahun 2026 dapat dicapai, tentunya dengan tetap melaksanakan kegiatan terkait sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan III tahun 2025, diperoleh data sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Nilai Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar	100	50%	50
2	Nilai Analisis Kejahatan	-	100%	-
3	Nilai Tindak Lanjut Kerawanan Kasus	-	100%	-
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			**50**

Dengan demikian, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BBPOM di Banjarbaru pada triwulan I tahun 2026 adalah 50%.

Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Indikator : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tidak tersedia nya/terlambat nya penyampai an Laporan Anali sis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga batas waktu yg telah ditetapkan yang disebabkan oleh tidak ada nya penunjukan penanggung jawab/operator dan monitoring penyelesaian dan penyampai an Laporan Analisis Kejahat an Sediaan Far masi dan Pangan Olahan secara berkala	Melaksanakan penunjukan penanggung jawab / operator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; Melaksanakan monitoring penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan terkait pelaksanaan pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dan memastikan pelaporan dilaporkan secara ruti tiap bulan	Jan- Des 2026	Ya	O-09	Tidak tersedia nya/terlambat nya penyampai an Laporan Analisis Keja hatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga batas waktu yg telah ditetapkan yang disebab kan oleh tidak adanya Penun jukan penang gung jawab/ operator dan monitoring penyelesaian dan penyam paian Laporan Analisis Keja hatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output

(RO) AEA.001 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarbaru, dengan kegiatan berupa :

- Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan
- Koordinasi Lintas Sektor
- Konsultasi/ Peningkatan Kompetensi Petugas.

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut di atas, yaitu Rp. 9.953.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 5.989.,000,- (60,17%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
100%	13,92%	0,60	-0,04	75 % Tidak Efisien

SK 7. Layanan Publik UPT yang Prima

IKSK 7.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) BAH.001 Penerbitan keputusan/ sertifikat layanan publik, dengan kegiatan antara lain :
    - Audit Sarana produksi/ distribusi produk Obat dan Makanan dalam rangka perizinan dan sertifikasi/ penerbitan SKI/ SKE
    - Coaching dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan
    - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik

Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 100% dari pagu yang tersedia pada Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 11.898.000,- engan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 2.279.000,- (19,15%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	19,15%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

SK 8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IKSK 8.1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :
  - BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
  - EBA.956 Layanan BMN
  - EBA.994 Layanan Perkantoran

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 60% dari pagu yang tersedia pada masing-masing Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 7.651.915.800,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1.525.745.355,- (19,94%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	19,94%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

IKSK 8.3. Nilai AKIP UPT BPOM

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Nilai AKIP UPT BPOM dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :
  - BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
  - EBA.956 Layanan BMN
  - EBA.994 Layanan Perkantoran

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 20% dari pagu yang tersedia pada masing-masing Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 2.550.638.600,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 508.581.785,- (19,94%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	19,94%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

IKSK 8.5. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :
  - BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
  - EBA.956 Layanan BMN
  - EBA.994 Layanan Perkantoran

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 10% dari pagu yang tersedia pada masing-masing Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 1.275.319.300,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 254.290.893,- (19,94%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	19,94%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

IKSK 8.7. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

- Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tagging kegiatan dan anggaran terhadap indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu Rincian Output (RO) :
  - BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
  - EBA.956 Layanan BMN
  - EBA.994 Layanan Perkantoran

  Besaran anggaran yang dialokasikan adalah 10% dari pagu yang tersedia pada masing-masing Rincian Output (RO) tersebut, yaitu Rp. 1.275.319.300,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 254.290.893,- (19,94%) sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE
-	19,94%	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Selesai	1. Finalisasi rencana prioritas terhadap alat yang wajib dikalibrasi disesuaikan dengan anggaran tersedia. 2. Telah dilakukan perencanaan kalibrasi alat pada bulan januari 2026.	Setiap bulan februari tahun berjalan (2-26)	Ya	S-O5	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier
2	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan reagen dengan baik, melakukan monitoring stok baku pembanding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	Melakukan peng ajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan rea gen dengan baik, melakukan monitoring stok baku pemban ding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	Belum Selesai	1. Perbaikan dan pembe lian suku cadang alat yang hanya terdapat satu unit mulai dilaksanakan. 2. Pembelian reagen sesu ai kebutuhan dilaksanakan pada triwulan satu. 3. Stock opname baku pembanding pada awal triwulan satu.	Jan-Des 2026	Ya	S-06	Timeline pengujian tidak tercapai

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindakl anjuti sesuai ketentuan	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh terlambatnya pengisian data dari poksi lain/ balai regional di SIPT	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	Belum Selesai	Telah dilaksanakan tindak lanjut dengan melakukan pengisian pada spreadsheet yang disediakan balai regional untuk setiap sampel regional yang diuji.	Jan-Des 2026	Ya	S-O7	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu
4	Persentase fasilitas pelayan an kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pelaporan fasyan kes merupakan faktor eksternal yang tidak mudah dikendalikan	Melakukan monitoring dan evaluasi aktif internal terhadap pelaporan KTD/ESO berkala	Monitoring dan evaluasi aktif internal terha dap pelaporan KTD/ESO setiap bulannya	Belum Selesai	Pada tahun 2026, sampai dengan TW 1 belum dilaksakanak KIE KTD/ESO	Setiap akhir bulan berjalan	Ya	O-19	Fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovi gilans tidak mela kukan pelaporan KTD/ESO
5	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	- Kalibrasi pera latan BBPOM di Banjarbaru oleh BPMSB dan Vendor (Kalibrasi Eksternal).	Belum Selesai	Berdasarkan Jadwal kalibrasi dan Prioritas yang disusun Tim kalibrasi	Mar - Des 2026	Ya	S-05	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindakl anjuti sesuai ketentuan	Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengaju an perbaikan alat, membuat perencana an pengadaan rea gen dengan baik, me lakukan monitoring stok baku pemban ding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	- Meminta pengi sian form di link https://bit.ly/For m_Kerusakan_Al atLab yg mana formulir ini digu nakan untuk mendokuentasi kan setiap keru sakakan alat Lab di BBPOM di Banjarbaru (Pj Yaumil Hafidza Wardini)	Belum Selesai	Aktif melakukan pengisian Form dan kerusakan alat diperbaiki berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia	Mar - Des 2026	Ya	S-06	Timeline pengujian tidak tercapai
7	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh terlambatnya pengisian data dari poksi lain/ balai regional di SIPT	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	- Pengisian Do- kumen evaluasi Regionalisasi Lab setiap bulan selama tahun berjalan. - Penunjukan Koordinator data setiap Balai untuk memudah kan koordinasi dalam satu regi onal dan Melaku kan monitoring timeline	Belum Selesai	Pengisian Tools Monev Regionalisasi di tanggal 30/31 setiap bulan berjalan	Mar - Des 2026	Ya	S-07	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier yang disebabkan oleh alat yang tidak dikalibrasi	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Melakukan perencanaan kalibrasi alat	Belum Selesai	Berdasarkan Jadwal kalibrasi dan Prioritas yang disusun Tim kalibrasi	Setiap bulan februari tahun berjalan (2026)	Ya	S-05	Hasil pengujian tidak valid, hasil uji profisiensi outlier.
9	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Timeline pengujian tidak tercapai yang disebabkan oleh Alat yang rusak, reagen yang tidak tersedia dan baku pembanding yang tidak tersedia	Melakukan pengaju an perbaikan alat, membuat perencana an pengadaan rea gen dengan baik, melakukan monitor ing stok baku pembanding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	Melakukan peng ajuan perbaikan alat, membuat perencanaan pengadaan rea gen dengan baik,melakukan monitoring stok baku pemban ding, melakukan peminjaman reagen dengn balai yang lain	Belum Selesai	Aktif melakukan pengisian Form dan kerusakan alat diperbaiki berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia	Jan-Des 2026	Ya	S-06	Timeline pengujian tidak tercapai
10	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu yang disebabkan oleh terlambatnya pengisian data dari poksi lain/ balai regional di SIPT	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	Dokumen evaluasi Regionalisasi Laboratorium setiap bulan selama tahun berjalan.	Belum Selesai	Pengisian Tools Monev Regionalisasi di tanggal 30/31 setiap bulan berjalan	Jan-Des 2026	Ya	S-07	Pelaporan hasil pengujian SIPT tidak tepat waktu

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
11	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	- Lonjakan jumlah sampel KLB secara tiba-tiba - Keterbatasan media atau reagen untuk parameter KLB	- Tersedianya SOP penanganan untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Tersedianya Tim KLB	- Tersedianya SOP penangan an untuk sampel KLB - Menyusun daftar usulan pengadaan media atau reagen khusus KLB - Tersedianya Tim KLB	Selesai	- Telah merevisi SOP pela yanan pengujian, yang di dalamnya mencantumkan tambahan proses umtuk sampel KLB KP - Telah menyusun kebutuh an media untuk pengujian rapid sampel KLB KP, yang termasuk di dalam list pengadaan media sampel rutin (dikarenakan tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan media rapid sampel KLB KP) - Telah tersedia SK Tim Gerak Cepat Penanggu langan KLB KP untuk 2026	Setiap bulan februari tahun berjalan (2026)	Ya	S-18	Keterlambatan penyelesaian pengujian sampel KLB
12	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian parameter uji tidak terpenuhi karena hanya dilakukan pengujian parameter wajib dan tidak menambahkan parameter pilihan sehingga sesuai Pedoman Prioritas Sampling.	Koordinasi dengan tim pemeriksaan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan karena Sampai sekarang PS masih belum di sahkan	Dilakukan kaji ulang permin taan uji oleh ketua tim; Telaah berting kat dari penguji, penyelia dan ketua tim agar untuk sampel yang hanya memiliki parame ter wajib kurang	Belum Selesai	Penentuan Parameter Uji menggunakan Draft PS tahun 2026	Jan – Juni 2026	Ya	S-07	Ketidaksesuaian parameter uji sesuai dengan PS

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				dari 3 agar dapat menam bah parameter pilihan agar memenuhi keten tuan yang diper syaratkan oleh Pedoman Priori tas Sampling						
13	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian para meter uji tidak ter penuhi karena hanya dilakukan pengujian parame ter wajib dan tidak menambahkan parameter pilihan sehingga sesuai Pedoman Prioritas Sampling yang disebabkan oleh kurangnya pema haman penguji terhadap Pedoman Prioritas Sampling sehingga dikarena kan Beban kerja tinggi sehingga penguji memilih	Dilakukan kaji ulang permintaan uji oleh ketua tim; Telaah bertingkat dari penguji, penyelia dan ketua tim agar untuk sampel yang hanya memiliki parameter wajib kurang dari 3 agar dapat menambah parameter pilihan agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pedoman Prioritas Sampling	Dilakukan kaji ulang permin taan uji oleh ketua tim; Telaah berting kat dari penguji, penyelia dan ketua tim agar untuk sampel yang hanya memiliki parame ter wajib kurang dari 3 agar da pat menambah parameter pilih an agar meme nuhi ketentuan yang dipersyarat kan oleh Pedoman	-		Jan – Juni 2026	Ya	O-17	Kesesuaian parameter uji tidak terpenuhi karena hanya dilakukan pengujian parameter wajib dan tidak menambahkan parameter pilihan sehingga sesuai Pedoman Prioritas Sampling.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		parameter wajib saja dan hal ini juga diperkuat karena Penghe matan penggunaan reagen, pereaksi, dan media yang ketersediaan nya terbatas karena pengadaannya mengalami efisiensi		Prioritas Sampling						
14	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawas an Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh stakeholder	Monitoring feedback dari pelaku usaha melalui pesan elektronik kepada pelaku usaha belum cukup efektif untuk menaikkan realisasi indikator ini	Membuat kegiatan desk CAPA secara rutin, bentuk kegiatan secara daring / luring menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Membuat kegiatan desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum memberikan feedback CAPA secara periodic.	Belum Selesai	1. Penyusunan perencanaan jadwal Desk CAPA pada bulan Juni dan Desember 2026 2. Penyediaan sumber daya anggaran Desk CAPA	Desember 2026	Ya	24	Rendahnya keputusan/ rekomendasi hasil pengawas an Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak ditindak lanjuti oleh pelaku usaha
15	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Terdapat beberapa sarana produksi yang sudah tidak aktif produksi dan terdapat kendala dalam penerbitan tindaklanjut.	Kegiatan yang mendukung keberhasilan IKU salah satunya adalah monitoring pelaksanaan pengawasan secara	Setelah konsul tasi dengan Dit Waskos terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi Golongan B	Selesai			Ya		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sesuai ketentuan		rutin dan terjadwal sehingga timeline di masing-masing kegiatan dapat terpantau	yang seharus nya di terbitkan UPT, maka Tindak Lanjut terhadap sarana produksi yang sudah tidak aktif berproduksi akan diterbitkan oleh pusat namun tetap dihitung capaian output						
16	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target tahunan untuk indikator ini bersifat flat dengan target tahunan kurang dari 12 (target setahun pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi adalah 6, terdiri dari sarana produksi OBA 2 dan Produksi kosmetik 4, sehingga di bebe rapa bulan tidak akan ada capaian.	Melakukan perencanaan pengawasan sehingga representatif terhadap pengawasan selama tahun berjalan	Realisasi pengawasan sarana produksi di TW 1 tercapai 100% (pemeriksaan sarana produksi kosmetik) dan ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai ketentuan.	Selesai			Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
17	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum semua petugas memahami pedoman tindak lanjut pengawasan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana	Membuat kegiatan diseminasi oleh petugas yang telah mengikuti peningkatan kompetensi/pelatihan yang diselenggarakan PPSDM	-		Desember 2026	Ya	25 26	- Pembuatan surat tindak lanjut/ rekomendasi hasil pemeriksaan tidak sesuai timeline yang ditetapkan - Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline
18	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha tidak sesuai dengan pedoman	Peningkatan pemahaman petugas	Melakukan resosialisasi penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	Selesai	Telah dilakukan sosialisasi kembali penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan melalui wag grup	Februari 2026	Tidak	-	-
		Pelaporan SIPT tidak tepat waktu	Penguatan monitoring pemenuhan timeline pelaporan SIPT setiap akhir bulan	Melakukan monitoring melalui rekap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	Selesai	Telah dilakukan penguatan monitoring melalui rekap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Pada bulan Maret 2026 tidak terdapat pelaporan SIPT dari pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang tidak sesuai timeline	Maret 2026	Ya	S-12	Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
19	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Batas waktu (timeline) dalam penyampaian pela poran melalui SIPT antara komoditi obat, OBA, SK, Kosmetika dan Pangan berbeda - beda, petugas peng awas perlu memper hati kan pemenuh an waktunya masing[2] supaya tidak melewati waktu yang telah ditetapkan sesuai pedoman	Melakukan monitoring pemenuhan timeline pelaporan SIPT	Dilakukan monitoring dan evaluasi yang melekat oleh ketua tim kepada anggota tim taerhadap pelaporan yang disampaikan melalui SIPT ataupun rekap pemeriksaan sarana yang terdapat pada link drive internal disetiap bulannya	Belum Selesai	Sudah dilakukan namun masih terdapat pelaporan melalui SIPT yang melebihi timeline	Desember 2026	Ya	S-12	Pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline
20	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih terdapat perbedaan pengambilan kesimpulan hasil pengawasan antara petugas pengawas dengan verifikator	Meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana	Membuat kegiatan diseminasi oleh petugas yang telah mengikuti peningkatan kompetensi/ pelatiha nyang diselenggarakan PPSDM	Selesai	Telah dilakukan diseminasi terkait pedoman TL hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan inspektur CDOB	Desember 2026	Ya	25 26	• Pembuatan su rat tindak lanjut/ rekomen dasi hasil pemeriksa an tidak sesuai timeline yang ditetapkan • Pelaporan ha sil pemerik saan sarana melalui SIPT tidak sesuai timeline

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
21	Persentase sa rana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklan juti sesuai ketentuan	Tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha tidak sesuai dengan pedoman	Peningkatan pemahaman petugas	Melakukan reso sialisasi penen tuan tindaklan jut hasil pemerik saan sarana distribusi pangan olahan	Selesai	Telah dilakukan sosialisasi kembali penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan melalui wag grup pada 29 Januari 2026	Februari 2 026	Tidak	-	-
22	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Masih adanya gap/ perbedaan pengam bilan keputusan pengawasan iklan antara petugas UPT dan pusat	Mengikuti refreshment kompetensi pengawasan iklan	Mengikuti pelatihan/bimtek / sosialisasi pengawasan iklan	Belum Selesai	1. Mengikuti kegiatan dgn materi iklan dan penanda an pangan olahan 2. Mengikuti kegiatan deng an materi iklan dan penan daan obat di dalamnya 3. Menunggu undangan kegiatan pusat terkait iklan OBA, SK, kuasi dan kosmetik	Maret 2026	Tidak	-	-
			Monitoring evaluasi kesesuaian pengam bilan keputusan pengawasan iklan OBA	Supervisor mela kukan update berkala hasil eva luasi pengambil an keputusan pengawasan iklan OBA mela lui penarikan data pelaporan pengawasan iklan OBA di SIPT	Belum Selesai	1. Supervisor melakukan update berkala hasil evaluasi pengambilan keputusan pengawasan iklan OBA melalui penarikan data pelaporan pengawasan iklan OBA di SIPT	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
23	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target berdasarkan realisasi TW 4 2025 sehingga untuk penetapan target baru 2026 sudah tinggi. Inidkator kinerja ini didukung oleh komponen iklan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Hal ini sangat berpenga ruh terhadap kesulitan untuk mencapai indikator kinerja ini. Selain itu banyaknya variabel penilaian lain seperti kese suaian renlak, kese suaian evaluasi, dan pemenuhan timeline pelaporan juga menjadi kendala yang patut diperhitungkan dalam pencapaian indikator ini.	Melaksanakan koordinasi dengan Unit Pengampu untuk penyelesaian kendala yang dihadapi (Pusdatin dan Ditwas)		Belum Selesai		Desember 2026	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
24	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Banyaknya kompo nen dalam perhitungan capaian IKU persen tase iklan SF dan PO yg diawasi sesu ai ketentuan dgn metode perhitung an yg berbeda^{2} di masing^{2} komoditi. Target pengawasan yang banyak dgn metode perhitung an yang rumit memungkinkan kurang termonitor nya beberapa kom ponen dalam perhi tungan IKU, missal nya perhitungan akurasi pengambil an keptusan (OBA, SK dan Kuasi) dan ketepatan waktu yg dihitung manual berdasarkan tarikan data SIPT karena belum diakomodir di SIPT terkait hal ini.	Melaksanakan koordinasi dengan Unit Pengampu untuk penyelesaian kendala yang dihadapi (Pusdatin dan Ditwas)		Selesai			Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
25	Persentase label produk tembakau dan// rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Ketidaktepatan waktu supervisor dalam melakukan verifikasi laporan penandaan / label melalui SIPT yang sudah dikirimkan oleh petugas pengawas (melebihi tanggal 5 di bulan berikutnya)	Monitoring yang lebih melekat dan pengecekan berulang terhadap jumlah pelaporan penandaan label rokok melalui SIPT	Reminder petu gas pengawas (operator) kepada super visor untuk menverifikasi hasil pengawas an di SIPT pada akhir bulan periode pengawasan	Belum Selesai	Sampai dengan TW 1 tahun 2026, realisasi persentase label produk tembakau / rokok elektrik yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100%	Desember 2026	Ya	O-21	Pelaporan pengawasan label produk tembakau tidak memenuhi timeline yang ditetapkan
26	Persentase label produk tembakau dan// rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Masih terdapat komponen penilaian yang realisasinya rendah yaitu ketepatan palaporan dengan nilai 83.33	Memperhatikan dateline penyampaian pelaporan agar tepat waktu dan mencapai target.	Reminder daripetugas keketua timuntuk melakukan verifikasi dan segera dikirimkan ke Kepala balai melalui SIPT	Selesai	Telah dilakukan reminder dari petugas ke ketua tim untuk melakukan verifikasi dan segera dikirimkan ke Kepala Balai melalui SIPT	Desember 2026	Ya	56	Ketidaktepatan waktu supervi sor dalam mela kukan verifikasi laporan penanda an / label mela lui SIPT yang sudah dikirim kan oleh petu gas pengawas (melebihi tgl 5 di bulan berikutnya)

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
27	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Terdapat hasil observasi pengisian tools pada 1 sarana yang tidak dilaporkan melalui SIPT	Penguatan monitoring kelengkapan pelaporan oleh supervisor	Meningkatkan monitoring kelengkapan pelaporan tools AMR pada setiap pelaporan SIPT pemeriksaan Apotek	Selesai	Telah dilakukan monitoring kelengkapan pelaporan tools AMR untuk pemsar Apotek. Sampai dengan TW 1 tahun 2026 semua pemeriksaan sarana Apotek telah menggunakan tools AMR	Maret 2026	Ya	O-23	Hasil observasi pengelolaan antibiotik tidak tersedia /tidak lengkap pada BAP Inspeksi Saryanfar
28	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Jumlah metoda analisa yang telah diverifikasi belum terenuhi dalam pencapaian nilai SKL, hal ini dilkare nakan pengerjaan verifikasi memerlu kan waktu khusus sehingga perlu perencanaan yang baik agar penyele saian sampel rutin juga dapat terlaksa nakan tepat waktu.	Menyusun jadwal perencanaan verifikasi metoda analisa dengan menyesuaikan pengujian sampel rutin	Melaksanakan verifikasi metoda analisa sesuai jadwal perencanaan	Selesai	-	-	Tidak	-	-
29	Nilai pemenuh an Lab Penguji an Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	Jumlah alat laboratorium belum terpenuhi dalam rangka pencapaian SKL, hal ini dikarenakan penga daan alat laborato	membuat rekapitulasi data peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi, baik jumlah maupun kondisi peralatan	pengadaan peralatan laboratorium dilaksanakan berdasarkan skala prioritas	Belum Selesai	pemantauan pengadaan peralatan laboratorium berdasarkan skala prioritas, serta pemanfaatan alat alaboratorium yang telah tersedia secara optimal	Desember 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kemampuan Laboratorium	rium belum semua nya terealisasi yang terdampak dengan adanya efisiensi anggaran								
30	Nilai pemenuh an Lab Penguji an Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Standar kompetensi laboratorium obat belum terpenuhi karena adanya sam pel obat yang tidak pernah lagi masuk laboratorium sehing ga tidak bisa diuji	berkoordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk melakukan sampling sampel obat yang tidak pernah diuji	melakukan sampling dan pengujian sampel obat	Belum Selesai	akan dilakukan sampling dan pengujian sampel obat pada triwulan selanjutnhya	Desember 2026	Tidak		
31	Nilai pemenuh an Lab Penguji an Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ruang lingkup kompetensi personil laboratorium belum dapat terpenuhi disebabkan oleh tema pelatihan/ bimtek dari PPPOMN yang belum mengako modir kebutuhan pemenuhan ruang lingkup kompetensi personel	Menyusun perencanaan pelatihan internal dalam rangka pemenuhan ruang lingkup kompetensi personel	Pengajuan usulan rencana pelatihan internal di Balai Besar POM di Banjarbaru kepada PPPOMN	Belum Selesai	Telah disusun usulan perencanaan pelatihan internal fungsi Pengujian dan telah diajukan ke PPPOMN. Hal ini terus berproses sampai dengan usulan disetujui dan pelatihan terealisasi dilaksanakan di tahun 2026.	Jan - Desember 2026	Ya	S-O8	Pemenuh an ruang lingkup Kompeten si Personel Laboratorium terhambat

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
32	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Upaya memperta hankan dan mening katkan pencapaian dalam Lomba Pene rapan Green Labora tory Tahun 2025, yang diperoleh BBPOM di Banjarbaru	Menyusun tim pemantauan terhadap aspekaspek penerapan Green Laboraotory	Melakukan evalu asi terhadap pe nerapan Green Laboratory yang disesuaikan dgn rapat internal fungsi Pengujian	Belum Selesai	Telah disusun tim pemantauan terhadap aspek-aspek penerapan Green Laboraotory yang berkaitan dengan fungsi Pengujian. Evaluasi dilaksanakan pertriwulan dan masih terus berlanjut hingga triwulan IV.	Jan - Desember 2026	Ya	O-27	
33	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	KKPA melibatkan banyak OPD sehing ga instansi pemerin tah daerah yg ditun juk sbg PIC kesulit an dlm mengum pulkan data dukung dari OPD lain untuk penilaian KKPA	Melaksanakan koordinasi secara intens dengan Pemerintah daerah kab/kota terkait program KKPA	Koordinasi ke pemerintah daerah terkait program KKPA	Belum Selesai	berprogres melakukan audiensi terhadap pemerintah daerah kab/kota	Oktober 2026	Ya	O-15	Pelaksanaan hasil pengisian Tools Penilaian Mandiri Kab/ Kota pangan aman tidak men dapatkan nilai yang ditarget kan yaitu > 60
34	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jadwal pemeriksaan berpotensi tidak bersamaan dengan jadwal sampling pangan fortifikasi	Penyusunan renlak dengan menyamakan jadwal pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan sampling pangan	Penyusunan renlak dengan menyamakan jadwal pemerik saan sarana produksi pangan fortifikasi dgn sampling pangan	Belum Selesai	1. Penyesuaian renlak 2026 dgn renlak sampling pangan kategori fortifikasi 2. Penyesuaian kembali renlak karena adanya usulan perubahan target output 2026 (renlak jilid 2) 3. Penyamaan data baseline target output cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi	Juni 2026	Ya	S-15	Tidak tercapainya jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
35	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Survei telah sesuai kegitan KIE yang dilakukan untuk target jumlah res ponden keseluruh an memang belum tercapai karena tar get responden ter sebut adalah target responde total tahunan, dan survei masih berproses	Peningkatkan penyelelarasan survei efektifitas KIE dengan jumlah responden yang di survei	penyelelarasan survei efektifitas KIE dengan jumlah responden yang di survei	Belum Selesai	telah disesuaikan jumlah responde dengan jumlah peserta kegiatan KIE yang dilaksanakan	Desember 2026	Ya	S-02	kurangnya sosialisasi dan publikasi Obat dan Makanan di masyarakat luas
36	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sesuai kesepakatan hasil audiensi dgn pemerintah Kab. Tapin bahwa pelak sanaan Advo kasi lintas sektor setelah bulan Ramadhan & Hari Raya Idul fitri yaitu pada bulan April sehingga pada bulan maret tidak dilaksanakan kegiatan tersebut	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan 21 april 2026	Selesai	Pada bulan maret belum terlaksana karena kesepakatan pada bulan april	30 April 2026	Ya	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
37	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kader sekolah/ pimpinan sekolah yang tidak Melaku kan kaderisasi kepa da kader pengganti di sekolah yang ditinggalkan sehing ga kegiatan inter vensi keamanan PJAS berhenti	Meningkatkan peran komite sekolah (orang tua) untuk ikut serta dalam tahapan PJAS sebagai kader keamanan pangan sekolah	MelakukanKoord inasi dengan Pihak sekolah dengan bisa mengaktifkan komite sekolah sebagai kader keamanan pangan	Belum Selesai	Belum dilakukan pelatihan kader	Desember 2026	Ya	O-12	Pelaksanaan tahapan program Tepadu Pembudayaan Keamanan Pang an di Sekolah (PJAS) tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan
38	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Komitmen dan pemahaman kepala sekolah berbeda-beda sehingga pelaksanaan kegiatan secara mandiri tidak terlaksana dengan baik	Meningkatkan koor dinasi dengan pende katan berbasis resiko tentang pembudayaan keamanan pangan di sekolah	Dilakukan sosialisasi perluasan cakupan terhadap sekolah yang memiliki komitmen dan pemahaman yang kurang	-	Belum dilakukan pelatihan kader	Desember 2026	Ya	O-12	Pelaksanaan tahapan program Tepadu Pembudayaan Keamanan Pang an di Sekolah (PJAS) tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.
39	Jumlah desa pangan aman	Sesuai kesepakatan hasil audiensi dgn pemerintah Kab. tapin bahwa pelak sanaan Advokasi lintas sektor setelah bulan Ramadhan	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	Belum Selesai	Pada bulan maret belum terlaksana karena kesepakatan pada bulan april	April 2026	Ya	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dan Hari Raya Idul fitri yaitu pada bulan April sehing ga pada tidak bisa dilakukan perce patan bulan maret kegiatan tersebut								
40	Jumlah desa pangan aman	Kurangnya aktivitas kader dalam mengimplementasik an ilmu yang didapat pada saat pelatihan KKPD	Meningkatkan keterlibatan kader dalam kegiatan baik program Desa Pangan aman maupun program yang lain	Pelaksanaan KIE stunting Desa melibatkan kader keamanan pangan desa	Belum Selesai		Desember 2026	Ya	O-13	Pelaksanaan tahapan program Tepadu Desa Pangan Aman tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.
41	Jumlah desa pangan aman	Kurang efektifnya Kader remaja yang masih berstatus pelajar karena kemungkinan besar akan berpindah untuk bekerja ataupun untuk melanjukkan Pendidikan	Meningkatkan keterlibatan Kader remaja dalam kader dalam kegiatan baik program Desa Pangan aman maupun program yang lain	Pelaksanaan KIE stunting dengan mengundang Kader remaja sebagai peserta diluar jam sekolah	Belum Selesai		Desember 2026	Ya	O-13	Pelaksanaan tahapantahapan program Tepadu Desa Pangan Aman tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
42	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai kesepakatan hasil audiensi dgn pemerintah Kab. tapin bahwa pelak sanaan Advokasi lintas sektor setelah bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri yaitu pada bulan April sehing ga pada tidak bisa dilakukan perce patan bulan maret kegiatan tersebut	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	pelaksanaan advokasi direncanakan pada bulan april 2026	Belum Selesai	Pada bulan maret belum terlaksana karena kesepakatan pada bulan april	April 2026	Ya	S-04	Realisasi pelaksanaan advokasi lintas sektor tidak sesuai rencana pelaksanaan
43	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tingkat pendidikan dan kemampuan fasilitator dari petugas pasar dan paguyuban pasar yang bervariasi sehingga proses transfer ilmu kepada komunitas sebagian tidak sesuai dengan yang diharapkan.	Meningkatkan koordinasi maupun monitoring terhadap petugas fasilitator pasar terhadap pelaksanaan program Pasar aman berbasis komunitas	Dilakukan pengawalan/ pendampingan terhadap pelaksanaan program Pasar aman berbasis komunitas oleh fasilitator pasar	Belum Selesai		Desember 2026	Ya	O-14	Pelaksanaan tahapan program Tepadu Pasar Aman Berbasis Komunitas tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
44	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rendahnya kesadaran produsen dan pedagang terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam pangan terutama daging dan ikan asin yang mudah busuk (formalin cumi asin, teri medan).	Meningkatkan sosialisasi kepada para produsen dan pedagang terhadap penggunaan Bahan berbahaya pada pangan	Membagi leaflet yang masih ada ke pedagang pasar dan membagi poster bahan berbahaya yang masih ada ke pasar intervensi	Belum Selesai		Desember 2026	Ya	O-14	Pelaksanaan tahapan program Tepadu Pasar Aman Berbasis Komunitas tidak sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.
45	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan / CAPA pada proses pemberian rekomendasi/ sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak tepat waktu/melewati timeline sehingga berpotensi permohonan ditolak	Menyelenggarakan desk CAPA untuk UMKM yang belum melaporkan CAPA hasil pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional	Melakukan pemantauan pelaporan CAPA UMKM dalam dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional	Selesai	Telah dibuat form pemantauan pelaporan CAPA UMKM dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik, dan Obat Tradisional	Desember 2026	Ya	S-13	Pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan / CAPA pada proses pemberian rekomendasi/ sertifikasi UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak tepat waktu/melewati timeline
				Melakukan desk CAPA pada UMKM yang telah mendekati timeline CAPA	Belum Selesai	Untuk kegiatan pendampingan UMKM tahun 2026 baru sampai tahap pengumpulan data dan penetapan target, belum sampai tahap CAPA sertifikasi	Desember 2026	Ya		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
46	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhambatnya proses penanganan perkara (perkara tidak selesai/ carry over) yang disebabkan oleh tidak optimalnya koordinasi lintas sektor Criminal Justice System dengan Kejaksaan dan/ atau Kepolisian	Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel sejak saat awal penangan an perkara (SPDP) sampai selesai (Tahap 2) dan mem buat Laporan Kema juan Perkara sebagai bentuk Monev penyelesaian penanganan perkara	1. Inovasi BAP TWO (Mengin tensifkan koordi nasi dgn lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System terutama dgn Kejaksaan dan/ atau Kepolisian dalam setiap tahap penanga nan perkara); 2. Monev Penye lesaian Pena nganan perkara	Belum Selesai	Dilakukannya koordinasi dan konsultasi dengan JPU dari sejak terbitnya SPDP sebanyak 3x dan dilakukan penyelesaian berkas perkara sehingga siap dikirim ke JPU (Tahap 1)	Jan- Des 2026	Ya	S-14	Terhambatnya proses pemberkasan dan penanganan perkara (perkara tidak selesai/ carry over)
47	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kegiatan atau upa ya paksa yang dila kukan oleh petugas tidak sah di mata hukum dan diang gap melakukan per buatan melawan hukum yang dise babkan oleh Admi nistrasi kegia tan yang tidak leng kap dan kesalahan pro sedur /pengambilan kepu tusan dalam	Mensosialisasikan kepada staf penyidik tentang Dokumen SOP, Laporan Koordinasi dan/atau permohonan bantuan personel Korwas PPNS Polda Kalsel, Dokumen Gelar Kasus atau Gelar Perkara sehingga saat penugasan bisa lengkap secara administrasi dan	1. Melaksanakan kegiatan penin dakan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan perun dangundangan yang berlaku. 2. Berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Kal sel dalam pelak sanaan kegiatan /upayapaksa.	Belum Selesai	Menunjuk Penasehat Hukum untuk Tersangka selama dilakukannya proses penyidikan terutama saat dilakukan pemeriksaan Tersangka dan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU (Tahap 2)	Jan- Des 2026	Ya	H-01	1. Administrasi kegiatan tidak lengkap 2. Kesalahan prosedur/ pengambilan keputusan dalam kegiatan operasi penindakan/ penyidikan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		kegiatan ope rasi penindakan/ penyi dikan sehingga mengaki batkan petugas mengalami penun tutan praper adilan dan/atau penuntutan perbuat an melawan hukum	tidak ada kesalahan prosedur	3. Melakukan gelar kasus atau gelar perkara dalam memutus kan tindak lanjut penanganan kasus, penetap an tersangka, dan SP3						
48	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Desepsi/ pengelabu an dan cover/ penyamaran yang dilakukan oleh petugas terbongkar atau diketahui oleh target/lingkungan target yang disebabkan oleh petugas yang belum memiliki kompetensi dalam penerapan teknik dan taktik intelijen yang benar	Menjalankan tugas sesuai dengan SOP, Mentoring dan pemberian penugasan kepada petugas yang belum mengikuti Diklat Intelijen Dasar Sosialisasi SOP tentang Intelijen	1. Menjalankan tugas sesuai dengan SOP, Mentoring dan pemberian penugasan kepada petugas yang belum mengikuti Diklat Intelijen Dasar 2. Sosialisasi SOP tentang Intelijen.	Belum Selesai	Pelaksanaan kegiatan intelijen dipimpin dan dikoordinasikan oleh petugas yang sudah lulus Diklat Intelijen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Intelijen secara profesional dan sesuai prosedur	Jan- Des 2026	Ya	K3-04	Petugas belum memiliki kompetensi dalam penerapan teknik dan taktik intelijen yang benar.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
49	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kurangnya integritas petugas dan minimnya pengetahuan pihak eksternal tentang larangan gratifikasi terhadap petugas tim penindakan dan/atau PPNS Balai Besar POM di Banjarbaru	Melaksanakan gelar kasus atau gelar perkara dalam menetapkan setiap keputusan tindak lanjut kasus (PJ / Non PJ), Penetapan Tersangka, maupun penghentian penyidikan (SP3). Pelaksanaan WBS, Pakta integritas, Inovasi SOLID.	Melaksanakan gelar kasus atau gelar perkara dlm menetapkan setiap keputus an tindak lanjut kasus (PJ / Non PJ), Penetapan Tersangka, mau pun penghen tian penyidikan (SP3). Pelaksa naan WBS, Pakta integritas, Inovasi SOLID	Belum Selesai	Petugas PPNS dan Tim Penindakan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan di Ideas dengan minimal 3 materi yaitu Integritas Tingkat Dasar, Integritas Tingkat Lanjut dan Integritas ASN serta mengikuti sosialisasi Zona Integritas Pokja Penguatan Pengawasan dengan tema Anti Grartifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan	Jan- Des 2026	Ya	F-04	Gratifikasi petu gas PPNS dan Tim Penindakan olehTersangka/ Terduga pelaku Tindak Pidana karena kurang nya integritas petugas dan minimnya penge tahuan pihak eksternal tentang larang an gratifikasi terhadap petugas tim penindakan dan/atau PPNS Balai Besar POM di Banjarbaru sehingga mengakibatkan Temuan audit Inspektorat dan BPK; Reputasi instansi menjadi buruk

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres Tindak Lanjut Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
50	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhambatnya pe nyelesaian penyidik an akibat terbit nya UU No. 20 - 2025 Tentang KUHAP yg mengubah tatacara penyidikan dari yang sebelumnya	Melakukan penyama an persepsi bersama Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel dalam imple mentasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP	-	Belum Selesai	Melakukan koordinasi lintas sektor secara intens dengan Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel terkait implementasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP	Jan- Des 2026	Tidak	-	-
51	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak tersedianya / terlambatnya penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga batas waktu yang telah ditetap kan yang disebab kan oleh tidak ada nya penunjukan penanggung jawab/ operator dan moni toring penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala	Melaksanakan penunjukan penanggung jawab / operator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; Melaksanakan monitoring penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Melaporkan Patroli Siber dan Profiling tepat waktu tiap bulannya; 2. Monev Dashboard penyelesaian dan penyampaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Tindak Lanjut Cegah Tangkal, dan Penggalangan	Belum Selesai	Dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan terkait pelaksanaan pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dan memastikan pelaporan dilaporkan secara ruti tiap bulan	Jan- Des 2026	Ya	O-09	Tidak tersedia nya/terlambat nya penyampai an Lap Analisis Kejahatan Sed. Farmasi & Pang an Olahan hing ga batas waktu yg tlh ditetapkan yang dise babkan oleh tdk adanya penunjukan pe nanggungjawab/ operator dan monitoring penyelesaian & penyam paian Lap. Anali sis Kejahatan SF & Pangan Olahan secara berkala

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan triwulan I tahun 2025, berdasarkan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja, terdapat beberapa Indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target dan diestimasikan apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi kinerja akan menurun dan target kinerja tidak tercapai dengan capaian yang rendah.

Sesuai dengan arahan pimpinan, dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, diantaranya:

- Percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi Fortifikasi pangan, sehingga ketertinggalan di triwulan I dapat segera dikejar dan kegiatan diselesaikan pada triwulan II tahun 2026
- Pelaksanaan kegiatan secara back to back dalam rangka menyiasati adanya efisiensi anggaran, sehingga target-target tetap dapat dicapai dengan baik.
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya agar dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penambahan realisasi terhadap target yang terkait tersebut di atas selain berdampak kepada realisasi Indikator Kinerja dan Capaiannya msing-masing, juga berdampak kepada Realisasi dan Capaian Volume Output, yang mendongkrak nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan menghasilkan Efisiensi anggaran yang baik.

3.4. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarbaru tahun 2026 berdasarkan DIPA tahun 2026 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2026 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2025, sebesar Rp. 21.267.371.000,- dengan komposisi sesuai jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Jenis Belanja			Jumlah
	51	52	53	
Rupiah Murni	6.263.389.000	11.368.402.000	2.061.500.000	19.693.291.000
PNP	-	1.574.080.000	-	1.574.080.000
Jumlah	**6.263.389.000**	**12.942.482.000**	**2.061.500.000**	**21.267.371.000**

Tabel DIPA BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026 - Awal

Selama periode Triwulan I tahun 2026, BBPOM di Banjarbaru mengadakan 5 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang terdiri dari 3 revisi kewenangan KPA dan 2 revisi kewenangan Kanwil DJPB dan DJA yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhir Triwulan I tahun 2026 pagu menjadi Rp. 19.135.148.000,-

Uraian	Jenis Belanja			Jumlah
	51	52	53	
Pagu	6.263.389.000	11.222.559.000	1.649.200.000	19.135.148.000
Blokir	-	341.005.000	-	341.005.000
Pagu Efektif	6.263.389.000	10.881.554.000	1.649.200.000	18.794.143.000
Realisasi	1.693.274.760	1.401.548.873	68.442.600	3.163.266.235
Capaian Terhadap Pagu	27,03	12,49	4,15	16,53
Capaian Terhadap Pagu Efektif	**27,03**	**12,88**	**4,15**	**16,83**

Tabel DIPA BBPOM di Banjarbaru Tahun 2026 – Triwulan I

A. Realisasi anggaran per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu	Realisasi	%
IKSK 0101	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	674,181,000	-	674,181,000	32,703,487	4.85
IKSK 0102	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	6,620,000	-	6,620,000	-	0.00

Indikator Kinerja		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu	Realisasi	%
IKSK 0103	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	407,192,000	-	407,192,000	50,379,272	12.37
IKSK 0104	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	25,449,500	-	25,449,500	3,148,705	12.37
IKSK 0105	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,899,000	-	50,899,000	6,297,409	12.37
IKSK 0106	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	39,862,200	-	39,862,200	2,879,310	7.22
IKSK 0107	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20,286,000	-	20,286,000	5,879,370	28.98
IKSK 0108	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5,796,000	-	5,796,000	1,679,820	28.98
IKSK 0109	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	219,820,800	-	219,820,800	12,236,400	5.57
IKSK 0110	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,273,600	-	73,273,600	4,078,800	5.57
IKSK 0111	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	18,318,400	-	18,318,400	1,019,700	5.57
IKSK 0112	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	15,463,000		15,463,000	563,000	3.64

Indikator Kinerja		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu	Realisasi	%
IKSK 0113	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	18,318,400		18,318,400	1,019,700	5.57
IKSK 0114	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3,494,948,000	144.150.000	3,350,798,000	233,531,236	6.97
IKSK 0115	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25,449,500		25,449,500	3,148,705	12.37
IKSK 0201	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2,946,600	-	2,946,600	-	0.00
IKSK 0401	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	629,695,000	196.855.000	432,840,000	200,566,000	46.34
IKSK 0402	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	84,688,000	-	84,688,000	3,699,695	4.37
IKSK 0403	Jumlah desa pangan aman	160,662,000	-	160,662,000	1,246,000	0.78
IKSK 0404	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	29,951,000	-	29,951,000	0	0.00
IKSK 0501	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,965,000	-	17,965,000	930,000	5.18
IKSK 0601	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	338,319,000	-	338,319,000	47,082,700	13.92
IKSK 0701	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	9,953,000	-	9,953,000	5,989,000	60.17

Indikator Kinerja		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu	Realisasi	%
IKSK 0801	Indeks Pelayanan Publik UPT	11,898,000	-	11,898,000	2,279,000	19.15
IKSK 0901	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	7,651,915,800	-	7,651,915,800	1,525,745,355	19.94
IKSK 0903	Nilai AKIP UPT BPOM	2,550,638,600	-	2,550,638,600	508,581,785	19.94
IKSK 0905	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1,275,319,300	-	1,275,319,300	254,290,893	19.94
IKSK 0907	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,275,319,300	-	1,275,319,300	254,290,893	19.94
		19,135,148,000	**341.005.000**	**18,794,143,000**	**3,163,266,233**	**16.83**

B. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01	Meningkatnya efektivitas penga wasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	5.095.877.400	144.150.000	4.951.727.400	358.564.914	7,24
02	Meningkatnya Efektifitas Penga wasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2.946.600	-	2.946.600	-	-
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	904.996.000	196.855.000	708.141.000	205.511.695	29,02
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pe menuhan standar keamanan dan mutu	17.965.000	-	17.965.000	930.000	5,18
06	Terlaksananya Penindakan Keja hatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	338.319.000	-	338.319.000	47.082.700	13,92

Sasaran Kegiatan		Pagu	Blokir	Pagu Efektif		
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	9.953.000	-	9.953.000	5.989.000	60,17
08	Layanan Publik UPT yang prima	11.898.000	-	11.898.000	2.279.000	19,15
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	12.753.193.000	-	12.753.193.000	2.542.908.926	19,94
	Jumlah	**19.135.148.000**	**341.005.000**	**18.794.143.000**	**3.163.266.235**	**16,83**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran per Indikator Kinerja BBPOM di Banjarbaru pada triwulan I tahun 2026 berkisar antara 0% hingga 60,17%, dengan total realisasi 16,83%.

Masih terdapat Indikator Kinerja yang anggarannya belum terserap, namun di sisi lain, ada indikator kinerja yang serapannya sudah di atas 60%. Kecilnya penyerapan disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang menunjang tercapainya target masing-masing indikator telah mengalami penyesuaian berdasarkan usulan pengurangan target volume output sebagai dampak efisiensi anggaran.

Realisasi anggaran yang tinggi, yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, disebabkan kecilnya pagu anggaran yang tersedia pada RO terkait, sehingga Ketika kegiatan di dalamnya mulai terlaksana maka komposisi anggaran yang terserap capaiannya nampak tinggi.

Adapun indikator kinerja lainnya yang juga tinggi serapan anggarannya adalah Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, disebabkan adanya percepatan kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (Komisi IX DPR RI) dimana telah diselesaikan 4 kegiatan dari 10 kegiatan yang direncanakan.

Realisasi anggaran per Indikator Kinerja ini membentuk realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan, dengan capaian realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan berkisar antara 0% hingga 60,17%.

C. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	Efisiensi			
						IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4.85	**103,83**	21,40	20,40	75 %	Tidak Efisien
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.37	**100,19**	8,10	7,10	75 %	Tidak Efisien
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	12.37	**100,00**	8,08	7,08	-	Tidak Efisien
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.37	**100,99**	8,16	7,16	75 %	Tidak Efisien
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	7.22	**84,48**	11,70	10,70	75 %	Tidak Efisien
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindak	28.98	**100,00**	3,45	2,45	86 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	Efisiensi			
						IE	TE	Capaian TE	Kategori
			lanjuti sesuai ketentuan						
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	28.98	**98,82**	3,41	2,41	75 %	Tidak Efisien
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5.57	**100,72**	18,09	17,09	75 %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	5.57	**103,01**	18,50	17,50	75 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	5.57	**98,76**	17,74	16,74	75 %	Tidak Efisien
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	3.64	**108,70**	29,85	28,85	75 %	Tidak Efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	5.57	**-**	-	-	-	-
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.97	**101,09**	14,50	13,50	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	Efisiensi			
						IE	TE	Capaian TE	Kategori
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	12.37	-	-	-	-	-
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan	0.00	0,00	-	-	-	-
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	46.34	100,40	2,17	1,17	86 %	Tidak Efisien
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4.37	100,00	22,89	21,89	75 %	Tidak Efisien
		03	Jumlah desa pangan aman	0.78	100,00	128,94	127,94	75 %	Tidak Efisien
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	100,00	-	-	92 %	Efisien
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5.18	101,00	19,51	18,51	75 %	Tidak Efisien
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	13.92	-	-	-	75 %	-

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	Efisiensi			
						IE	TE	Capaian TE	Kategori
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	60.17	**100,00**	1,66	0,66	90 %	Efisien
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	19.15	-	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	19.94	-	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
		03	Nilai AKIP UPT BPOM	19.94	-	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
		05	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	19.94	-	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	19.94	-	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

D. Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	7,24	100,05	13,82	12,82	75 %	Tidak Efisien
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	0,00	-	-	75 %	-
03	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	29,02	100,10	3,45	2,45	75 %	Tidak Efisien
04	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5,18	101,00	19,51	18,51	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
05	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	13,92	-	-	-	75 %	-
06	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	60,17	100,00	1,66	0,66	90 %	Efisien
07	Layanan Publik UPT yang prima	19,15	-	-	-	75 %	-
08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19,94	0,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada triwulan I tahun 2026 ini hampir seluruh Indikator Kinerja tidak efisien, hal ini disebabkan karena sebagian besar capaian realisasi anggaran Indikator Kinerja lebih tinggi daripada capaian kinerjanya.

Diharapkan seiring dengan berjalannya waktu dan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja agar seimbang dengan capaian realisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Pada triwulan I tahun 2026 BBPOM di Banjarbaru berhasil Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 94,84% dengan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) Baik. Nilai tersebut diperoleh dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang telah memiliki target dan realisasi di triwulan I tahun 2026, bersama-sama 9 (sembilan) Indikator Kinerja lain yang belum diperhitungkan, terbagi dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan.

Dari 19 Indikator Kinerja tersebut, 9 (sembilan) Indikator Kinerja memperoleh kategori capaian Sangat Baik, 8 (delapan) Indikator Kinerja memperoleh kategori Baik, dan masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja memperoleh kategori Cukup dan Kurang.

Indikator yang capaian kinerjanya masuk kategori Kurang adalah Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, hal ini disebabkan karena adanya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai dampak efisiensi anggaran dan usulan perubahan target volume output.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan DIPA tahun 2025 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2026 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp. 21.267.371.000,-

Selama triwulan I tahun 2025, BBPOM di Banjarbaru mengadakan 5 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang terdiri dari revisi kewenangan KPA, Kanwil DJPB, dan DJA, yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhir tahun 2025 pagu menjadi Rp. 19.135.148.000,- dengan Blokir Rp. 341.005.000,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 18.794.143.000 ,-

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru pada triwulan I tahun 2026 adalah Rp. 3.163.266.235,- atau 16,83% terhadap Pagu Efektif 2026.
Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 diperoleh Indeks Efisiensi (IE) 5,63 dan Tingkat Efisiensi (IE) 4,63 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah 75% Tidak Efisien

Adanya program penghematan belanja pemerintah berupa blokir anggaran dan berkurangnya pagu efektif cukup menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang dimiliki.

Untuk mengatasinya Balai Besar POM di Banjarbaru melaksanakan kegiatan secara back to back dengan kegiatan lainnya atau menggunakan anggaran dari RO lain yang masih berkaitan dengan RO yang dimaksud.

Lampiran

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU
Jl. Bina Praja Utara, Banjarbaru 70732
Telepon : (0511) 5200009, Fax : -
Email : bpom_banjarbaru@pom.go.id; Website : www.banjarbaru.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.10.25.232 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2026;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU

LEONARD DUMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.09.25.232 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,5
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,8
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,5
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,06
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34,23
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,85
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,18
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU

LEONARD DUMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D.
Jabatan	: Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru	Kepala Badan POM
Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.	**Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.2 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28,89 Persen
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.81
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.02 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98.64 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.38 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.73 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.08 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.91 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71.43 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.03 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	34.32 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	93.83 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.78 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.85 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.18 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 19,135,148,000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6.400.455.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12.734.693.000

Banjarbaru, 26 February 2026

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt.

Pihak Kedua
Kepala Badan POM

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	674.181.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												28.89	6.620.000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	407.192.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.449.500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	50.899.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	98.64	39.534.800
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20.286.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	5.796.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	98.73	219.820.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	97.08	73.273.600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	99.91	18.318.400
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	15.463.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	18.318.400
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	73.5	73.5	73.5	74.5	74.5	74.5	75	75	75	75.5	3.494.948.000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												28.57	25.449.500
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		14	14	14	42	71	71	71	71	71	71	71.43	3.274.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	629.695.000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	7	7	25	35	45	50	75	95	95	100	12	84.688.000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	9	14	52	72	77	92	94	96	98	100	4	160.662.000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	7	7	25	40	73	92	94	96	98	100	1	29.951.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	4	6	15	40	45	55	60	70	80	90	95	34.32	17.965.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	7.5	35	55	70	77.5	92.5	94	100	338.319.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	93.83	9.953.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.78	11.898.000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												92.85	7.651.915.800
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.18	2.550.638.600
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.275.319.300
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	1.275.319.300
														Total	19.135.148.000

Banjarbaru, 26 February 2026

Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

Ary Vustantiningsih, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026

User - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru

Panduan

NKO

Data Tahun 2026

94.84%

Pagu

Data Tahun 2026

Rp 112,461,694,000

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2026

Rp 90,460,049,078

Capaian

Data Tahun 2026

80.44%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Bulan

Maret ×

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.20	99.88		
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.81	100.00		
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%	100.00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.02	100.00		

6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98.64	83.33	84.48%	84.48%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00%	100.00%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.38	95.24	98.82%	98.82%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.73	99.44		
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.08	100.00		
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.91	98.67	98.76%	98.76%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92.00	100.00		
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	-	-
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.50	74.30		
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	-	-
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.00	0.00		
17	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.03	91.39		
18	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7.00	7.00	100.00%	100.00%
19	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah desa pangan aman	14.00	14.00	100.00%	100.00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	7.00	7.00	100.00%	100.00%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.00	15.15		

22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	0.00	-	-
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	100.00%
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	-
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
26	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
27	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
28	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	-

Legend Kerangka Kerja Logis

Warna	Keterangan
	Kurang (Capaian < 60)
	Cukup (60 >= Capaian <= 90)
	Baik (90 > Capaian <= 100)
	Sangat Baik (100 > Capaian <= 110)
	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 110)

Legend Nko

Predikat Nko	Warna
Sangat Kurang (Capaian <= 20)	
Kurang (20 > Capaian <= 60)	
Butuh Perbaikan (60 > Capaian <= 80)	
Baik (80 > Capaian <= 100)	
Istimewa (Capaian > 100)	